



EKONOMI INTERNASIONAL

Penulis :

Roy Budiharjo, Ike Susanti, Paulus Laratmase,
Tri Wahyu Rejekiningsih, Banatul Hayati, I Nyoman Wahyu Widiani,
Misbahul Munir, Fathimah Kurniawati, Yuyun Anggraini,
Yulia Nurendah



EKONOMI INTERNASIONAL

**Roy Budiharjo
Ike Susanti
Paulus Laratmase
Tri Wahyu Rejekiningsih
Banatul Hayati
I Nyoman Wahyu Widiana
Misbahul Munir
Fathimah Kurniawati
Yuyun Anggraini
Yulia Nurendah**



GET PRESS INDONESIA

EKONOMI INTERNASIONAL

Penulis :

Roy Budiharjo
Ike Susanti
Paulus Laratmase
Tri Wahyu Rejekiningsih
Banatul Hayati
I Nyoman Wahyu Widiani
Misbahul Munir
Fathimah Kurniawati
Yuyun Anggraini
Yulia Nurendah

ISBN : 978-623-125-197-8

Editor : Ari Yanto., M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tengah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi Internasional ini.

Buku Ini Membahas Ruang Lingkup Ekonomi Internasional, Konsep Teori Perdagangan Internasional, Teori Pra Klasik Perdagangan Internasional, Teori Klasik Perdagangan Internasional, Teori Modern Perdagangan Internasional, Kebijakan Tarif Dan Non Tarif, Kartel Internasional Dan Diskriminasi Harga, Sistem Kurs Valuta Asing, Neraca Pembayaran Internasional, Model Ekonomi Terbuka, Tantangan Dalam Bisnis Internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 RUANG LINGKUP EKONOMI INTERNASIONAL.1	
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Internasional	2
1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional.....	4
1.4 Pengaruh Ekonomi Internasional terhadap Perekonomian Nasional	9
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 KONSEP TEORI BISNIS INTERNASIONAL.....	13
2.1 Pengertian Teori Bisnis Internasional	13
2.2 Teori Ekonomi Merkantilisme	14
2.3 Teori Keunggulan Absolute.....	14
2.4 Teori Keunggulan Komparatife	14
2.5 Teori Heckscher-Olin (H-O)	15
2.6 Teori Permintaan Timbal Balik atau <i>Reciprocal Demand</i>	15
2.7 Teori Mazhab Neo Klasik	15
2.8 Faktor Pendorong Dari Bisnis Internasional.....	15
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB 3 TEORI PRA KLASIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	19
3.1 Pendahuluan	19
3.2 Sejarah Lahirnya Teori Pra Klasik Perdagangan Internasional	20
3.3 Eksplorasi Teori Pra Klasik dalam Perdagangan Internasional	23
3.4 Kebijakan Perdagangan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Praklasik.	34
3.5 Relevansi teori praklasik dalam konteks ekonomi global saat ini.	36
3.6 Penutup.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB 4 TEORI KLASIK PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL	43
4.1 Pendahuluan	43
4.2 Teori Klasik Perdagangan Internasional.....	44
4.2.1 Keunggulan Mutlak (<i>Absolute Advantage</i>).....	45
4.2.2 Keunggulan Komparatif (<i>Comparative Advantage</i>)	48
4.2.3 Perbandingan Keunggulan Dengan Banyak Barang (<i>Comparative Advantage with Many Goods</i>).....	53
4.3 Kesimpulan.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BAB 5 TEORI PERDAGANGAN MODERN.....	59
5.1 Pendahuluan	59
5.2 Keuntungan Perdagangan Internasional	60
5.3 Teori Perdagangan Heckser Ohlin (Teori H-O)	62
5.4 Teori Vent for surplus	68
5.5 Teori Paradoks Leontif.....	70
5.6 Teori Keunggulan Kompetitif.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 6 KEBIJAKAN TARIF DAN NON TARIF	73
6.1 Konsep Kebijakan.....	73
6.2 Konsep Kebijakan Tarif.....	74
6.3 Konsep Kebijakan Non Tarif	75
6.4 Manfaat Kebijakan Tarif dan non Tarif.....	77
6.5 Implementasi Kebijakan Tarif dan non Tarif di Indonesia	78
6.6 Dampak Kebijakan Tarif dan non Tarif	80
6.7 Hambatan Kebijakan Tarif dan non Tarif	85
DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 7 KARTEL INTERNASIONAL DAN	
DISKRIMINASI HARGA	91
7.1 Konsep Kartel Internasional.....	91
7.2 Bentuk-bentuk Kartel	95
7.3 Konsep Diskriminasi Harga.....	98
7.3 Manfaat Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga.....	101

7.4 Implementasi Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga.....	103
7.5 Dampak Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga.....	106
7.6 Permasalahan Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
BAB 8 SISTEM KURS VALUTA ASING.....	113
8.1 Pengenalan Sistem Kurs Valuta Asing.....	113
8.2 Jenis-Jenis Sistem Kurs Valuta Asing.....	115
8.3 Implikasi Sistem Kurs Valuta Asing terhadap Ekonomi Negara	117
8.4 Peran Bank Sentral dalam Mengelola Sistem Kurs Valuta Asing.....	119
8.5 Tantangan dalam Sistem Kurs Valuta Asing.....	120
8.6 Penutup.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BAB 9 NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL.....	125
9.1 Pendahuluan	125
9.2 Pengertian Neraca Pembayaran.....	125
9.3 Struktur Neraca Pembayaran Internasional	127
9.4 Keseimbangan Neraca Pembayaran	132
9.5 Neraca Pembayaran Indonesia	134
9.6 Neraca Pembayaran dan Pertumbuhan Ekonomi..	136
9.7 Kesimpulan.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BAB 10 MODEL EKONOMI TERBUKA.....	139
10.1 Konsep Dasar Model Ekonomi Terbuka	139
10.2 Perbedaan Model Ekonomi Tertutup dan Model Ekonomi Terbuka	144
10.3 Model Mundell – Fleming.....	146
10.3.1 Persamaan Model IS dalam perekonomian terbuka.....	147
10.3.2 Persamaan Model LM pada perekonomian terbuka.....	148
10.3.3 Persamaan Model Mundel – Fleming.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	150

BAB 11 TANTANGAN DALAM BISNIS

INTERNASIONAL 151

 11.1 Pendahuluan..... 151

 11.2 Pengertian Bisnis Internasional..... 151

 11.3 Perbedaan Bisnis Internasional dan Perdagangan
 Internasional 153

 11.4 Jenis-Jenis Bisnis Internasional..... 154

 11.5 Tantangan Bisnis Internasional 156

 DAFTAR PUSTAKA 162

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Spesialisasi Perdagangan di Negaara Kurang Berkembang	66
Gambar 5.2. Spesialisasi Perdagangan di Negara –negara di Dunia	67
Gambar 5.3. Vent for surplus	68
Gambar 6.1. Dampak pemberlakuan pajak ekspor	83
Gambar 9.1. Neraca Pembayaran Indonesia 2023 (juta USD)	136

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Keunggulan komparatif	28
Tabel 3.2. Spesialisasi.....	31
Tabel 4.1. Contoh Keunggulan Mutlak.....	46
Tabel 4.2. Keuntungan Output Dari Perdagangan Dengan Keunggulan Absolut	48
Tabel 4.3. Contoh Keunggulan Komparatif.....	49
Tabel 4.4. Keuntungan Output Dari Perdagangan Dengan Keunggulan Komparatif.....	50
Tabel 4.5. Rasio Pertukaran Domestik Di Portugal dan Inggris.....	51
Tabel 6.1. Dampak kebijakan pemberlakuan pajak ekspor terhadap kesejahteraan masyarakat di negara pengekspor dan pengimpor.....	83
Tabel 9.1. Struktur Neraca Pembayaran	128
Tabel 9.3. Transaksi Modal dan Keuangan	131

BAB 1

RUANG LINGKUP EKONOMI INTERNASIONAL

Oleh Roy Budiharjo

1.1 Pendahuluan

Beberapa aspek ekonomi internasional termasuk hubungan antara barang yang diimport dan dieksport, kurs mata uang asing tertentu, dan berbagai jenis jasa yang muncul sebagai hasil dari hubungan internasional. Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan dan konsekuensi penting bagi negara-negara yang bersangkutan.

Ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk kerja sama, bantuan antara negara, atau prosesnya. Penyebab, keuntungan, dan akibat dari ekonomi internasional diperdebatkan, dan teori-teorinya dapat memecahkannya.

Persoalan ekonomi internasional dapatlah dikatakan muncul sesudah perang dunia pertama. Sesudah berakhirnya perang dunia pertama banyaklah negara-negara yang mengurangi jumlah impornya dengan alasan-alasan untuk mengurangi pengangguran dan melindungi industri-industri dalam negeri yang sedang tumbuh sehabis perang. Akibat pengurangan import yang demikian kerasnya (severe) maka volume perdagangan internasional menjadi sangat berkurang daripada sebelum terjadinya perang besar tersebut, dan depresi pun meluas. Sesudah tahun 1933 volume perdagangan internasional meningkat lagi, walaupun tidak setinggi jumlah-jumlah yang pernah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya.

Persoalan-persoalan lain yang timbul sesudah perang dunia tahun 1914-1918 itu adalah berubahnya posisi-posisi negara-negara besar dalam dunia perekonomian, seperti Amerika, Rusia, Inggris, dan lain-lain. Amerika Serikat jelas beruntung karena perang. Bila sebelum perang negara ini dapat dimasukkan sebagai negara debitur, namun sesudah perang

berubah posisinya menjadi negara kreditur. Terlebih lagi sesudah perang dunia yang kedua (1939-1945) potensi ekonomi Amerika Serikat sangat menonjol, tidak saja dalam lapangan ekonomi, tetapi juga dalam lapangan-lapangan politik, sehingga Amerika Serikat senantiasa aktif dalam persoalan-persoalan internasional economic corporation dan juga dalam masalah-masalah perdamaian dunia. Demikian pula halnya Rusia (USSR). Sebelum perang masih digolongkan Negara yang lemah, tetapi sesudah perang keluar sebagai negara yang besar pengaruhnya disamping Amerika Serikat.

Lain halnya dengan Inggris, dibandingkan dengan tahun-tahun menjelang perang besar, sesudah berakhirnya perang-perang besar (perang dunia) itu maka peranannya dalam politik dan perkonomian Nampak menurun. Dalam abad ke 19, Inggris merupakan atau dipandang sebagai Dewi Pujaan (Mistress) bagi dunia Barat. Inggrislah negara pertama yang keluar sebagai negara yang menganut sistim merkantilisme dengan pemerintahan dan angkatan laut yang kuat, dan institusi perekonomiannya yang telah matang, seperti national banking, dan national taxation, Dengan angkatan laut yang kuat Inggris dapat mengexport modalnya ke seluruh pelosok dunia, sehingga Inggris dapat menanamkan pengaruhnya dalam internasional economic and political fairs, menjelang perang dunia pertama, lebih-lebih sesudah perang tersebut selesai, Inggris mulai kehilangan pengaruhnya. Ini antara lain karena timbulnya industrilisasi di negara-negara lain, karena timbulnya industrilisasi di Negara-negara lain, sehingga makin menjadi sangatlah situasi internasional competition, baik dalam persoalan ekonomi maupun dalam persoalan-persoalan politik.

1.2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Internasional

Berikut ini adalah beberapa perkembangan dalam pemikiran tentang masalah ekonomi internasional:

1. Merkantilisme

Teori-teori perdagangan internasional yang sangat berkembang dari kaum Merkantilisme. Sampai saat ini, sekalian teori itu masih dapat diterima dan

dipertimbangkan. Ialah bahwa ekspor harus melebihi import jika kita ingin pembangunan ekonomi dan dasar ekonomi bangsa berkembang.

Sebelum revolusi industri, ada masa Merkantilisme. Teori mereka adalah berbeda dalam masalah pokoknya, misalnya Karl Marx menitik beratkan soal upah A. Marshall soal pasaran sedangkan kaum physiokrat mengenai tanah dan tenaga. Pada dasarnya, mercantilisme adalah politik untuk kemakmuran negara yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara daripada kemakmuran individu. Jadi, kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan pribadi. Setiap tindakan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan ekspor dibandingkan import atau neraca perdagangan yang aktif.

Dalam sejarah, perkembangan merkantilisme ini sejalan dengan perkembangan negara-negara Eropa yang baru berdiri. Tujuan Negara Merkantilisme adalah untuk memperkuat perekonomian dan angkatan perangnya. Untuk melakukannya, emas adalah uang yang diperlukan. Karena banyak Negara Eropa pada saat itu tidak memiliki tambang emas, satu-satunya jalan keluar adalah berdagang dengan luar negeri dan memastikan bahwa jumlah barang yang diekspor ke negara lain (terlihat seperti perdagangan aktif). maksudnya ialah untuk membayar lebih banyak ekspor daripada import dengan emas yang dapat ditukar.

2. Klasik

Dalam bukunya yang terkenal, "The Wealth of Nations", yang diterbitkan pada tahun 1776, Adam Smith menekankan betapa pentingnya kebebasan ekonomi setiap orang, termasuk kebebasan untuk berusaha dan berdagang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, sesuai dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam masyarakatnya. sehingga setiap individu, baik pengusaha maupun individu lainnya, dapat dengan bebas berusaha untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan bakat dan keadaan masyarakatnya. Menurut Adam Smith (Klasik), ekonomi harus berkembang secara bebas dengan hukum-

hukumnya sendiri, dan pemerintah harus menghindari intervensi dalam ekonomi domestik dan internasional. Mekanisme harga juga mengaturnya. Industri mana yang terpaksa tutup karena hasilnya tidak laku atau tidak laku, dan barang mana yang laku?

Suatu negara hanya dapat memproduksi sesuatu jika biaya produksinya lebih rendah dari luar negeri. Oleh karena itu, jika sebuah produk dapat diimport dari luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dari biaya produksi dalam negeri, industri dalam negeri yang menghasilkan produk tersebut harus ditutup. Dengan demikian, tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan keterampilan produksi domestik. Dalam hal ini, spesialisasi berarti bahwa setiap negara harus menghasilkan produk dengan biaya serendah-serendahnya dan hasil produksinya harus dibandingkan dengan produk yang diproduksi di negara lain. Oleh karena itu, merkantilisme mendukung anarkhi, yang berarti negara harus dapat berdiri sendiri, sedangkan A. Smith mendukung kebebasan individu dan spesialisasi. Produksi domestik harus dapat memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam upaya untuk mengkritik praktik kaum Merkantil yang hampir tiga atau empat abad lamanya mengendalikan perekonomian negara-negara besar di Eropa, Adam Smith sendiri menulis hasil pemikirannya dalam buku tersebut. Banyak peraturan yang berfokus pada kekayaan dan kemakmuran negara mengontrol kehidupan ekonomi. Periode Merkantilisme adalah awal kaum borjuis.

1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional

Ilmu ekonomi internasional pada dasarnya adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antara negara-negara atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan ekonomi internasional. Sebagai cabang dari bidang ini, ilmu ekonomi internasional juga mempelajari hubungan antara ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal

kecil dan umum seperti penentuan harga pokok dan alokasi sumber daya, dan ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang lebih besar dan lebih kompleks seperti penentuan harga pokok.

Ilmu ekonomi internasional menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara negara. Ilmuwan ekonomi internasional mempelajari bagian teori ekonomi yang belum dipelajari secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana ilmu ekonomi mikro dan makro berinteraksi satu sama lain. Selain itu, mereka melihat bagaimana teori ekonomi digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan tradisi klasik, materi ilmu ekonomi internasional dapat dibagi menjadi dua kategori: teori perdagangan internasional murni dan teori penyesuaian monter.

Kebijakan ekonomi internasional berbeda dari kebijakan ekonomi nasional karena ilmu ekonomi internasional mempelajari hal-hal selain teori, seperti kebijakan. Akibatnya, ilmu ekonomi internasional lebih luas daripada cabang ilmu ekonomi lainnya yang bersifat terapan, atau *applied economics*.

Teori perdagangan internasional (atau perdagangan internasional) pada dasarnya didasarkan pada gagasan klasik bahwa ada kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan keluwesan harga dalam setiap situasi, sehingga kesempatan kerja penuh itu selalu dapat dicapai secara otomatis jika terjadi gangguan pada keadaan keseimbangan saat ini. Pada dasarnya, buang tidak memiliki arti yang signifikan di sini karena ajaran klasik mengatakan bahwa ada persetujuan yang jelas antara sektor riil yang menggunakan besar-besaran nominal (dikotomi klasik dan netralitas uang). Namun, ini tidak benar sepenuhnya. Analisa keseimbangan parsial dan, sejauh mungkin, analisis keseimbangan general digunakan untuk menjelaskan teori perdagangan internasional.

Terdapat dua kelompok tambahan masalah dalam lingkungan ekonomi normative dan lingkungan ekonomi positif. Masalah-masalah dalam lingkungan ekonomi positif berkaitan dengan prediksi apa yang telah dan akan terjadi karena tindakan atau peristiwa tertentu. Misalnya, jika pemerintah mengenakan tarif *ad valorem*, apa yang akan terjadi dengan

dasar tukar internasional (*terms of trade*)? Tarif mana yang akan menghasilkan pendapatan tertinggi bagi pemerintah tertentu? Apa yang menentukan struktur, jalan, dan volume perdagangan internasional? Dan sebagainya.

Karena itu, penyelesaian masalah-masalah ini biasanya dilakukan dengan menggunakan model atau analisis keseimbangan parsial atau general. Pada dasarnya, semua hukum-hukumnya, atau proposisinya, dapat diuji dengan fakta-fakta saat ini. Masalah ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) adalah masalah yang muncul dalam lingkungan ekonomi normative. Karena itu, masalah-masalah ini berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan atau diinginkan akan terjadi sebagai hasil dari tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi, sementara ekonomi positif melihat apa yang mungkin atau dapat terjadi terlepas dari pertimbangan subyektif, ekonomi normative melihat apa yang seharusnya terjadi karena tindakan kebijakan pemerintah dirancang sedemikian rupa sehingga apa yang mungkin terjadi tidak akan terjadi. Tentu saja, dalam situasi tertentu di mana hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai karena masalah kelembangan, hasil terbaik kedua—juga dikenal sebagai hasil terbaik kedua—dapat ditawarkan.

Ilmu ekonomi internasional sudah banyak berjasa dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan analisis terbaik kedua ini. Misalnya, Samuelson mengemukakan teori "manfaat yang diperoleh dari perdagangan (*gains from trade*)", yang menyatakan bahwa dalam keadaan persaingan sempurna, perdagangan bebas akan memungkinkan untuk mencapai faedah yang paling besar, sehingga perdagangan secara keseluruhan harus dilihat dari faedah ini. Namun, umumnya, distorsi sistem ekonomi selalu terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga perdagangan bebas tidak dapat mencapai kebijakan optimal terbaik pertama.

Ilmuwan ekonomi internasional menyelidiki bagaimana ilmu ekonomi mikro dan makro berinteraksi dengan satu sama lain dengan mempelajari elemen ekonomi dan studi pembangunan yang belum dipelajari secara menyeluruh. Selain itu, mereka mempelajari bagaimana teori ekonomi dapat

diterapkan pada hubungan ekonomi internasional. Oleh karena itu, ide-ide dalam ilmu ekonomi internasional didasarkan pada konsep-konsep klasik. Ide-ide ini dibagi menjadi dua kelompok: satu yang mencakup teori-teori murni tentang perdagangan internasional, yang kemudian diterapkan pada setiap kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan masalah perdagangan internasional, dan lainnya yang mencakup teori-teori penyesuaian moneter dengan kebijakan ekonomi yang berkaitan langsung dengan masalah ini.

Pengertian ilmu ekonomi pada umumnya sama dengan pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional mempelajari masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar negara, sementara ilmu ekonomi umum mempelajari masalah yang berkaitan dengan satu negara atau ekonomi tertutup. Oleh karena itu, ilmu ekonomi internasional lebih umum dibandingkan dengan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi yang tertutup karena hanya ada satu negara yang saling berhubungan. Kecuali itu, studi ilmu ekonomi adalah langkah kecil, tetapi sangat penting, untuk mempelajari perilaku ekonomi yang sebenarnya karena ekonomi global sekarang lebih terbuka.

Ekonomi adalah bidang yang mempelajari hubungan ekonomi antara negara dan daerah. Berikut adalah beberapa perbedaan nyata antara kedua bidang ini:

1. Variasi dalam mata uang yang digunakan, meskipun sebenarnya semakin sempitnya dunia ini, semakin banyak mata uang yang dapat ditukar seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, Yen, dan Jepang, antara lain.
2. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi
3. Tingkat mobilitas sumber daya yang digunakan, yang mencakup tanah, sumber daya alam lainnya, tenaga kerja, dan modal. Sumber daya tanah di seluruh negara juga tidak dapat digerakkan, meskipun tanah jelas tidak dapat digerakkan.

Hubungan ekonomi antara daerah dan antar bangsa (inter-regional dan internasional) terjadi karena permintaan

dan penawaran barang di negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan permintaan dan penawaran barang ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi negara yang satu dengan negara lain, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun komposisi. Faktor-faktor berikut dapat dianggap sebagai penyebab utama munculnya hubungan ekonomi dan perdagangan antar daerah dan antar negara:

1. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan (*Scarcity*)

Kebutuhan manusia tidak terbatas dalam jenis dan jumlah. Kebiasaan masyarakat tidak statis, tetapi tidak. Selain itu, ekonomi adalah ilmu pengetahuan karena selalu ada kekurangan relatif dalam masyarakat. Ini adalah dasar ilmu ekonomi, dan dasar tindakan ekonomi adalah memilih antara berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Kemungkinan-kemungkinan itu adalah opsi. Dengan kata lain, menghubungkan antara scarcity relatif dengan permintaan adalah dasar dari tindakan ekonomis.

Prinsip ini pun berlaku pada kedua macam perdagangan tersebut di atas. Apabila sesuatu daerah atau Negara, tingkat scarcitynya lebih rendah daripada Negara lain, maka dari daerah ini akan mengalir barang-barang ke daerah lain di mana scarcitynya lebih tinggi. Selama masih terdapat perbedaan scarcity diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain, selama itu pula akan timbul hubungan ekonomi dari daerah yang kurang langka, ke daerah yang lebih langka.

2. Perbedaan faktor produksi

Perbedaan dalam faktor produksi akan menyebabkan perbedaan dalam tingkat produktivitas yang mungkin dicapai di antara daerah-daerah yang memiliki surplus dan daerah yang memiliki minus.

3. Perbedaan komparatif dari harga barang

Ketika ada perbedaan komparatif antara harga barang dan harganya, arus ekonomi akan mengalir antar daerah. Perbedaan harga komparatif, juga dikenal sebagai perbedaan harga yang diperbandingkan, adalah perbandingan harga barang A dan B di negara tertentu dibandingkan dengan harga barang A dan B di negara lain.

Dari pengertian dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa studi ekonomi internasional mencakup hal-hal berikut:

1. Teori dan kebijakan perdagangan internasional (*Internasional trade theory and policy*)
2. Teori dan kebijakan keuangan/moneter internasional (*International finance/monetary theory and policy*)
3. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional (*Internasional economic organization and cooperation*)
4. Perusahaan multinasional dan bisnis internasional (*multinational corporation and international business*).

Beberapa asumsi dasar berikut akan selalu digunakan ketika melakukan analisis teori perdagangan internasional:

1. Neutralitas uang, yang berarti uang tidak memengaruhi harga relative;
2. Jumlah faktor produksi masing-masing negara tetap
3. Faktor produksi secara internasional tidak dapat berpindah (*International immobility of factors*)
4. Teknologi yang tersedia sama
5. rasa dan distribusi pendapatan dianggap sebagai sesuatu yang diberikan dan tidak dapat berubah,
6. Biaya transportasi, informasi, dan komunikasi tidak merupakan hambatan perdagangan atau hambatan perdagangan, dan
7. Faktor produksi secara penuh dipekerjakan, sehingga tidak ada surplus atau kekurangan barang.

1.4 Pengaruh Ekonomi Internasional terhadap Perekonomian Nasional

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, orang dengan ide, bakat, IPTEK, dan barang dan jasa yang dihasilkan dapat dengan mudah melintasi batas negara. Pergerakan yang relatif bebas dari manusia, barang, dan jasa yang dihasilkan ini ternyata telah menciptakan hubungan dan ketergantungan yang lebih luas, yang pada gilirannya menghasilkan persaingan global yang semakin ketat.

Hampir semua aspek kehidupan suatu negara dipengaruhi oleh ekonomi internasional karena ketergantungan dan persaingan yang ada di seluruh dunia. Tidak ada lagi negara autarki, yaitu negara yang hidup terisolasi dan tidak memiliki hubungan ekonomi, keuangan, atau perdagangan internasional (ekspor dan impor), menurut Hamdy (2004), di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Secara teoritis, keseimbangan ekonomi nasional sebuah negara dapat digambarkan sebagai keseimbangan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan ($\text{supply total} = St$) dan jumlah barang dan jasa yang diminta ($\text{demand total} = Dt$).

Supply total (St) terdiri dari supply domestik (DN) atau produk domestik (Pd) ditambah supply impor (LN) atau impor (M). Di sisi lain, permintaan total (Dt) terdiri dari konsumsi domestik atau konsumsi domestik (Cd) ditambah permintaan ekspor (X). Impor (M) sebagai supply dan ekspor (X) sebagai demand internasional menunjukkan bahwa ekonomi internasional sangat memengaruhi keseimbangan ekonomi nasional suatu negara. Secara teoritis, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran ($\text{expenditure approach}$) dapat dirumuskan sebagai berikut, menurut Hamdy (2004):

$$GNP = Y = C + I + G + (X - M) \text{ atau}$$

$$GNP = Y = C + I + G + (Z - J)$$

Dalam hal ini:

GNP = Gross National Product

Y = Income = Pendapatan Nasional

C = Consumption = Konsumsi

I = Investment = Investasi

G = Government Expenditure = Pengeluaran Pemerintah

X = Z = Ekspor dan M = J = Impor

(X - M) atau (Z - J) = Komponen atau faktor luar negeri

1. Jika X-M lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari M. Ini menunjukkan saldo neto X yang positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri yang lebih besar.

2. Sebaliknya, jika $X-M$ lebih rendah dari 0, maka X lebih rendah dari M . Ini menunjukkan saldo neto X yang negatif atau posisi neraca perdagangan luar negeri yang lebih rendah, yang mengakibatkan penurunan Y (pendapatan) dan penurunan GNP.

Didasarkan pada rumus perhitungan pendapatan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu Negara semakin besar jika perubahan (XM) lebih besar. Suatu Negara dianggap memiliki ekonomi terbuka (*open economy*) jika total eksportir (X) lebih dari 10% dari PDB (Sumitro, 1982).

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal H. Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Erlangga, Jakarta.
- Hady. H., 2004, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Buku 1, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta.
- Hal Hill. 2001, *Ekonomi Indonesia*, Edisi kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi. M. M., 2003, *Manajemen Keuangan Internasional*", BPFE, Yogyakarta.
- Hendra Halwani, 2002, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 1995, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama dan STIE IBII, Jakarta.
- Lia Amalia, 2007, *Ekonomi Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nopirin, 1999, *Ekonomi Internasional*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, 2004, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, Jilid I, Indeks, Jakarta
- Salvatore, 1997, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Sobri, 1997, *Ekonomi Internasional, Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*, BPFE-UII, Yogyakarta
- Soelistyo, 1989, *Ekonomi Internasional: Teori Perdagangan Internasional*, Buku 1, Liberty, Yogyakarta
- Thulus TH. Tambunan, 2001, *Transformasi Ekonomi Di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yuliati. S. H., Prasetyo. H., 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Andi, Edisi II, Yogyakarta.

BAB 2

KONSEP TEORI BISNIS INTERNASIONAL

Oleh Ike Susanti

2.1 Pengertian Teori Bisnis Internasional

Bisnis Internasional merupakan sebuah aspek penting dibidang ekonomi bagi suatu negara, karena dengan ekonomi yang berkembang dengan baik maka negara tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Secara etimologis, bisnis mengacu pada segala jenis aktivitas yang melibatkan penjualan dan pembelian komoditas atau jasa di lokasi di mana kurva permintaan dan penawaran seimbang pada satu titik, yang dikenal sebagai titik keseimbangan. Sementara itu, internasional mungkin dipandang sebagai suatu dunia yang besar dan global, bukan suatu lokasi yang terbatas atau spesifik.

Maka bisnis internasional dapat diartikan suatu kegiatan dalam melakukan sebuah transaksi jual beli (dalam hal ini dilakukan oleh satu bangsa dengan bangsa lainnya yang berbentuk kegiatan ekspor dan impor) untuk memenuhi kebutuhan bangsa tersebut dan mencapai sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak.

Bisnis internasional, menurut M.Rafiqul Islam, tidak bisa dilepaskan dari uang. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Bisnis internasional menurut Lestari dan Setiawan merupakan kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh penduduk suatu bangsa dengan penduduk bangsa lain berdasarkan kesepakatan bersama.

Teori ekonomi merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori Heckscher-Olin (H-O) merupakan empat teori bisnis internasional yang paling banyak dipelajari.

2.2 Teori Ekonomi Merkantilisme

Menurut teori merkantil, kekayaan suatu bangsa diukur dengan emas dan perak. Gagasan ini menyatakan bahwa kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor harus dilakukan sesering mungkin supaya negara dapat tumbuh kuat dan sejahtera.

Merkantilisme bermanfaat bagi bangsa. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah yang menganut filosofi ini. Karena mereka menghabiskan sumber daya dengan biaya minimal.

Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia termasuk salah satu bangsa yang menjadi korban dari paham merkantilisme. Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, dan Perancis berperang merebut kepulauan Indonesia guna memperluas kekayaannya.

2.3 Teori Keunggulan Absolute

Adam Smith (1776) mengajukan hipotesis ini. Teori Absolut berpendapat bahwa seiring dengan meningkatnya kekayaan suatu bangsa, kemampuan dan efisiensi tenaga kerja di bidang produksi juga akan meningkat.

Adam Smith menyatakan bahwa suatu bangsa mempunyai keunggulan absolut jika bangsa tersebut mengkhususkan diri dalam memproduksi suatu komoditas. Dengan kata lain, komoditas yang dihasilkan harus berbeda dengan komoditas yang dihasilkan bangsa lain.

Namun paradigma ini hanya memperhatikan ketenagakerjaan dan mengabaikan aspek produksi lainnya.

2.4 Teori Keunggulan Komparatife

David Ricardo (1771) memelopori gagasan ini. Menurut gagasan ini, jika bisnis internasional dapat dilakukan, maka bisnis tersebut berasal dari suatu bangsa dan tidak mempunyai keunggulan absolut.

David Ricardo berpendapat bahwa bisnis internasional akan lebih sukses jika negara-negara memiliki keunggulan komparatif dalam hal harga.

2.5 Teori Heckscher-Olin (H-O)

Hal ini juga dikenal sebagai teori pabrik proporsional. Ide ini dikemukakan oleh Eli Heckscher, seorang sejarawan ekonomi Swedia, dan muridnya Bertil Olin. Menurut gagasan ini, negara-negara dengan faktor produksi yang murah akan berusaha mengeksport barang-barang khusus.

Jika suatu bangsa mempunyai input produksi yang langka dan biaya produksi yang tinggi, maka bangsa tersebut akan berusaha membeli dari bangsa lain.

2.6 Teori Permintaan Timbal Balik atau *Reciprocal Demand*

John Stuart Mill mengemukakan gagasan permintaan timbal balik, yang dibangun berdasarkan teori komparatif David Ricardo. J.S.Mill menyatakan dalam teori timbal balik ini bahwa ada titik keseimbangan dalam perniagaan komoditas yang terjadi antara dua negara, dengan perbandingan pertukaran yang dibangun atas dasar pertukaran domestik.

Teori J.S.Mill menekankan keseimbangan penawaran dan permintaan. Pasalnya permintaan dan penawaran merupakan elemen penentu yang dapat mempengaruhi jumlah komoditas yang akan diekspor atau diimpor suatu bangsa.

2.7 Teori Mazhab Neo Klasik

Teori dari aliran Neoklasik yang berbeda dengan gagasan bisnis internasional lainnya. Menurut gagasan ini, ilmu ekonomi dan teori tidak berfokus pada tenaga kerja atau biaya produksi. Namun, hal ini telah bergeser ke tingkat kepuasan atau penggunaan marjinal.

Salah satu pendekatan yang mengungkapkan teori ekonomi adalah teori aliran Neo-klasik. Dalam kaitannya dengan bisnis internasional, pemikiran aliran neoklasik mengubah teori dan metodologi yang telah ada sebelumnya.

2.8 Faktor Pendorong Dari Bisnis Internasional

Bisnis internasional dapat berkembang sebagai akibat dari sejumlah kekuatan pendorong yang menyebabkan

terjadinya kegiatan ekonomi antar bangsa yang berkolaborasi. Beberapa elemen pendorong dalam bisnis internasional adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu Negara

Elemen pertama yang menggerakkan bisnis internasional adalah sumber daya suatu bangsa, khususnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan komponen utama dalam pembuatan komoditas. Ketika suatu bangsa mempunyai sumber daya alam yang melimpah, maka bangsa tersebut dapat memproduksi barang-barang.

2. Adanya perbedaan faktor produksi

Untuk perbedaan dalam variabel produksi yang ada di antara negara-negara yang berkolaborasi. Perbedaan ini berkaitan dengan keefektifan waktu dalam memproduksi suatu komoditas.

Misalnya bangsa A bisa memproduksi beras dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga bangsa A dapat memesan beras dari bangsa B untuk memenuhi jumlah barang yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan konsumen di bangsa A.

3. Adanya kebutuhan dalam Negeri

Permintaan dalam negeri dapat memotivasi adanya bisnis internasional. Kebutuhan bisa berupa komoditas atau jasa yang tidak ada di suatu negara, sehingga terjadi bisnis internasional antar bangsa.

Misalnya, ketika suatu bangsa tidak memiliki suatu barang mereka akan memesan barang tersebut dari bangsa lainnya yang sudah melakukan kerja sama. Begitu juga dengan kebutuhan jasa, contohnya ketika Indonesia sering mengirimkan TKI atau TKW ke negara yang membutuhkan jasa dan sudah bekerja sama dengan bangsa Indonesia.

4. Keinginan untuk bekerja sama

Komponen bisnis internasional selanjutnya adalah keinginan suatu bangsa untuk berkolaborasi. Yang mana

dua negara atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum di negara yang telah berkolaborasi.

5. Adanya siklus ekonomi serta untuk perluasan jaringan

Bisnis internasional dapat merangsang siklus ekonomi antara dua bangsa yang bekerja sama, terutama pembeli dan penjual. Selain memperluas siklus ekonomi, negara-negara yang berkolaborasi akan mendapatkan keuntungan dari bisnis internasional berdasarkan ketentuan perjanjian antara kedua bangsa yang bekerja sama dalam bisnis internasional.

Apabila bisnis internasional dilakukan sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak bangsa, maka tentu akan memperluas jaringan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai negara-negara yang bekerja sama, dengan tujuan memperluas siklus ekonomi dan memperluas jaringan.

6. Adanya azas keunggulan komparatif

Kekuatan pendorong bisnis internasional yang terakhir adalah keunggulan komparatif, yang berarti setiap bangsa memiliki keunggulan unik. Ketika suatu bangsa mempunyai sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh bangsa lain, maka bangsa tersebut dikatakan memiliki supremasi. Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) adalah dua contohnya. Keunggulan suatu bangsa merupakan sumber kekayaan bagi bangsa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Pembangunan.
PT. Grindo,Pustaka:Jakarta
- Prof.Dr.Huala Adolf & Rabiansyah Pratama Suryawinata. Prinsip
Hukum Perdagangan Internasional: Gramedia, Jakarta
- Serlika Aprita & Rio Adhitya. Hukum Perdagangan
Internasional:RajaGrafindo Persada;Depok, Jawa Barat
- Setiawan,Heri.Lestari,Sari. 2011 Perdagangan Internasional.
Yogyakarta: Pustaka Nusantara

BAB 3

TEORI PRA KLASIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh Paulus Laratmase

3.1 Pendahuluan

Perdagangan internasional adalah salah satu fenomena ekonomi yang telah mengubah wajah dunia selama ribuan tahun. Dari jaman prasejarah hingga era globalisasi modern, perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan interaksi antar bangsa.

Perdagangan internasional telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Sebelum munculnya teori-teori klasik dalam ekonomi, terdapat pemikiran-pemikiran awal yang membentuk dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai teori pra-klasik perdagangan internasional. Pada periode ini, pemikir-pemikir awal mencoba untuk memahami dan menjelaskan fenomena perdagangan internasional tanpa menggunakan kerangka teoritis yang formal seperti yang dikembangkan dalam teori-teori klasik.

Teori pra-klasik tentang perdagangan internasional dapat ditelusuri ke periode awal perkembangan pemikiran ekonomi, terutama pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Pada masa ini, dunia sedang mengalami perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan sebagai akibat dari era penjelajahan dan penemuan baru. Sejumlah teori dan pandangan tentang perdagangan internasional muncul sebagai respons terhadap realitas zaman tersebut.

3.2 Sejarah Lahirnya Teori Pra Klasik Perdagangan Internasional

Sebelum menjelajahi lebih dalam tentang Teori Pra-Klasik Perdagangan Internasional, penting bagi kita untuk mengambil langkah mundur dan memahami konteks historis serta perkembangan awal perdagangan antarbangsa. Sejarah perdagangan internasional tidak hanya merupakan cerminan dari kebutuhan manusia akan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga cerminan dari evolusi budaya, teknologi, dan struktur sosial manusia.

Pertama-tama, di masa masyarakat awal, manusia mulai menyadari bahwa tidak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan mereka sendiri. Inilah yang mendorong mereka untuk memulai pertukaran barang dan jasa dengan individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Pada tahap ini, pertukaran ini sederhana, berfokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan peralatan. Namun, ini adalah langkah awal yang penting menuju terbentuknya sistem perdagangan yang lebih kompleks di masa depan.

Penting juga untuk melihat bagaimana perdagangan berkembang di antara peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, dan Yunani. Perdagangan di antara peradaban-peradaban ini tidak hanya mencakup pertukaran barang, tetapi juga penyebaran ide, budaya, dan teknologi. Ini membentuk dasar dari apa yang kemudian menjadi perdagangan internasional yang kita kenal hari ini.

Teori Praklasik dimana telah memperlihatkan kompleksitas dan keberagaman perdagangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni pertukaran dalam masyarakat awal yang berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan peralatan merujuk pada proses pertukaran barang dan jasa yang terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat primitif. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami;

Kebutuhan Dasar Manusia: Manusia memiliki kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan, seperti makanan untuk nutrisi, pakaian untuk

perlindungan dari cuaca, dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pertukaran sebagai Cara Memenuhi Kebutuhan: Dalam masyarakat awal, individu atau kelompok-kelompok akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pertukaran menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, seseorang yang memiliki kelebihan hasil pertanian dapat menukarnya dengan pakaian yang dibutuhkannya.

Sistem Pertukaran yang Sederhana: Pertukaran dalam masyarakat awal umumnya bersifat langsung dan sederhana. Individu atau kelompok-kelompok akan saling menukar barang atau jasa yang mereka miliki dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Contohnya, seorang pemburu dapat menukarkan hasil tangkapannya dengan hasil pertanian yang dibutuhkannya dari seorang petani.

Penentuan Nilai Tukar: Dalam pertukaran barang dan jasa, nilai tukar biasanya ditentukan berdasarkan pada kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing pihak yang terlibat. Misalnya, nilai tukar antara sejumlah buah apel dengan sepotong kain mungkin ditentukan berdasarkan pada kesepakatan antara pihak yang terlibat, serta penilaian subjektif tentang kegunaan dan keinginan.

Peran Komunitas dan Jaringan Sosial: Pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat awal seringkali juga didasarkan pada hubungan sosial antarindividu atau kelompok-kelompok dalam komunitas. Jaringan sosial seperti keluarga, teman, atau tetangga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran.

Analisis pertukaran dalam masyarakat awal yang berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia menyoroti bagaimana manusia secara intuitif mengembangkan sistem pertukaran untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta peran pentingnya dalam perkembangan awal perdagangan dan ekonomi.

Teori Pra-Klasik Perdagangan Internasional, pemahaman tentang yang telah disebutkan membentuk sebuah kerangka pikir yang integral. Pertama, manusia dalam masyarakat awal

mulai menyadari pentingnya pertukaran barang dan jasa sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan peralatan. Dengan melihat contoh perdagangan di antara peradaban kuno, seperti Mesir dan Sumeria, kita memahami bahwa pertukaran ini berkembang menjadi sistem perdagangan yang lebih terstruktur. Selanjutnya, perdagangan maritim dan jalur darat menjadi tulang punggung pertumbuhan perdagangan internasional, yang diperkuat oleh kemajuan teknologi transportasi dan navigasi.

Faktor geografis seperti lokasi dan kekayaan alam juga memainkan peran penting dalam membentuk pola perdagangan, sementara perkembangan kota-kota perdagangan menjadi titik pusat di mana pertukaran berlangsung. Melalui proses ini, pertukaran bukan hanya tentang barang, tetapi juga ide, budaya, dan nilai-nilai. Pertukaran budaya ini tidak hanya memperkaya masyarakat, tetapi juga membentuk fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai globalisasi.

Pemahaman tentang fenomena-fenomena ini, para pemikir awal seperti para filsuf Yunani kuno mulai merumuskan konsep-konsep yang menjadi cikal bakal bagi teori-teori perdagangan internasional. Mereka mengakui pentingnya pertukaran barang dan jasa dalam memengaruhi ekonomi dan masyarakat, dan secara bertahap membangun pemahaman yang lebih sistematis tentang hubungan perdagangan internasional. Inilah latar belakang di mana lahirnya Teori Pra-Klasik Perdagangan Internasional, yang menandai langkah awal dalam pengembangan teori-teori ekonomi internasional yang lebih lanjut. Dengan demikian, evolusi pemikiran tentang perdagangan internasional dapat ditelusuri kembali ke pengamatan awal tentang pertukaran dalam masyarakat prasejarah hingga perkembangan sistem perdagangan yang lebih kompleks di masa kuno.

3.3 Eksplorasi Teori Pra Klasik dalam Perdagangan Internasional

Pada tahap awal perkembangannya, perdagangan internasional merupakan cerminan dari interaksi antara berbagai komunitas manusia yang terpisah oleh geografi dan budaya. Pertukaran barang-barang penting seperti makanan, alat, dan bahan mentah antar komunitas menjadi dasar dari perdagangan ini. Meskipun belum ada teori formal yang menyertainya, perdagangan pada masa ini telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan budaya, teknologi, dan ekonomi masyarakat prasejarah.

Perdagangan internasional adalah fenomena yang telah memainkan peran sentral dalam perkembangan ekonomi global selama berabad-abad. Dengan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang semakin kompleks, perdagangan internasional telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan integrasi global. Namun, pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mengatur perdagangan internasional tidaklah statis; sebaliknya, ia terus berubah dan berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan dalam pemikiran ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi, dan dinamika politik global.

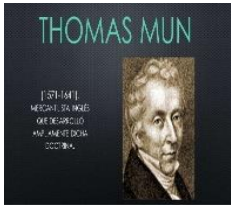
Teori pra-klasik perdagangan internasional merujuk pada pandangan ekonomi yang muncul sebelum pengembangan teori klasik perdagangan internasional yang terkenal, yang dipelopori oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lainnya. Ada beberapa kontributor penting dalam tahap awal pembentukan pemikiran perdagangan internasional sebelum era klasik, meskipun konsepnya tidak terorganisir dengan jelas seperti yang kita lihat dalam teori klasik.

Dalam memahami evolusi teori perdagangan internasional, kita harus melihat kembali ke masa lalu, ke era di mana pemikiran tentang perdagangan internasional pertama kali muncul. Salah satu era awal dalam sejarah perdagangan internasional adalah periode mercantilisme, yang mendominasi pemikiran tentang perdagangan dari abad ke-16 hingga ke-18. Mercantilisme didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan

suatu negara tergantung pada akumulasi kekayaan dalam bentuk emas dan perak. Negara-negara merkantilis mempromosikan ekspor dan membatasi impor sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan nasional. Tokoh-tokoh seperti Thomas Mun, Jean-Baptiste Colbert, dan David Hume adalah beberapa dari banyak pemikir yang mempengaruhi pandangan mercantilisme pada masa itu.

Teori pra-klasik perdagangan internasional mencakup perkembangan pemikiran ekonomi sebelum masa klasik. Meskipun tidak ada kerangka teoretis yang jelas seperti yang ada pada teori klasik yang kemudian muncul. Beberapa konsep dan pandangan penting telah berkontributor membentuk dasar bagi perkembangan pemikiran tentang perdagangan internasional, diantaranya adalah

Periode Awal: Mercantilisme (Abad ke-16 hingga Abad ke-18)



www.worldhistory.org

Sebelum munculnya teori klasik, pandangan-pandangan ekonomi awal cenderung didominasi oleh konsep mercantilisme. Pada periode ini (abad ke-16 hingga ke-18), negara-negara Eropa berusaha untuk meningkatkan kekayaan nasional dengan mengamalkan kebijakan proteksionisme, yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan menekan impor. Pada periode ini, pandangan dominan tentang perdagangan internasional adalah mercantilisme. Mercantilisme didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan suatu negara tergantung pada akumulasi kekayaan dalam bentuk emas dan perak. Negara-negara merkantilis mempromosikan ekspor dan membatasi impor sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan nasional. Tokoh-tokoh seperti Thomas Mun, seorang ekonomis dan pejabat keuangan Inggris, berkontribusi pada pengembangan pemikiran mercantilisme dengan karyanya yang berjudul "*England's Treasure by Forraign Trade*" pada tahun 1664.

Dominasi Konsep Mercantilisme; Mercantilisme adalah doktrin ekonomi yang mendominasi pemikiran ekonomi pada periode awal modern (abad ke-16 hingga ke-18). Pandangan ini menekankan pentingnya perdagangan internasional bagi

kemakmuran suatu negara, dengan fokus pada akumulasi kekayaan nasional.

Kebijakan Proteksionisme; Negara-negara Eropa menerapkan kebijakan proteksionisme yang diterapkan hampir sebagian besar negara-negara di Eropa saat ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Hal ini sering dilakukan melalui pengenaan tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan lainnya terhadap barang-barang impor. Tujuannya adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Meningkatkan Ekspor dan Menekan Impor; Fokus utama dari kebijakan ekonomi mercantilis adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan surplus perdagangan yang akan menghasilkan aliran masuk emas dan perak ke dalam negara, yang dipandang sebagai sumber kekayaan yang penting pada masa itu. Oleh karena itu, negara-negara mercantilis berusaha untuk memperluas perdagangan ekspor mereka dan membatasi ketergantungan terhadap impor.

Akumulasi Kekayaan Nasional; Mercantilisme menekankan pentingnya akumulasi kekayaan nasional, terutama dalam bentuk emas dan perak. Kekayaan diukur oleh jumlah emas dan perak yang dimiliki negara, dan kebijakan ekonomi dirancang untuk meningkatkan akumulasi logam mulia tersebut. Emas dan perak dipandang sebagai kekayaan yang krusial karena digunakan dalam perdagangan internasional dan dianggap sebagai cadangan moneter yang stabil.

Periode mercantilisme dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara Eropa pada masa itu. Misalnya, Inggris menerapkan kebijakan navigasi yang membatasi perdagangan koloni-koloni Amerika Utara dengan negara-negara lain dan mewajibkan penggunaan kapal Inggris untuk perdagangan antar koloni. Sementara itu, Prancis mengadopsi kebijakan proteksionisme melalui pendirian manufaktur negara dan peningkatan ekspor produk manufaktur. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip mercantilisme

yang mencari keunggulan ekonomi nasional melalui pengendalian perdagangan internasional.

Kontribusi Awal: Sebelum era klasik, beberapa pemikir telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman perdagangan internasional. Misalnya, penulis Yunani kuno Xenophon membahas konsep hukum kompensasi, yang menyatakan bahwa perdagangan yang merugikan salah satu pihak bisa menguntungkan kedua belah pihak jika barang-barang yang diperdagangkan memiliki nilai yang berbeda di negara mereka masing-masing. Beberapa konsep penting dari kontribusi awal, yakni;

Hukum Kompensasi: Konsep hukum kompensasi menyatakan bahwa perdagangan yang mungkin merugikan salah satu pihak dapat menguntungkan kedua belah pihak jika barang-barang yang diperdagangkan memiliki nilai yang berbeda di negara masing-masing. Dalam konteks ini, perdagangan internasional tidak



www.worldhistor

hanya tentang pertukaran barang, tetapi juga tentang eksploitasi perbedaan nilai antara negara-negara yang terlibat. Misalkan ada dua negara, A dan B, yang terlibat dalam perdagangan internasional. Negara A menghasilkan produk pertanian dengan biaya produksi yang rendah karena memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung. Di sisi lain, Negara B menghasilkan produk manufaktur dengan biaya produksi yang rendah karena memiliki teknologi dan tenaga kerja yang efisien. Dalam kasus ini, Negara A dapat mengekspor produk pertaniannya ke Negara B, yang dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi kedua negara. Meskipun Negara A mungkin memiliki keunggulan absolut dalam produksi pertanian, Negara B dapat mengimpor produk pertanian tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi dalam negeri. Sebaliknya, Negara B dapat mengekspor produk manufakturnya ke Negara A dengan harga yang lebih murah daripada biaya produksi di Negara A, sehingga kedua negara dapat saling menguntungkan melalui perdagangan internasional.

Dengan demikian, konsep hukum kompensasi yang dikemukakan oleh Xenophon dan pemikir lainnya menyoroti pentingnya memahami perbedaan nilai antara negara-negara dalam perdagangan internasional, serta potensi keuntungan bersama yang dapat dihasilkan melalui pertukaran barang-barang yang memiliki nilai relatif berbeda di pasar global.

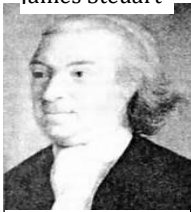
Pemikiran Awal tentang Keuntungan Komparatif:

Meskipun David Ricardo dikenal sebagai pencetus teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, konsep ini memiliki akar dalam pemikiran pra-klasik. Beberapa ekonom pra-klasik telah membahas hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan perdagangan internasional, meskipun belum ada kerangka teoretis yang sepenuhnya terorganisir seperti yang dikemukakan oleh Ricardo.

Hubungan antara Produktivitas Tenaga Kerja dan Perdagangan Internasional;

Beberapa ekonom pra-klasik telah memperhatikan bahwa negara-negara memiliki keunggulan relatif dalam produksi barang tertentu berdasarkan pada produktivitas tenaga kerja mereka. Mereka menyadari bahwa jika suatu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu barang daripada negara lain, maka akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut untuk fokus pada produksi barang tersebut dan melakukan perdagangan internasional untuk memperoleh barang lain yang mereka butuhkan.

James Steuart



pemikiran awal tentang keunggulan komparatif dapat ditemukan dalam karya-karya beberapa ekonom pra-klasik seperti James Steuart. Steuart, seorang ekonom Skotlandia pada abad ke-18, menekankan bahwa negara-negara dapat memiliki keunggulan absolut dalam produksi

www.worldhistory.org barang tertentu berdasarkan pada sumber daya alam, teknologi, atau keahlian tenaga kerja mereka.

Konsep keunggulan komparatif, yang kemudian dikembangkan secara mendalam oleh David Ricardo, telah muncul dalam pemikiran ekonom pra-klasik seperti James Steuart. Ini menunjukkan bahwa ide tentang keuntungan yang

dapat diperoleh dari perdagangan internasional tidaklah baru pada zaman klasik ekonomi, tetapi telah muncul sebelumnya dalam pemikiran beberapa ekonom sebelum Adam Smith dan David Ricardo.



Disadari bahwa jika suatu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu barang daripada negara lain, maka akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut untuk fokus pada produksi barang tersebut dan melakukan perdagangan internasional untuk memperoleh barang lain yang mereka butuhkan. Misalkan, kita mempertimbangkan dua negara: Negara A dan Negara B. Negara A memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung pertanian, sehingga lebih efisien dalam memproduksi gandum. Di sisi lain, Negara B memiliki sumber daya mineral yang kaya, sehingga lebih efisien dalam memproduksi besi. Meskipun Negara A mungkin bisa memproduksi baik gandum maupun besi, mereka memiliki keunggulan absolut dalam produksi gandum dibandingkan dengan Negara B karena kondisi alamnya yang mendukung pertanian.

Tabel 3.1. Keunggulan komparatif

Komponen	Negara A	Negara B
Barang yang Diproduksi	Gandum	Besi
Kekuatan Komparatif	Tinggi	Rendah
Sumber Daya Alam	Tanah subur dan iklim yang mendukung Pertanian	Kaya akan Sumber daya mineral
Teknologi	Tinggi	Rendah
Keahlian Tenaga Kerja	Tinggi	Rendah

Sumber. Dokumentasi 2024, data diolah

Pada Tabel 1 di atas, Negara A memiliki keunggulan absolut dalam produksi gandum karena memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung pertanian, teknologi pertanian yang maju, dan keahlian tenaga kerja yang tinggi dalam bidang pertanian. Di sisi lain, Negara B memiliki keunggulan absolut dalam produksi besi karena memiliki sumber daya mineral yang kaya, meskipun mereka mungkin memiliki teknologi dan keahlian tenaga kerja yang lebih rendah dalam sektor pertanian.

Dengan demikian, sesuai dengan pemikiran James Steuart, kedua negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tertentu berdasarkan pada sumber daya alam, teknologi, atau keahlian tenaga kerja mereka, yang mendasari konsep awal tentang keunggulan komparatif.

Meskipun konsep keunggulan komparatif belum terbentuk secara lengkap dalam perdagangan internasional pada masa pra-klasik, pemikiran tentang hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan perdagangan internasional telah memberikan fondasi bagi pengembangan teori-teori yang lebih lanjut, termasuk teori yang dikemukakan oleh David Ricardo.

Pemikiran Tentang Spesialisasi;

Beberapa pemikir pra-klasik juga menyadari manfaat spesialisasi dalam perdagangan internasional. Mereka menyadari bahwa spesialisasi produksi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga memberikan dasar bagi perdagangan internasional yang saling menguntungkan.

Manfaat Spesialisasi;

Konsep spesialisasi produksi menyatakan bahwa jika suatu negara fokus pada produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah atau dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada negara lain, maka akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara jika mereka melakukan perdagangan internasional. Spesialisasi memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam produksi tertentu.

Efisiensi dan Produktivitas;

Dengan melakukan spesialisasi produksi, negara dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien sesuai

dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas karena fokus pada produksi barang atau jasa yang sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki negara tersebut.

Dasar pemikiran tentang spesialisasi dalam teori Pra Klasik dapat digambarkan sebagai berikut; misalkan Negara A dan Negara B masing-masing memiliki keunggulan komparatif dalam sektor produksi tertentu. Negara A memiliki keunggulan dalam pertanian karena memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung, sementara Negara B memiliki keunggulan dalam manufaktur karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan teknologi manufaktur yang canggih.

Apabila kedua Negara fokus pada sektor produksi utama mereka dan memanfaatkan keunggulan komparatif, keduanya dapat mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Ini berpotensi meningkatkan produksi masing-masing negara dengan biaya yang lebih rendah dan meningkatkan perdagangan internasional yang saling menguntungkan.

Demikian jika Negara A memiliki kondisi geografis yang mendukung pertanian yang subur, sementara Negara B memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk industri manufaktur; maka Negara A fokus pada produksi pertanian dan Negara B fokus pada produksi manufaktur, sehingga keduanya dapat mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam sektor masing-masing. Seandainya Negara A dapat menghasilkan gandum dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada Negara B karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung pertanian. Di sisi lain, Negara B dapat memproduksi barang manufaktur dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada Negara A karena memiliki sumber daya alam dan teknologi yang memadai untuk industri manufaktur. Dengan melakukan spesialisasi produksi dan melakukan perdagangan internasional, keduanya dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.2. Spesialisasi

Komparatif	Negara A	Negara B
Produksi Awal (sebelum spesialisasi)	-	-
Produksi Gandum (ton)	100	0
Produksi Barang Manufaktur (unit)	0	100
Biaya Produksi Awal (sebelum spesialisasi)	-	-
Biaya Produksi Gandum (\$)	\$50,000	-
Biaya Produksi Barang Manufaktur (\$)	-	\$50,000
Kemampuan Produksi Awal (sebelum spesialisasi)	-	-
Jam Kerja untuk Menghasilkan 1 Ton Gandum	200	-
Jam Kerja untuk Menghasilkan 1 Unit Barang Manufaktur	-	200
Spesialisasi dan Perdagangan	-	-
Produksi setelah Spesialisasi (setelah pertukaran)	-	-
Produksi Gandum (ton)	200	-
Produksi Barang Manufaktur (unit)	-	200
Keuntungan dari Pertukaran (surplus)	-	-
Keuntungan Bersih (\$)	\$50,000	\$50,000

Sumber. Dokumentasi 2024, data diolah

Berdasarkan kasus di atas, Negara A awalnya mampu memproduksi 100 ton gandum dengan biaya \$50,000 dan tidak memproduksi barang manufaktur. Sedangkan Negara B mampu memproduksi 100 unit barang manufaktur dengan biaya \$50,000 dan tidak memproduksi gandum. Namun, dengan spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Negara A memutuskan untuk fokus pada produksi gandum sementara Negara B fokus pada produksi barang manufaktur. Akibatnya, Negara A meningkatkan produksinya menjadi 200 ton dan Negara B meningkatkan produksinya barang manufakturnya

menjadi 200 unit. Keduanya kemudian melakukan pertukaran, di mana Negara A mengimpor 200 unit barang manufaktur dari Negara B dan Negara B mengimpor 200 ton gandum dari Negara A. Hasilnya, keduanya memperoleh keuntungan bersih masing-masing sebesar \$50,000, menunjukkan adanya keuntungan dari spesialisasi produksi dan perdagangan internasional.

Umumnya untuk menghitung keuntungan komparatif dalam perdagangan internasional dapat dijelaskan menggunakan teori biaya kesempatan. Dalam konteks ini, keuntungan komparatif muncul ketika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya kesempatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Misalkan terdapat dua negara (Negara A dan Negara B) dan dua barang (Barang X dan Barang Y). Biaya kesempatan adalah biaya yang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang dalam bentuk jumlah barang lain yang bisa diproduksi.

Secara umum formula untuk menghitung biaya kesempatan (opportunity cost) adalah:

$$\text{Biaya Kesempatan} = \frac{\text{Produksi Alternatif yang dikorbankan}}{\text{Produksi yang diperoleh!}}$$

Langkah-langkah Untuk menghitung keuntungan komparatif, adalah sebagai berikut:

1. Tentukan biaya kesempatan untuk masing-masing barang di masing-masing negara. Ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah barang alternatif yang bisa diproduksi dengan jumlah barang yang diproduksi.
2. Identifikasi barang mana yang memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah di suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Negara yang memiliki biaya kesempatan lebih rendah untuk suatu barang dianggap memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tersebut.
3. Hitung jumlah barang yang dapat diproduksi jika negara tersebut mengalokasikan semua sumber dayanya untuk produksi barang yang memungkinkan keuntungan komparatif.

4. Bandingkan jumlah barang yang diproduksi di bawah spesialisasi dengan jumlah barang yang diproduksi sebelum spesialisasi. Perbedaan antara jumlah barang yang diproduksi setelah spesialisasi dan sebelum spesialisasi merupakan keuntungan komparatif.
5. Perlu dicatat bahwa dalam penggunaan praktis, keuntungan komparatif sering kali diekspresikan dalam hal perbedaan persentase antara biaya kesempatan relatif antara dua barang di dua negara.
6. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan rumus ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan model ekonomi yang digunakan dalam analisis.

Dengan memahami kontribusi dari berbagai pemikir Praklasik, kita dapat melihat bahwa evolusi teori perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh satu tokoh atau satu periode waktu, tetapi merupakan hasil dari kontribusi berbagai pemikir dari berbagai latar belakang dan periode sejarah.

Adam Smith, sebagai salah satu tokoh ekonomi mazhab klasik, dikenal karena karyanya "*The Wealth of Nations*". Konsep keuntungan mutlak, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan jika setiap negara memproduksi barang yang mereka bisa hasilkan dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Smith secara kritis meninjau prinsip-prinsip mercantilisme dan mengusulkan pandangan baru tentang perdagangan internasional.

Smith mengembangkan pemikiran tersebut dalam konteks yang lebih luas, mendalam, dan sistematis. Dia menjelaskan konsep keuntungan mutlak dengan lebih rinci, menyoroti pentingnya spesialisasi produksi berdasarkan keuntungan mutlak sebagai dasar bagi perdagangan internasional yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, sementara konsep keuntungan mutlak bukanlah penciptaan Adam Smith, dia secara signifikan mengembangkannya dan mengaitkannya dengan sistem ekonomi pasar yang lebih luas dalam pemikiran ekonomi klasik.

Pemikiran Adam Smith kemudian diperluas oleh ekonom klasik lainnya, seperti David Ricardo. Pada abad ke-19, Ricardo

memperkenalkan konsep keuntungan komparatif, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan dua negara bahkan jika salah satunya memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Teori ini menyoroti pentingnya spesialisasi dalam perdagangan internasional dan memberikan landasan untuk pemahaman modern tentang perdagangan internasional.

Evolusi teori Praklasik dalam perdagangan internasional mencerminkan perjalanan panjang pemikiran ekonomi, dari masa di mana perdagangan internasional dilihat sebagai alat untuk akumulasi kekayaan nasional, hingga pemahaman yang lebih kompleks tentang manfaat dari spesialisasi dan perdagangan bebas. Meskipun kontribusi Adam Smith dan David Ricardo terkenal luas, penting untuk diingat bahwa evolusi teori Praklasik tidak terjadi secara independen; ini merupakan hasil dari kontribusi berbagai pemikir dari berbagai latar belakang dan periode waktu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi ini, kita dapat menghargai kompleksitas dan dinamika yang membentuk pandangan kita tentang perdagangan internasional dan bagaimana pandangan ini terus mempengaruhi kebijakan ekonomi dan dinamika global saat ini.

3.4 Kebijakan Perdagangan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Praklasik.

Pandangan perdagangan internasional sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Mercantilisme, yang mendominasi pemikiran ekonomi dari abad ke-16 hingga ke-18, meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip praklasik ini. Menurut pandangan mercantilis, kekayaan suatu negara diukur dengan jumlah logam mulia yang dimilikinya, khususnya emas dan perak. Oleh karena itu, para mercantilis percaya bahwa negara harus mengadopsi kebijakan yang mengarah pada akumulasi logam mulia dan menciptakan surplus perdagangan yang besar.

Prinsip-prinsip praklasik dalam perdagangan internasional mencakup beberapa strategi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mercantilis tersebut. Tarif proteksionis, yang mendorong produsen untuk memproduksi

lebih banyak barang untuk konsumsi dalam negeri dan membatasi impor barang dari luar negeri, adalah salah satu contoh kebijakan yang didasarkan pada prinsip ini. Selain itu, subsidi ekspor juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan aliran masuk valuta asing ke negara tersebut.

Kebijakan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip praklasik, mencakup;

Tarif Proteksionis

Pemerintah menerapkan tarif tinggi atau bea masuk untuk barang-barang impor guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor dan mendorong konsumsi produk domestik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kekayaan nasional dengan mempertahankan mata uang dan logam mulia.

Subsidi Ekspor

Pemerintah memberikan subsidi atau insentif kepada produsen untuk meningkatkan ekspor barang-barang tertentu. Dengan memberikan insentif seperti itu, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan aliran masuk valuta asing ke negara tersebut.

Monopoli Perdagangan

Pemerintah mengatur dan memonopoli perdagangan beberapa barang tertentu, terutama barang-barang yang dianggap strategis atau berharga, seperti rempah-rempah, sutra, atau logam mulia. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan suplai dan harga barang-barang tersebut, serta memastikan bahwa surplus perdagangan dan kekayaan nasional dikonservasi.

Peningkatan Produksi Dalam Negeri

Pemerintah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan produksi barang-barang dalam negeri dengan memberikan dukungan finansial, teknis, atau kebijakan lainnya kepada industri-industri tertentu. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, negara dapat mengurangi ketergantungannya pada impor dan meningkatkan surplus perdagangan.

Kebijakan-kebijakan perdagangan ini mencerminkan prinsip-prinsip praklasik yang menekankan pentingnya pembatasan impor, promosi ekspor, dan akumulasi kekayaan

nasional dalam bentuk logam mulia. Meskipun beberapa dari kebijakan ini mungkin memiliki manfaat singkat dalam memperkuat posisi ekonomi suatu negara, namun banyak ekonom modern memandangnya sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan efisiensi alokasi sumber daya.

Prinsip-prinsip praklasik dalam perdagangan internasional mencakup beberapa strategi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mercantilis tersebut. Tarif proteksionis, yang mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang untuk konsumsi dalam negeri dan membatasi impor barang dari luar negeri, adalah salah satu contoh kebijakan yang didasarkan pada prinsip ini. Selain itu, subsidi ekspor juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan aliran masuk valuta asing ke negara tersebut. Namun, prinsip-prinsip praklasik juga memiliki kelemahan dan kritik. Salah satu kritik utama terhadap pandangan mercantilisme adalah bahwa kebijakan proteksionis dan penekanan pada logam mulia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menghambat efisiensi alokasi sumber daya. Di samping itu, kebijakan-kebijakan ini juga dapat memicu retaliasi perdagangan dari negara-negara lain dan memicu konflik perdagangan internasional.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip praklasik dalam perdagangan internasional tetap menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi dan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemikiran ekonomi telah berkembang dari masa ke masa. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin terintegrasi, pemahaman akan prinsip-prinsip praklasik ini dapat membantu kita memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara dalam perdagangan internasional.

3.5 Relevansi teori praklasik dalam konteks ekonomi global saat ini.

Meskipun teori praklasik, terutama yang terkait dengan mercantilisme, memiliki akar sejarah yang kuat dan telah

menginspirasi pemikiran ekonomi selama berabad-abad, relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini sering kali diperdebatkan. Namun, beberapa konsep dasar dari prinsip-prinsip praklasik masih memiliki relevansi dalam ekonomi global modern, diantaranya;

1. *Proteksionisme vs. Liberalisme*

Perselisihan antara pendekatan proteksionisme dan liberalisme perdagangan masih menjadi perdebatan yang relevan dalam ekonomi global saat ini. Meskipun pandangan mercantilis yang menganjurkan proteksionisme telah banyak dikritik, namun beberapa negara masih menerapkan kebijakan proteksionis dalam upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan pekerja domestik dari persaingan asing.

2. *Keseimbangan Perdagangan*

Konsep keseimbangan perdagangan, yang merupakan inti dari pandangan mercantilis, tetap menjadi perhatian dalam ekonomi global saat ini. Banyak negara masih memperhatikan neraca perdagangan mereka dengan tujuan untuk mencapai surplus perdagangan atau setidaknya menjaga defisit perdagangan dalam batas-batas tertentu.

3. *Pentingnya Ekspor*

Prinsip-prinsip praklasik menggarisbawahi pentingnya meningkatkan ekspor sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara.

Dalam ekonomi global saat ini, negara-negara masih berusaha untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa mereka sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

4. *Proteksionisme Modern*

Meskipun pandangan mercantilis klasik telah banyak dikritik, bentuk-bentuk proteksionisme modern masih ada dalam berbagai kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan subsidi. Ini mencerminkan upaya beberapa negara untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan global yang meningkat.

Prinsip-prinsip praklasik masih memiliki relevansi, banyak dari mereka telah dikritik dan diubah dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi. Pemikiran ekonomi modern cenderung lebih condong kepada pendekatan liberalis dalam perdagangan internasional, yang menekankan pentingnya pembukaan pasar, pembebasan perdagangan, dan kerjasama ekonomi internasional.

3.6 Penutup

Pandangan akan Teori PraKlasik perdagangan internasional, kita telah memahami landasan pemikiran yang membentuk pandangan ekonomi pada masa itu. Dari perspektif para mercantilis hingga pemikiran Adam Smith dan David Ricardo, kita memahami bagaimana pandangan mereka tentang perdagangan internasional memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara pada waktu itu, serta relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini.

Para mercantilis, yang memegang keyakinan bahwa kekayaan suatu negara diukur dengan jumlah logam mulia yang dimilikinya, menekankan pentingnya pembatasan impor, promosi ekspor, dan akumulasi kekayaan nasional dalam bentuk logam mulia. Pandangan ini tercermin dalam kebijakan proteksionisme, monopoli perdagangan, dan strategi lain yang dirancang untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan internasional.

Namun, pandangan ini telah dikritik dan dipertanyakan seiring berjalannya waktu. Adam Smith, dengan karyanya yang terkenal "The Wealth of Nations", memperkenalkan pandangan liberalis baru yang menyoroti pentingnya persaingan bebas, spesialisasi produksi, dan keuntungan mutlak dalam perdagangan internasional. Smith menekankan bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara dan mengarah pada efisiensi alokasi sumber daya yang lebih baik.

David Ricardo, dalam kontribusinya yang monumental terhadap ekonomi politik, memperluas pandangan Smith dengan memperkenalkan konsep keuntungan komparatif.

Menurut Ricardo, negara-negara harus memproduksi dan mengekspor barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, bahkan jika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tersebut. Konsep ini membawa pemahaman perdagangan internasional ke tingkat yang lebih dalam dan menyoroti pentingnya spesialisasi produksi berdasarkan perbandingan relatif biaya produksi antar negara.

Dalam konteks ekonomi global saat ini, prinsip-prinsip praklasik masih memiliki relevansi dalam beberapa hal. Konsep spesialisasi produksi, keunggulan komparatif, dan perdagangan bebas masih menjadi dasar bagi banyak kebijakan perdagangan internasional. Namun, pandangan proteksionisme yang dipopulerkan oleh para mercantilis telah dikritik karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengganggu efisiensi pasar.

Kritik terhadap prinsip-prinsip praklasik ini, bersama dengan perubahan dalam kondisi ekonomi global, telah mempengaruhi evolusi pemikiran ekonomi internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan integrasi pasar, negara-negara semakin mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional. Meskipun demikian, tantangan dan konflik dalam perdagangan internasional masih ada, dan prinsip-prinsip praklasik dapat memberikan wawasan berharga dalam memahami kompleksitas dinamika perdagangan global.

Dalam mengevaluasi Teori PraKlasik perdagangan internasional, kita menyadari bahwa meskipun pandangan ekonomi telah berkembang dan berubah seiring waktu, prinsip-prinsip dasar yang diajukan oleh para mercantilis, Adam Smith, dan David Ricardo tetap menjadi pijakan penting dalam memahami perdagangan internasional. Dengan melihat ke belakang, kita dapat memahami bagaimana pemikiran ekonomi telah berkembang dari masa ke masa dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi global yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R., & Martin, P. (1999). Two waves of globalization: Superficial similarities, fundamental differences. CEPR Discussion Paper No. 2144. Retrieved from Centre for Economic Policy Research website: https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=2144
- Bhagwati, Jagdish N., & Srinivasan, T. N. (1983). "Lectures on International Trade." Cambridge: MIT Press.
- Cahyadi, N. (2018). Sejarah Awal Perdagangan Internasional: Tinjauan dari Perspektif Pra-Klasik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Feenstra, Robert C., & Taylor, Alan M. (2017). "International Economics." Worth Publishers.
- Heckscher, Eli F., & Ohlin, Bertil. (1991). "Heckscher-Ohlin Trade Theory." Cambridge: MIT Press.
- Irwin, D. A. (2002). Free trade under fire. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *American Economic Review*, 70(5), 950-959.
- Mun, T. (1664). England's Treasure by Forraign Trade. London: Printed by John Streater for Thomas Johnson at the Golden Key in St. Pauls Church-yard.
- Ohlin, Bertil. (1933). "Interregional and International Trade." Cambridge: Harvard University Press.
- Ricardo, David. (1817). "Principles of Political Economy and Taxation." London: John Murray.
- Siregar, Hermanto. (2010). "Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan." Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, H., & Hutasuht, M. (2015). Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia: Kajian Historis dan Konseptual. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(3), 285-302.

- Soelistijo, S. D. (2008). Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 36-50.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sutedjo, Bambang. (2009). "Sejarah Pemikiran Ekonomi: Dari Masa ke Masa." Jakarta: PT. Grasindo.
- Steuart, James. (1767). "An Inquiry into the Principles of Political Economy." Edinburgh: A. Kincaid & J. Bell.
- Tambunan, Tulus T.H. (2015). "Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar." Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjandraningsih, Indra. (2005). "Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Kasus." Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjojo, M. S. (2010). Perkembangan Teori Perdagangan Internasional: Dari Teori Klasik Hingga Modern. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 167-180.
- www.worldhistory.org. (2024). Internet akses; Maret 2024
- www.investopedia.com. (2024). Internet akses; Maret 2024

BAB 4

TEORI KLASIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh Tri Wahyu Rejekiningsih

4.1 Pendahuluan

Perdagangan barang dan jasa internasional serta arus modal internasional telah meningkat lebih cepat dibandingkan output selama beberapa dekade terakhir di dunia secara keseluruhan. Munculnya hambatan terhadap arus bebas barang, tenaga kerja, dan modal merupakan hal yang penting dalam studi perdagangan internasional.

Baik pers populer maupun majalah bisnis menampilkan peran perdagangan internasional dan investasi dalam perekonomian saat ini. Proses globalisasi menyebabkan semakin sedikit negara yang terisolasi atau tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia di luar negaranya. Perdagangan di seluruh dunia melanjutkan pola pertumbuhan pasca-Perang Dunia II yang lebih cepat dibandingkan output dunia.

Pola pertumbuhan yang diterapkan oleh negara-negara dalam perdagangan dunia, ada dua strategi yang dijalankan yaitu ekspor dan impor. Bagi negara-negara berkembang seperti Korea dan Malaysia yang dalam beberapa dekade terakhir mengandalkan pertumbuhan yang didorong oleh ekspor (***export-led growth***). Di sisi lain, sebelum tahun 1991 India telah menerapkan strategi impor substitusi (***import substitution***), yang tujuan menjadi swasembada dan menghindari ketergantungan pada beberapa ekspor primer. Apakah kedua strategi tersebut efektif melindungi perekonomian negara-negara tersebut dari perubahan besar? dalam hal kekayaan ekonomi, dan apakah hal ini memerlukan pengorbanan demi pesatnya pertumbuhan standar hidup masyarakatnya?

4.2 Teori Klasik Perdagangan Internasional

Gagasan yang dikemukakan oleh ekonom klasik Adam Smith dan David Ricardo 200 tahun yang lalu untuk mendukung bahwa ada keuntungan bersama dari perdagangan. Hal ini sangat kontras dengan pandangan merkantilistik yang berlaku bahwa ekspor memungkinkan suatu negara memperoleh keuntungan sementara impor justru berarti negara memperoleh kerugian.

Kerangka analisis kurva kemungkinan produksi dan kurva ketidakpedulian masyarakat yang kemudian digunakan oleh para ekonom dalam menunjukkan kesediaan suatu negara untuk berdagang dan potensi keuntungan dari perdagangan tersebut. Meskipun kerangka klasik mengasumsikan perbedaan produktivitas antar negara menyebabkan perbedaan biaya secara internasional dan menciptakan dasar perdagangan.

Negara-negara yang saling berdagang karena negara-negara ini mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Tentu saja ada motif-motif lain yang terlibat, namun motivasi dasar perdagangan internasional adalah untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan bagi para peserta perdagangan. Keuntungan dari perdagangan internasional, seperti halnya keuntungan dari semua perdagangan. Perdagangan muncul dikarenakan ada spesialisasi yang memungkinkan sumber daya dialokasikan untuk penggunaan yang paling produktif di setiap negara yang berdagang.

Telah disadari bahwa sangatlah bodoh jika sebuah kota atau provinsi mencoba untuk mencapai swasembada, namun seringkali gagal untuk menyadari bahwa manfaat dari spesialisasi dan pembagian kerja juga terdapat dalam perdagangan internasional. Batasan politik yang membagi wilayah geografis menjadi beberapa negara tidak mengubah sifat dasar perdagangan, juga tidak menghilangkan manfaat yang diberikan kepada mitra dagang. Untuk menetapkan dan mengilustrasikan kebenaran dasar ini, yang telah dikembangkan oleh para ekonom klasik pada akhir abad kedelapan belas dan kesembilan belas.

4.2.1 Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Pernyataan asli Adam Smith mengenai kasus perdagangan, yang dimuat dalam epiknya *The Wealth of Nations* (1776), dituangkan dalam istilah perbedaan biaya absolut antar negara. Smith berasumsi bahwa setiap negara dapat memproduksi satu atau lebih komoditas dengan biaya riil yang lebih rendah dibandingkan negara mitra dagangnya. Oleh karena itu, setiap negara akan mendapatkan keuntungan dari spesialisasi pada komoditas-komoditas yang mana negara tersebut mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*), yaitu dapat memproduksi dengan biaya riil yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kemudian negara akan mengekspor komoditas-komoditas tersebut dan mengimpor komoditas-komoditas lain yang diproduksi dengan biaya riil yang lebih tinggi dibandingkan negara lain.

“Biaya riil,” bagi Smith, berarti jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu komoditas. Analisis Smith didasarkan pada teori nilai kerja, yang memperlakukan tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi dan menyatakan bahwa komoditas saling bertukar satu sama lain sebanding dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk produksi. Misal: jika diperlukan 10 jam kerja untuk memproduksi sebuah kemeja, dan 40 jam untuk memproduksi sepasang sepatu, maka empat kemeja akan ditukar dengan sepasang sepatu. Kerja yang diwujudkan dalam empat baju sama dengan kerja yang diwujudkan dalam sepasang sepatu. Argumen ini berlaku untuk wilayah pasar tertentu di mana tenaga kerja dapat berpindah secara bebas dari satu industri ke industri lain dan dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam satu negara, persaingan untuk memastikan pertukaran komoditas di pasar sebanding dengan biaya tenaga kerja. Dalam contoh kemeja dan sepatu, tidak seorang pun akan memberikan lebih dari empat kemeja untuk sepasang sepatu karena hal itu memerlukan biaya lebih dari 40 jam kerja untuk mendapatkan sepasang sepatu. Seseorang dapat memperoleh sepasang sepatu secara langsung dengan menghabiskan 40 jam kerja. Tidak ada yang mau menerima kurang dari empat kemeja untuk sepasang sepatu karena alasan yang sama. Persaingan di

pasar, dan mobilitas tenaga kerja antar industri dalam suatu negara, menyebabkan terjadinya pertukaran barang sebanding dengan biaya tenaga kerja.

Namun karena keterbatasan hukum dan budaya, tenaga kerja tidak dapat berpindah secara bebas antar negara. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan analisis, ekonom klasik membuat asumsi bahwa tenaga kerja tidak dapat berpindah antar negara. Apabila kebutuhan tenaga kerja berbeda antar negara, maka tanpa adanya perdagangan, harga barang akan berbeda antar negara. Adam Smith mengabaikan cara mencapai harga keseimbangan di antara negara-negara yang berdagang. Adam Smith justru mendemonstrasikan proposisi bahwa suatu negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan dimana negara tersebut mengekspor komoditas yang dapat diproduksi dengan biaya riil lebih rendah dibandingkan negara lain, dan mengimpor komoditas yang diproduksi dengan biaya riil lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Tabel 4.1. Contoh Keunggulan Mutlak

Jumlah hari kerja oleh setiap pekerja untuk berproduksi	Negara	
	Italia	Skotlandia
Anggur (1 barel)	20	120
Kain (1 ikat)	100	30

Sumber: Dunn & Mutti, 2000.

Tabel 4.1 membantu mengilustrasikan kasus perbedaan biaya absolut. Misalkan, di Skotlandia diperlukan waktu 30 hari untuk memproduksi satu ikat kain dan 120 hari untuk memproduksi satu barel anggur, sedangkan di Italia dibutuhkan waktu 100 hari untuk memproduksi satu ikat kain dan 20 hari untuk memproduksi satu barel anggur. Setiap komoditas diasumsikan identik di kedua negara, sehingga mengabaikan masalah kualitas dari komoditas. Dapat disimpulkan bahwa Skotlandia memiliki keunggulan absolut dalam produksi kain karena dapat memproduksi satu ikat kain dengan biaya riil lebih rendah dibandingkan Italia. Namun Italia memiliki keunggulan

absolut dalam produksi anggur. Akibatnya, setiap negara akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan spesialisasi pada komoditas yang memiliki keunggulan absolut, dan memperoleh komoditas lain melalui perdagangan. Keuntungan yang diperoleh dengan memperoleh komoditas impor dengan biaya riil yang lebih rendah melalui perdagangan dibandingkan melalui perdagangan langsung produksi sendiri di dalam negeri.

Dengan tidak adanya perdagangan, di Skotlandia satu barel anggur akan ditukar dengan empat ikat kain (karena memerlukan jumlah tenaga kerja yang sama), di Italia, satu barel anggur akan ditukar dengan seperlima ikat kain. Skotlandia akan mendapatkan keuntungan jika dapat menukarkan kurang dari empat ikat kain untuk satu barel anggur, sedangkan Italia akan memperoleh keuntungan jika dapat memperoleh lebih dari seperlima ikat kain untuk satu barel anggur. Jadi jelas bahwa kedua negara dapat memperoleh keuntungan dengan rasio menengah seperti satu barel anggur untuk satu ikat kain. Dengan mengalihkan 120 hari kerja dari anggur ke kain, Skotlandia dapat memproduksi empat ikat kain tambahan, senilai empat barel anggur untuk diperdagangkan dengan Italia. Skotlandia mendapat empat barel anggur, bukan satu. Italia memperoleh keuntungan serupa melalui spesialisasi pada anggur.

Sifat dari kemungkinan ada peningkatan efisiensi bagi perekonomian gabungan Skotlandia dan Italia dalam situasi ini dapat dilihat dengan mencatat apa yang akan terjadi jika setiap negara mengalihkan 600 hari kerja dari produksi komoditas yang tidak efisien ke produksi komoditas yang diproduksi secara efisien. Jika Skotlandia memindahkan 600 hari kerja dari produksi anggur ke produksi kain, sedangkan Italia memasukkan 600 hari kerja sebaliknya, perubahan produksi yang ditunjukkan pada Tabel 4-2 akan terjadi di masing-masing negara. Dengan tidak adanya peningkatan input tenaga kerja, gabungan perekonomian kedua negara memperoleh 14 ikat kain dan 25 barel anggur. Peningkatan produksi kedua barang ini hanya disebabkan oleh pengalihan 600 hari kerja di setiap negara ke arah penggunaan yang lebih efisien. Jika masing-

masing negara mengganti 1.200 hari kerja, bukan 600 hari kerja, maka keuntungannya akan dua kali lebih besar.

Penjelasan berdasarkan keunggulan absolut ini tentu saja cukup untuk menjelaskan segmen penting perdagangan internasional. Brasil dapat memproduksi kopi dengan biaya riil yang lebih rendah dibandingkan Jerman, Florida dapat memproduksi jeruk dengan biaya riil yang lebih rendah dibandingkan Islandia, Australia dapat memproduksi wol dengan biaya riil yang lebih rendah dibandingkan Swiss. Namun bagaimana jika suatu negara (atau individu) tidak memiliki keunggulan absolut dalam bidang produksi apa pun? Apakah perdagangan tidak memberikan manfaat apa pun?

Tabel 4.2. Keuntungan Output Dari Perdagangan Dengan Keunggulan Absolut

Jumlah hari kerja oleh setiap pekerja untuk memproduksi	Negara	
	Italia	Skotlandia
Anggur (1 barel)	20	120
Kain (1 ikat)	100	30

Sumber: Dunn & Mutti, 2000.

Total output kedua barang tersebut akan meningkat ketika Italia mengalihkan 600 hari kerja dari produksi kain ke produksi anggur dan Skotlandia mengalihkan 600 hari kerja dari produksi anggur ke produksi kain.

4.2.2 Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

David Ricardo (1817) dengan jelas menunjukkan, dalam bukunya Prinsip Ekonomi Politik, bahwa keunggulan biaya absolut bukanlah syarat yang diperlukan bagi dua negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan satu sama lain. Sebaliknya, perdagangan akan menguntungkan kedua negara asalkan biaya relatif, yaitu rasio biaya riil dalam hal input tenaga kerja, berbeda untuk dua komoditas atau lebih. Singkatnya, perdagangan bergantung pada perbedaan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), dan suatu negara dapat

melakukan perdagangan dengan negara lain secara menguntungkan meskipun biaya riil lebih tinggi (atau lebih rendah) pada setiap komoditas. Poin ini paling baik dijelaskan melalui contoh numerik.

Ricardo (1817) memaparkan kasus potensi perdagangan anggur dan kain antara Portugal dan Inggris, yang telah dimodifikasi di sini dengan menggunakan serangkaian angka yang berbeda. Biaya produksi seikat kain atau satu barel anggur di kedua negara, diukur dalam hari kerja. Seperti terlihat pada Tabel 4.3, Inggris lebih efisien dalam produksi kedua barang tersebut. Lebih sedikit tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang tersebut di Inggris dibandingkan di Portugal. Namun fakta tersebut tidak relevan. Yang penting Portugal punya keunggulan komparatif di bidang anggur, sedangkan Inggris punya keunggulan komparatif di bidang kain.

Tabel 4.3. Contoh Keunggulan Komparatif

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk berproduksi	Negara	
	Portugal	Inggris
Anggur (1 barel)	3	2
Kain (1 ikat)	10	4

Sumber: Dunn & Mutti, 2000.

Peningkatan efisiensi yang dimungkinkan oleh pola keunggulan komparatif ini dapat dilihat dengan membayangkan Portugal mengalihkan 60 hari kerja dari produksi kain ke pekerjaan di industri anggur, sedangkan Inggris mengalihkan 36 hari kerja ke arah yang berlawanan, yaitu dari anggur hingga produksi kain. Dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang disajikan pada Tabel 4.3, maka akibat dari peralihan penggunaan tenaga kerja tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Perekonomian gabungan dari Portugal dan Inggris dapat minum dua barel anggur lagi dan mengenakan pakaian menggunakan tiga ikat kain lagi, meskipun tidak ada peningkatan penggunaan tenaga kerja. Perhatikan bahwa untuk menjamin total output kedua barang tersebut

meningkat, Portugal harus menggeser hari kerja lebih banyak dibandingkan Inggris karena Portugal memproduksi secara absolut dengan kurang efisien. Jika kedua negara mengubah jumlah hari kerja yang sama, maka akan terjadi peningkatan produksi kain yang jauh lebih besar dan sedikit penurunan produksi anggur.

Tabel 4.4. Keuntungan Output Dari Perdagangan Dengan Keunggulan Komparatif

	Portugal	Inggris	Total
Anggur (1 barel)	20	-18	2
Kain (1 ikat)	-6	9	3

Sumber: Dunn & Mutti, 2000.

Inggris dapat memproduksi dua barel anggur atau satu ikat kain dengan jumlah tenaga kerja yang sama (4 hari). Dengan mengalihkan tenaga kerja dari produksi anggur ke produksi kain, perusahaan ini dapat mengubah dua barel anggur menjadi satu ikat kain. Portugal, bagaimanapun, dapat memproduksi 3,33 barel anggur atau satu ikat kain dengan tenaga kerja yang sama (10 hari). Oleh karena itu dengan mengalihkan tenaga kerja dari produksi kain ke produksi anggur, Portugal dapat mengubah satu ikat kain menjadi 3,33 barel anggur. Sebagai perbandingan, kain murah di Inggris dan mahal di Portugal, sedangkan anggur murah di Portugal dan mahal di Inggris. Seikat kain hanya berharga dua barel anggur di Inggris, tetapi satu ikat kain berharga 3,33 barel anggur di Portugal. Jika dilihat dari sudut pandang anggur, dapat dilihat bahwa satu barel berharga setengah dari satu ikat kain di Inggris, tetapi hanya sepertiga dari satu ikat kain di Portugal. Perbedaan harga relatif suatu barang terhadap barang lainnya menciptakan keunggulan komparatif Portugal dalam bidang anggur dan Inggris kain.

Tabel 4.5. Rasio Pertukaran Domestik Di Portugal dan Inggris

	Portugal	Inggris
Anggur (barel)	3,33	2
Kain (ikat)	1	1

Sumber: Dunn & Mutti, 2000.

Cara lain untuk memahami sifat keuntungan ini adalah dengan membayangkan seseorang mempunyai hak monopoli atas perdagangan antara London dan Lisbon. Jika biaya tenaga kerja yang disajikan pada Tabel 4.3 berlaku dan tenaga kerja merupakan satu-satunya input, maka rasio harga yang dihadapi oleh pedagang monopoli di kedua negara akan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Di Portugal, satu ikat kain 3,33 kali lebih mahal dari satu barel anggur, sedangkan di Inggris kain hanya dua kali lebih mahal dari anggur. Perbedaan kedua rasio barter ini menciptakan peluang keuntungan yang sangat besar bagi pedagang monopoli. Dimulai dengan 100 ikat kain di London, pedagang mengirimkan barang dagangannya ke Lisbon, di mana barang tersebut dapat ditukar dengan 333,3 barel anggur. 333,3 barel anggur ini dimasukkan ke dalam kapal kembali ke London, yang dapat ditukar dengan 166,7 ikat kain. Pedagang tersebut memulai dengan 100 ikat kain dan sekarang memiliki 166,7 ikat kain, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 66,7 persen dikurangi biaya pengiriman hanya dengan berdagang dalam lingkaran antara London dan Lisbon.

Pedagang monopoli hanya mengambil keuntungan dari perbedaan rasio harga di Inggris dan Portugal, yang didasarkan pada perbedaan biaya tenaga kerja relatif, dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sekarang bayangkan monopoli telah dihapuskan dan siapa pun yang ingin melakukan hal tersebut dapat melakukan perdagangan antara London dan Lisbon. Ketika banyak orang membeli kain di London, dengan tujuan mengirimkan ke Lisbon, dan ini akan menaikkan harga kain di Inggris.

Ketika orang-orang yang sama ini tiba di Lisbon dan menjual kain dalam jumlah besar, sehingga akan menurunkan

harga kain. Karena para pedagang ini membeli anggur Portugis dalam jumlah besar untuk dikirim ke London, sehingga akan menaikkan harga anggur di Lisbon. Ketika semua penjual tiba di London untuk menjual anggur itu, dan akan menurunkan harga anggur.

Sebagai hasil dari perdagangan, rasio harga menjadi konvergen. Ketika harga kain naik di London dan turun di Lisbon, sementara harga anggur naik di Portugal dan turun di Inggris, keuntungan besar yang sebelumnya diperoleh para pedagang menurun. Dalam keseimbangan kompetitif, perbedaan rasio harga akan cukup untuk menutupi biaya transportasi dan memberikan tingkat pengembalian kompetitif minimum bagi para pedagang. Untuk mempermudah, dengan diabaikan biaya transportasi dan tingkat pengembalian minimum bagi para pedagang. Perdagangan bebas akan menghasilkan rasio harga tunggal yang berlaku di kedua negara. Rasio harga tersebut akan berada di antara dua rasio harga awal di Portugal dan Inggris.

Apakah ini berarti keuntungan perdagangan yang sebelumnya terkonsentrasi pada keuntungan pedagang monopoli, kini hilang? Tidak, hal ini hanya berarti bahwa keuntungan tersebut telah dialihkan dari pihak pedagang ke masyarakat Portugal dan Inggris melalui perubahan rasio harga. Ketika perusahaan monopoli menguasai perdagangan kedua negara, Inggris harus mengekspor 1 ikat kain untuk mendapatkan 2 barel anggur. Kini setelah persaingan semakin ketat, harga kain di Inggris meningkat sementara harga anggur menurun. Akibatnya, seikat kain yang diekspor oleh Inggris akan menghasilkan lebih banyak anggur, atau lebih sedikit kain yang diekspor akan menghasilkan jumlah anggur yang sama. Inggris kini mempunyai standar hidup yang lebih baik karena bisa memiliki lebih banyak anggur, atau lebih banyak kain, atau keduanya. Situasi serupa juga terjadi di Portugal. Di Lisbon harga anggur meningkat dan harga kain menurun; jadi jumlah anggur yang sama yang diekspor akan membeli lebih banyak kain, atau jumlah kain yang sama dapat dibeli dengan lebih sedikit anggur. Portugal juga mempunyai standar hidup yang lebih baik karena dapat mengonsumsi lebih banyak kain, atau lebih banyak anggur, atau keduanya.

Demonstrasi ini, bahwa keuntungan dari perdagangan muncul dari perbedaan biaya komparatif, sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam analisis ekonomi. Pada pandangan pertama, hal ini mungkin tampak sebagai hal kecil, namun hal ini telah terbukti memiliki banyak penerapan dalam bidang ekonomi dan juga bidang studi yang lain. Prinsip keunggulan komparatif inilah yang mendasari keunggulan pembagian kerja, baik antar individu, perusahaan, wilayah, maupun negara. Berspesialisasi dalam aktivitas-aktivitas di mana memiliki keunggulan relatif, bergantung pada pihak lain untuk memasok barang dan jasa lain. Dengan cara ini pendapatan riil dapat meningkat sebagai akibat dari semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar negara.

4.2.3 Perbandingan Keunggulan Dengan Banyak Barang (*Comparative Advantage with Many Goods*)

Sejauh ini hanya dua negara dan dua barang yang disajikan keunggulan komparatif, dengan asumsi tidak ada biaya transportasi. Dunia nyata, tentu saja, mencakup ribuan barang, hampir 200 negara, dan biaya transportasi yang besar. Bagaimana pola perdagangan suatu negara terbentuk dalam situasi yang lebih realistis ini?

Sebuah negara di dunia yang memiliki banyak barang dapat dipandang mengurutkan produk-produk tersebut dari keunggulan komparatif terbesar hingga kerugian komparatif terbesar. Peringkat ini mencerminkan biaya produksi marjinal di Negara A relatif terhadap biaya produksi marjinal di Negara B (yang mewakili negara-negara lain di dunia), untuk setiap barang yang dapat diproduksi. Lihat kasus khusus teori nilai ketenagakerjaan klasik, dimana tenaga kerja adalah satu-satunya masukan. Pemingkatan biaya relatif ini akan bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang relevan di masing-masing negara, jika dapat diasumsikan bahwa tenaga kerja memperoleh upah yang sama di mana pun tenaga kerja bekerja di negara tersebut. Untuk mempertunjukkan hasil ini dengan mempertimbangkan bagaimana upah dan produktivitas tenaga kerja menentukan biaya produksi. Perhatikan khusus

pada kasus ini karena kasus ini telah digunakan untuk menguji relevansi teori ini dengan pola perdagangan dunia nyata.

Biaya marjinal produksi kain (MC_c) sama dengan tingkat upah (w) dikalikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per unit output (L/Q_c):

$$MC_c^A = w^A (L/Q)_c^A$$

Dalam perekonomian barter, harga kain adalah jumlah gandum yang diberikan untuk membeli satu unit kain. Upah juga diukur dengan standar yang sama, yaitu jumlah gandum yang diterima pekerja per jam kerja. Prinsip-prinsip yang sama juga berlaku dalam dunia yang lebih dikenal dengan upah uang (upah nominal). Sehubungan dengan ekspresi biaya marjinal, maka dapat dilihat bahwa biaya produksi marjinal di negara A akan lebih tinggi ketika tingkat upah lebih tinggi dan lebih rendah ketika produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, karena produktivitas tenaga kerja (output input tenaga kerja per jam) hanyalah kebalikan dari tenaga kerja yang dibutuhkan per unit output. Dapat ditulis hubungan yang sama untuk negara B:

$$MC_c^B = w^B (L/Q)_c^B$$

dan membentuk rasio dari dua istilah biaya marjinal ini:

$$\frac{MC_c^A}{MC_c^B} = \frac{w^A (L/Q)_c^A}{w^B (L/Q)_c^B}$$

Pemeringkatan rasio-rasio tersebut terhadap seluruh barang yang ingin dipertimbangkan dalam memprediksi pola perdagangan yang akan muncul.

Misalkan dapat dihitung rasio biaya marjinal untuk kain, gandum, dan baja, dan hasilnya adalah peringkatnya

$$\frac{w^A (L/Q)_c^A}{w^B (L/Q)_c^B} < \frac{w^A (L/Q)_o^A}{w^B (L/Q)_o^B} < \frac{w^A (L/Q)_s^A}{w^B (L/Q)_s^B}$$

Dapat dilihat bahwa negara A mempunyai keunggulan produktivitas terbesar dalam produksi kain, yang memberikan biaya marjinal yang relatif lebih rendah pada produksi kain, dan keuntungan paling kecil pada produksi baja. Selama terdapat tingkat upah tunggal di setiap negara, rasio (w^A/w^B) hanyalah sebuah istilah konstan yang tidak mempengaruhi peringkat keunggulan komparatif antar industri, produktivitas tenaga kerja relatif akan menentukan peringkatnya.

Permintaan timbal balik dan penentuan keseimbangan harga internasional ketika perdagangan masing-masing negara harus seimbang. Kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan permintaan output dan tenaga kerja di masing-masing negara dan rasio upah di negara A dan B. Semakin besar permintaan dunia akan kain, misalnya, dimana Negara A mempunyai keunggulan komparatif, semakin tinggi pula upah di Negara A akan relatif terhadap Negara B. Sejalan dengan itu, Negara A akan lebih cenderung mengimpor baja dan gandum dari Negara B.

Dari sudut pandang suatu negara dalam mempertimbangkan apa yang harus diperdagangkan dengan negara lain, diperkirakan negara tersebut akan mengekspor barang pada urutan teratas dan mengimpor barang pada urutan terbawah. Sebagian besar negara kecil akan mengekspor sedikit barang dalam jumlah besar dan mengimpor banyak barang dalam jumlah kecil. Suatu negara akan cenderung melakukan perdagangan terutama dengan negara-negara yang biasanya mengimpor barang dengan keunggulan komparatif terkuat dan/atau mengekspor barang dengan keunggulan komparatif terkuat. Volume perdagangan akan lebih besar di negara-negara yang mewakili pasar ekspor atau sumber impor yang sangat besar, yaitu negara-negara dengan populasi besar dan tingkat GNP per kapita yang tinggi.

Akan ada sejumlah barang, kemungkinan besar berada di tengah-tengah urutan peringkat keunggulan komparatif suatu negara, yang tidak akan diekspor atau diimpor (barang yang tidak dapat diperdagangkan), karena keunggulan atau kerugian komparatif pada produk-produk tersebut terlalu kecil untuk mengatasi biaya transportasi. Produk-produk tersebut akan diproduksi di dalam negeri dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi lokal. Semakin berat atau produk yang berukuran besar, semakin besar kemungkinan produk tersebut tidak dapat diperdagangkan, misal: sangat sedikit negara yang mengekspor atau mengimpor kerikil dan pasir. Biaya transportasi juga berarti bahwa suatu negara akan cenderung melakukan lebih banyak perdagangan dengan negara tetangganya dan lebih sedikit dengan negara yang lebih jauh.

4.3 Kesimpulan

Adam Smith menunjukkan bahwa potensi keuntungan dari spesialisasi berlaku pada perdagangan antar negara. Suatu negara harus mengekspor produk yang lebih produktif dibandingkan negara lain: yaitu barang yang dapat menghasilkan lebih banyak output per unit input dibandingkan negara lain dan memiliki keunggulan absolut. Negara tersebut harus mengimpor barang-barang yang memiliki produktivitas kurang dibandingkan negara lain dan memiliki kerugian absolut. Perdagangan memungkinkan output dunia meningkat, meskipun individu bekerja tidak lebih keras dibandingkan sebelum adanya perdagangan.

David Ricardo memperluas wawasan ini untuk menunjukkan bahwa dasar keuntungan perdagangan adalah adanya keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Suatu negara yang kurang produktif dalam dua barang masih dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mengekspor barang yang memiliki kerugian relatif lebih kecil, karena harga relatif barang tersebut sebelum diperdagangkan akan lebih rendah dibandingkan di luar negeri. Negara yang mempunyai keunggulan absolut pada kedua barang tersebut memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi pada kedua barang tersebut, dengan produksi barang yang memiliki keunggulan relatif lebih besar. Negara ini dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mengimpor produk yang memiliki keunggulan relatif lebih kecil, karena biaya peluang asing untuk memproduksi produk tersebut lebih rendah. Jika biaya peluang meningkat, keuntungan dari perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif tetap ada. Tapi kecenderungan untuk berspesialisasi dalam produksi tidak sebesar jika terjadi biaya peluang yang konstan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, Robert M., Jr., and Mutti, John H. 2000. *International Economics*. Fifth Edition. Routledge. London.
- Krugman, Paul R., and Obstfeld, Maurice. 2009. *International Economics: Theory & Policy*. Eighth Edition. Pearson Addison Wesley. New York.
- Reinert, Kenneth A. 2012. *An Introduction To International Economics: New Perspectives on the World Economy*. First Published. Cambridge University Press. New York.

BAB 5

TEORI PERDAGANGAN MODERN

Oleh Banatul Hayati

5.1 Pendahuluan

Suatu perekonomian yang menyatakan diri sebagai perekonomian terbuka berarti perekonomian negara tersebut menjalin hubungan dengan perekonomian negara lain melalui perdagangan internasional ,yaitu menjual dan membeli barang dan jasa di pasar barang dunia,dan atau melalui menjual dan membeli asset-aset modal seperti saham dan obligasi di pasar modal (*financial market*).

Perdagangan internasional dapat terjadi dikarenakan beberapa hal ,diantaranya adalah ketiadaan sumberdaya di dalam negeri yang mengharuskan suatu negara membeli dari negara lain yang memiliki sumberdaya yang dibutuhkan jika ingin mengkonsumsi produk. Selain itu,masing-masing negara punya perbedaan dalam kemampuan produksi suatu barang. Ada negara yang lebih efisien dalam memproduksi barang yang satu dan ada negara yang lebih efisien dalam memproduksi dalam memproduksi barang yang lain.

Ada dua teori perdagangan Klasik yang terkenal dan menjadi acuan dalam melakukan perdagangan dengan negara lain, yaitu teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dari Adam Smith yang menjelaskan bahwa dua negara dapat melakukan perdagangan apabila terdapat keunggulan mutlak. Ketika suatu negara lebih efisien dibanding (atau memiliki keunggulan mutlak terhadap) negara lainnya dalam memproduksi suatu komoditas, namun tidak lebih efisien dibanding (memiliki ketidakunggulan mutlak terhadap) negara kedua dalam memproduksi komoditas lainnya. Apabila kondisi tersebut berlaku, maka kedua negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas yang menjadi keunggulan mulaknya,serta

menukarnya dengan komoditas lain yang diproduksi negara lain secara lebih efisien.

Teori perdagangan komparatif dari David Ricardo pada abad ke-19 menjadi penting dalam memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional. Teori ini melengkapi teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak masih bisa melakukan perdagangan asalkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif menurut David Ricardo, yaitu dengan cara negara-negara mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang dihasilkan secara relative lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Jadi apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua komoditas, menurut hukum keunggulan komparatif perdagangan masih memungkinkan untuk terjadi dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang keunggulannya mutlaknya (*absolute disadvantage*) nya lebih kecil dibandingkan negara lainnya (komoditas inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan mengimpor komoditas yang *absolute disadvantage*nya lebih besar (komoditas ini sebagai *comparative disadvantage* nya (Mankiw, Gregory, 2004).

Teori perdagangan komparatif ini kemudian dikembangkan oleh para ekonom lainnya menjadi teori perdagangan modern seperti teori kelimpahan faktor (*endowment factor*) dari Heckscher- Ohlin, teori *Vent for Surplus* dari Neo Klasik, teori paradoks Leontief dan teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter.

5.2 Keuntungan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat menguntungkan semua negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Ada keuntungan yang didapatkan Ketika negara-negara menjual barang dan jasa masing- masing, pertukaran ini selalu menguntungkan kedua negara. Namun demikian ada sejumlah orang yang skeptis mengenai manfaat perdagangan internasional. Ada kesalahpahaman umum bahwa perdagangan

akan merugikan jika ada kesenjangan besar antar negara dalam hal produktivitas dan upah. Dua negara dapat memperoleh keuntungan bersama bahkan Ketika salah satu dari negara tersebut lebih efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi segalanya. Perdagangan memberikan manfaat karena memungkinkan negara-negara mengeksport barang-barang yang produksinya relative besar dan menukarnya dengan barang-barang yang sumber daya local untuk memproduksi langka. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri pada barang dan jasa yang memiliki efisiensi produksi skala yang lebih besar.

Kedua negara yang produktivitas tenaga kerja relatifnya berbeda, industrinya akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang berbeda. Kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan spesialisasi tersebut. Keuntungan Bersama dari kedua negara yang melakukan perdagangan dapat ditunjukkan melalui dua cara. Pertama, untuk menunjukkan bahwa spesialisasi dan perdagangan bermanfaat adalah dengan menganggap perdagangan sebagai metode tidak langsung dalam produksi barang. Misalkan negara domestic dapat memproduksi minuman anggur secara langsung tetapi perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut memproduksi minuman anggur secara tidak langsung, yaitu memproduksi barang lain, keju misalnya dan kemudian menukar dan menjual keju tersebut untuk mendapatkan segalon minuman anggur.

Keseimbangan perdagangan internasional terjadi jika kedua negara (negara domestik dan negara Asing) tidak ada yang memproduksi dua jenis barangnya (minuman anggur dan keju) secara langsung. Negara domestic dapat memproduksi anggur secara lebih efisien dengan membuat keju dan memperdagangkannya dibandingkan memproduksi minuman anggur secara langsung untuk dirinya sendiri. Demikian pula negara asing dapat memproduksi keju secara lebih efisien dengan membuat minuman anggur dan memperdagangkannya sehingga kedua negara mendapatkan keuntungan.

Kedua, untuk melihat keuntungan dari perdagangan adalah dengan melihat pengaruh perdagangan terhadap kemungkinan batas konsumsi setiap negara, Jika tidak ada perdagangan batas kemungkinan konsumsi adalah sama dengan batas kemungkinan produksi. Namun setelah perdagangan diperbolehkan setiap perekonomian dapat mengkonsumsi campuran keju dan anggur yang berbeda dari campuran yang dihasilkannya (Krugman, Paul R, 2003).

5.3 Teori Perdagangan Heckser Ohlin (Teori H-O)

Teori ini dikembangkan oleh ekonom Swedia ,Eli Heckser pada tahun 1919 dalam artikel yang berjudul *The effect of foreign trade on distribution income* yang berisi tentang teori perdagangan internasional modern. Teori ini kemudian disusun ulang oleh murid Hecser, Bertil Ohlin dalam bukunya *interregional and International trade* pada tahun 1933. Teori mereka kemudian dikenal sebagai teori Heckser- Ohlin (H- O Theory). Teori ini pada dasarnya berkaitan dengan pola-pola perdagangan serta pengaruh perdagangan internasional terhadap harga faktor produksi hingga terjadi penyamaan faktor produksi. Asumsi yang digunakan dalam teori Heckser dan Ohlin adalah sebagai berikut : (Salvatore,Dominick,2007).

1. Perdagangan melibatkan dua negara (Negara 1 dan Negara 2,dua produk (Produk Agriculture A dan Produk Manufaktur M) serta dua faktor produksi (tenaga kerja dan modal)
2. Teknologi yang digunakan kedua negara sama
3. ProdukA adalah bersifat padat karya, sedangkan produk M bersifat padat modal di kedua negara
4. Skala pengembalian hasil pada kedua produk adalah konstan
5. Terjadi spesialisasi di kedua negara,
6. selera kedua negara sama
7. Berlakunya asumsi pasar persaingan sempurna pada pasar produk maupun pasar faktor produksi di kedua negara

8. Faktor produksi mengalami mobilitas sempurna di dalam suatu negara, namun tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional
9. Tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain dalam perdagangan internasional
10. Sumber daya digunakan sepenuhnya di kedua negara
11. Seimbangnya perdagangan antara dua negara

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa Suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah serta mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya mahal. Jadi negara yang relatif kaya faktor produksi tenaga kerja akan mengekspor produk yang diproduksi dengan model padat karya dan akan mengimpor produk yang diproduksi dengan model padat modal.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun dalam teori H-O dimana model standar dua negara, dua komoditas. Kedua negara tersebut dibagi menjadi "Negara Kurang Berkembang" dan "Negara Lainnya" dan kedua komoditas tersebut adalah barang pertanian dan barang manufaktur. Gambar 5.1 menggambarkan manfaat teoretis dari perdagangan bebas dengan garis batas kemungkinan produksi domestik (tanpa perdagangan) di Negara-negara Kurang Berkembang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1a dan garis batas kemungkinan produksi negara-negara lain di Dunia pada Gambar 5.1b. Poin A pada PP garis batas kemungkinan produksi di Negara Kurang Berkembang pada Gambar 5.1a memberikan gambarnya. Dengan penggunaan seluruh sumber daya secara penuh dan berdasarkan asumsi persaingan sempurna, "Negara Kurang Berkembang" akan memproduksi dan mengonsumsi di titik A, dengan rasio harga relatif, P_a/P_m , akan diberikan oleh kemiringan garis putus-putus, $(P_a/P_m)_L$, di titik A

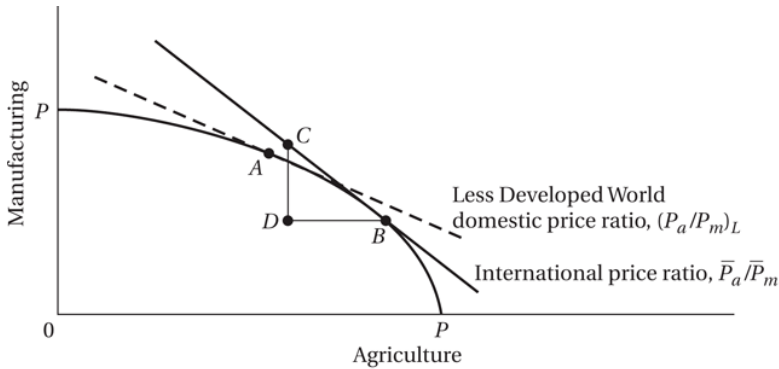
Demikian pula, "negara-negara lain di dunia" mungkin memproduksi dan mengonsumsi di titik A' pada Gambar 5.2b, dengan rasio harga domestik, $(P_a/P_m)_R$, yang berbeda (barang-

barang pertanian relatif lebih mahal, atau sebaliknya, barang-barang manufaktur relatif lebih murah).) dari” Negara Kurang Berkembang”. Perhatikan bahwa dengan perekonomian tertutup, kedua negara akan memproduksi kedua komoditas tersebut. Namun, negara-negara kurang berkembang, karena lebih miskin, akan menghasilkan proporsi produk pangan yang lebih besar dalam total outputnya (yang lebih kecil).

Perbedaan relatif dalam biaya produksi dan harga di titik A dan A' (yaitu perbedaan kemiringannya) sekali lagi memunculkan kemungkinan perdagangan yang menguntungkan. Seperti dalam model biaya tenaga kerja klasik, rasio harga perdagangan bebas internasional, $P_a > P_m$, akan berada di antara $(P_a/P_m)_L$ dan $(P_a/P_m)_R$, maka rasio harga domestik masing-masing di Negara Kurang Berkembang dan Negara Lainnya. Garis $P_a > P_m$ pada kedua grafik pada Gambar 5.1 menunjukkan rasio harga dunia secara umum. Bagi Negara” Kurang Berkembang”, kemiringan $P_a > P_m$ yang lebih curam berarti bahwa negara tersebut dapat memperoleh lebih banyak barang manufaktur untuk satu unit pertanian dibandingkan jika tidak ada perdagangan; artinya, harga barang-barang pertanian dunia dalam hal manufaktur lebih tinggi dibandingkan rasio harga domestik di Negara-negara Kurang Berkembang. Oleh karena itu, negara ini akan melakukan realokasi sumber daya dari sektor manufaktur padat modal yang mahal dan lebih mengkhususkan diri pada produksi pertanian padat karya. Berdasarkan asumsi persaingan sempurna, negara tersebut akan berproduksi di titik B pada batas produksinya, dimana biaya produksi relatifnya (peluang) sama dengan harga relatif dunia. Negara tersebut kemudian dapat berdagang sepanjang $P_a > P_m$, garis harga internasional yang berlaku, mengekspor produk pertanian BD dengan imbalan impor manufaktur DC dan mencapai titik konsumsi akhir C dengan kedua barang tersebut lebih banyak dibandingkan sebelum perdagangan. Sebagai contoh numerik, misalkan rasio harga internasional perdagangan bebas, $P_a > P_m$, adalah 2 banding 1. Dengan kata lain, satu unit barang pertanian dijual dengan harga dua kali lipat harga satu unit barang manufaktur. Artinya, untuk setiap unit pertanian yang diekspor oleh Negara Kurang Berkembang

ke Negara-negara Lain, negara tersebut dapat mengimpor 2 unit barang manufaktur. Kemiringan garis harga internasional secara grafis menggambarkan rasio perdagangan ini, ketentuan perdagangan ini. Jika Negara Kurang Berkembang mengekspor pertanian BD (katakanlah, 30 unit), negara tersebut akan menerima manufaktur DC (60 unit) sebagai imbalannya.

Demikian pula halnya dengan "negara-negara lain di dunia", rasio harga internasional yang baru berarti lebih banyak produk pertanian yang ditukarkan dengan barang-barang manufaktur dibandingkan dengan harga domestik. Secara grafis, rasio harga internasional memiliki kemiringan yang lebih kecil dibandingkan rasio harga domestik di negara-negara lain di dunia (lihat Gambar 5.2b). Oleh karena itu, negara-negara lain di dunia akan merealokasikan sumber daya modalnya yang berlimpah untuk memproduksi lebih banyak barang manufaktur dan mengurangi produksi pertanian, seperti pada titik B', dimana biaya produksi dalam negeri relatif sama dengan harga relatif dunia. Negara tersebut kemudian dapat memperdagangkan $B'D' = DC$ dari manufaktur tersebut dengan $D'C' = BD$ produk pertanian di "Negara Kurang Berkembang". Oleh karena itu, "negara-negara lain" juga dapat keluar dari batasan produksinya dan akhirnya melakukan konsumsi pada titik seperti C' pada Gambar 5.2b. Perdagangan menjadi seimbang—nilai ekspor sama dengan nilai impor kedua wilayah. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan peningkatan konsumsi kedua barang tersebut di kedua wilayah, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan antara titik perdagangan bebas C dan C' dan titik tanpa perdagangan A dan A' pada Gambar 5.1 (Todaro, Michael P, 20).



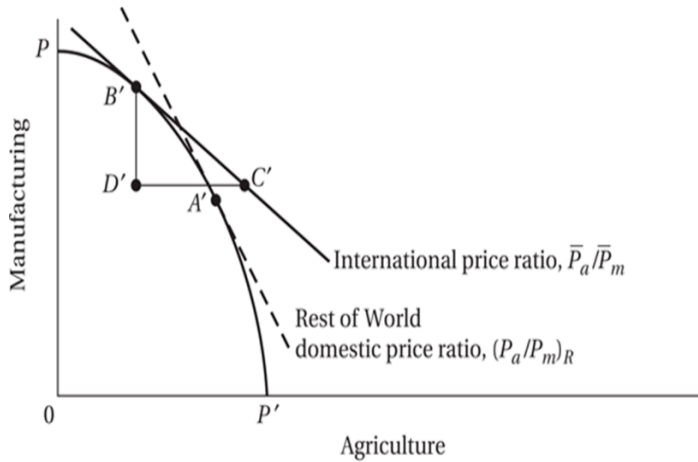
(a) Less Developed World (without trade, production and consumption occur at A; with trade, production is at B, consumption is at C; exports = BD; imports = DC)

Gambar 5.1. Spesialisasi Perdagangan di Negara Kurang Berkembang

Sumber : Michael P.Todaro (2000)

Berdasarkan gambar 5.1 yang menggambarkan kondisi di "negara kurang berkembang" dimana negara tersebut memiliki kelimpahan faktor produksi (*endowment factor*) tenaga kerja akan memproduksi lebih banyak barang-barang pertanian/ agriculture yang bersifat padat karya dibandingkan memproduksi produk manufaktur yang bersifat padat modal.

1. Sebelum ada perdagangan produksi dan konsumsi terjadi di titik A.
2. Dengan melakukan perdagangan maka produksi produk agriculture meningkat di titik B, sementara konsumsi di titik C. Kelebihan produk agriculture sebanyak BD akan diekspor untuk mengimpor produk manufaktur sebesar DC.



(b) Rest of World (without trade, production and consumption occur at A' ; with trade, production is at B' , consumption is at C' ; exports = $B'D'$; imports = $D'C'$)

Gambar 5.2. Spesialisasi Perdagangan di Negara -negara di Dunia

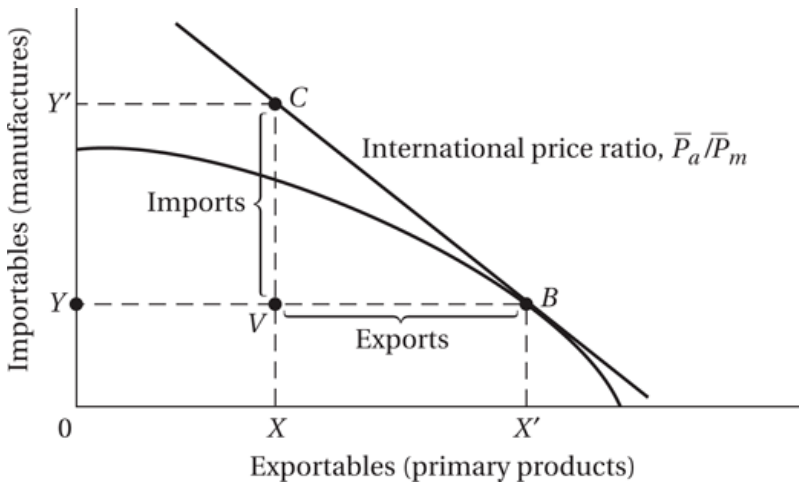
Sumber : Michael P.Todaro,2000)

Berdasarkan gambar 5.2. yang menggambarkan kondisi di "negara-negara lainnya" (pasar internasional) dimana negara tersebut memiliki kelimpahan faktor produksi (*endowment factor*) modal akan memproduksi lebih sedikit barang-barang pertanian/ agriculture yang bersifat padat karya sementara memproduksi produk manufaktur yang bersifat padat modal lebih banyak.

1. Sebelum ada perdagangan produksi dan konsumsi terjadi di titik A' .
2. Dengan melakukan perdagangan maka produksi produk manufaktur meningkat di titik B' , sementara konsumsi di titik C' . Kelebihan produk manufaktur sebanyak $B'D'$ akan diekspor untuk mengimpor produk agriculture sebesar $D'C'$.

5.4 Teori Vent for surplus

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith yang kemudian dikembangkan oleh ekonom Neo Klasik Hya Minh.



Gambar 5.3. Vent for surplus

Sumber : Michael P.Todaro,200

Kesimpulan utama dari model perdagangan bebas neoklasik adalah semua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan dan output dunia meningkat. Namun, ada beberapa kesimpulan lain selain dua kesimpulan dasar tersebut. Pertama, karena meningkatnya biaya peluang yang terkait dengan peralihan sumber daya di antara komoditas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi penuh tidak akan terjadi seperti pada model keunggulan komparatif klasik. Negara-negara akan cenderung mengkhususkan diri pada produk-produk yang menggunakan sumber daya melimpah mereka secara intensif. Mereka akan mengkompensasi kelangkaan sumber daya mereka dengan mengimpor produk yang mereka gunakan dengan adanya sumber daya yang langka ini secara intensif. Namun meningkatnya biaya dalam negeri dan oleh karena itu harga yang melebihi harga dunia akan menghalangi terjadinya spesialisasi penuh.

Menurut teori ini, pembukaan pasar dunia bagi masyarakat agraris terpencil menciptakan peluang untuk tidak melakukan realokasi sumber daya yang digunakan secara penuh seperti dalam model tradisional, melainkan untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya tenaga kerja yang sebelumnya tidak terpakai untuk menghasilkan output yang lebih besar untuk diekspor ke pasar luar negeri. Menurut pandangan ini, sistem pertanian perkebunan kolonial, serta komersialisasi pertanian subsisten skala kecil, dimungkinkan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menganggur dan setengah menganggur. Dalam analisis kemungkinan produksi, argumen vent-for-surplus dapat direpresentasikan dengan pergeseran produksi dari titik V ke titik B pada Gambar 5,3, dengan perdagangan yang memperbesar konsumsi domestik akhir dari V ke C.

Sebelum adanya perdagangan, sumber daya yang dimiliki negara-negara berkembang yang tertutup ini kurang dimanfaatkan dan setengah menganggur dimana produksi terjadi di titik V, masih berada di luar batas kemungkinan produksi dari produk primer sebesar OX serta manufaktur sebesar OY . Terbukanya negara terhadap pasar luar negeri (mungkin sebagai akibat dari penjajahan) memberikan dorongan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya yang menganggur ini (kebanyakan kelebihan tanah dan tenaga kerja) dan memperluas produksi produk primer yang dapat diekspor dari OX ke OX' di titik B di sisi barat. batas produksi. Mengingat rasio harga internasional, produk primer $P_a > P_m$, $X' - X$ (sama dengan VB) sekarang dapat diekspor dengan imbalan manufaktur $Y' - Y$ (sama dengan VC), sehingga titik konsumsi akhir, C, dicapai dengan produk primer (X) yang sama yang dikonsumsi seperti sebelumnya tetapi dengan $Y' - Y$ lebih banyak manufaktur impor yang kini tersedia.

Sayangnya, dalam jangka pendek, pihak yang diuntungkan dari proses ini sering kali adalah pengusaha kolonial dan ekspatriat, bukan warga negara berkembang. Dan, dalam jangka panjang, orientasi struktural perekonomian negara berkembang terhadap ekspor produk primer dalam banyak kasus menciptakan "enclave" ekspor dan menghambat

transformasi struktural yang diperlukan menuju perekonomian yang lebih terdiversifikasi (Todaro, Michael,).

5.5 Teori Paradoks Leontif

Teori H-O menyatakan bahwa negara yang memiliki relative modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit seperti Amerika Serikat berdasarkan teori H-O akan mengekspor barang-barang padat modal dan akan mengimpor barang-barang padat karya. Teori paradox Leontif bertentangan dengan Teori Heckser Ohlin. Wassily Leontif pada tahun 1953 menemukan fakta tentang strktur perdagangan luar negeri Amerika Serikat yang bertentangan dengan teori Heckser-Ohlin sehingga disebut *paradox Leontif*. Amerika sebagai suatu perekonomian yang memiliki kelimpahan faktor produksi relative modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibanding negara lainnya ternyata struktur perdagangannya bertentangan dengan teori H-O. studi empiris Leontif menemukan Ekspor Amerika justru terdiri atas barang-barang yang padat karya (*labor intensive*), sebaliknya impornya terdiri dari barang-barang yang dihasilkan melalui industry yang padat modal (Hady, Hamdy, 2001).

5.6 Teori Keunggulan Kompetitif

Teori ini berbeda dengan teori dari Adam Smith dan David Ricardo yang mendasarkan alasan terjadinya perdagangan internasional adalah karena adanya keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara dibandingkan negara lainnya. Teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter ini (1990) didasarkan pada adanya keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan bersaing suatu negara dibandingkan dengan negara pesaingnya. Dalam era globalisasi persaingan akan semakin ketat dalam perdagangan internasional sehingga suatu negara harus memiliki keunggulan bersaing dibandingkan negara lainnya. Keunggulan bersaing merupakan kondisi yang dimiliki suatu negara melebihi kondisi pesaingnya sehingga membuat suatu negara berada pada posisi menguntungkan dibandingkan negara lain dalam perdagangan

internasional. Keunggulan kompetitif bisa dicapai suatu negara apabila suatu negara mampu melakukan strategi produksi biaya rendah sehingga mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif dalam pasar persaingan monopolistic dimana produk yang ditawarkan negara-negara yang melakukan perdagangan bersifat homogen bisa dilakukan dengan melakukan *diferensiasi product*, barang sama tapi dibedakan karena memiliki keunikan dari karakteristik teknologi, fitur, layanan pelanggan, *prestige*, *brand image* dan inovasi. Selain itu negara harus fokus pada target pasar yang dituju sehingga mampu bersaing dengan negara lain meraih keuntungan perdagangan.

Suatu negara bisa memiliki keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh empat faktor penentu (Hady, Hamdy, 2004) :

1. *Factor condition* adalah keunggulan yang dimiliki dari segi ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, penguasaan ilmu dan teknologi serta tersedianya modal dan infrastruktur
2. *Demand condition* adalah keunggulan yang dimiliki berkaitan dengan kondisi permintaan terhadap produk yang dihasilkan suatu negara berkaitan dengan komposisi permintaan produk domestik (*composition of home demand*, ukuran dan pola pertumbuhan permintaan domestik (*Size and pattern of growth of home demand*), tren perkembangan permintaan internasional (*trend of international demand*), pertumbuhan pasar dalam negeri yang pesat (*rapid home market growth*).
3. *Related and Supporting industry*, yaitu adanya hubungan baik dengan mitra dan negara tujuan dengan menjaga kontak dan koordinasi dengan pemasok terutama dalam menjaga dan memelihara *value chain*.
4. *Firm strategy structure & Rivalry* adalah strategi perusahaan, struktur organisasi dan modal Perusahaan serta kondisi persaingan /rivalry. Rivalry akan menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan kualitas produk, peningkatan produktivitas serta kualitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Hamdy.2004. *Ekonomi International:Teori dan Aplikasi*, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Kruggerman ,Paul R & Maurice Obstfeld .2003. *International Economics, sixth edition*. USA: Pearson.
- Mankiw, Gregory. 2004. *Principles of Economics*, 3rd Edition, Soutwestern, Ohio:Thompson.
- Salvatore, Dominick. 2007. *International Economics*, 9th Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc
- Todaro, Michael.P and Stephen C.Smith. 2012, *Economic Development*. Eleventh Edition. USA: Cation,Inc.

BAB 6

KEBIJAKAN TARIF DAN NON TARIF

Oleh I Nyoman Wahyu Widiana

6.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat prinsip, tujuan, dan tindakan yang dirancang untuk mengarahkan atau mengatur perilaku, keputusan, dan proses dalam suatu organisasi atau masyarakat. Konsep kebijakan melibatkan beberapa elemen kunci:

1. **Tujuan:** Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Tujuan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi organisasi atau masyarakat yang bersangkutan.
2. **Proses Pengambilan Keputusan:** Konsep kebijakan juga mencakup proses bagaimana kebijakan tersebut dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Proses pengambilan keputusan yang transparan, inklusif, dan akuntabel dapat memastikan kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
3. **Landasan Hukum atau Etika:** Kebijakan harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan/atau prinsip-prinsip etika yang diterima secara luas. Kebijakan yang bertentangan dengan hukum atau norma etika dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam pelaksanaannya.
4. **Dampak:** Sebelum diimplementasikan, kebijakan harus dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Dampak kebijakan dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Evaluasi dampak harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat yang diharapkan dan mengurangi risiko dampak yang tidak diinginkan.
5. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Konsep kebijakan juga mencakup fleksibilitas dan adaptabilitas. Kebijakan yang

baik harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang berkembang dari waktu ke waktu.

6. **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan merupakan aspek penting dari konsep kebijakan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
7. **Konsistensi dan Keselarasan:** Kebijakan harus konsisten dengan tujuan, nilai, dan kebijakan lain yang ada dalam organisasi atau masyarakat yang bersangkutan. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan yang berbeda sangat penting untuk mencapai tujuan secara efektif.

Penerapan konsep kebijakan yang baik dapat membantu organisasi atau masyarakat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif, sambil memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan bersama yang terjaga.

6.2 Konsep Kebijakan Tarif

Kebijakan tarif merujuk pada aturan, prinsip, dan keputusan yang terkait dengan penetapan tarif atau harga atas barang dan jasa. Konsep kebijakan tarif melibatkan beberapa aspek penting:

1. **Tujuan Ekonomi:** Tujuan utama dari kebijakan tarif adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi, yaitu memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan tarif juga bisa digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, memperbaiki neraca perdagangan, dan mendorong investasi domestik.
2. **Keadilan Sosial:** Kebijakan tarif juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa tarif yang diberlakukan tidak memberatkan golongan masyarakat yang rentan dan memberikan perlindungan kepada mereka.

3. **Kompatibilitas dengan Kebijakan Perdagangan Internasional:** Dalam konteks globalisasi, kebijakan tarif harus sejalan dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati. Hal ini penting untuk mencegah konflik perdagangan dan memastikan keberlangsungan hubungan ekonomi antarnegara.
4. **Dampak Terhadap Industri dan Ekonomi Domestik:** Kebijakan tarif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri dalam negeri, termasuk industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, konsep kebijakan tarif harus mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi domestik.
5. **Transparansi dan Prediktabilitas:** Kebijakan tarif yang baik harus transparan dan dapat diprediksi oleh para pelaku ekonomi. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang tepat.
6. **Evaluasi dan Penyesuaian:** Konsep kebijakan tarif juga mencakup mekanisme evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi tersebut membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebijakan yang efektif dan tidak efektif, serta membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi.
7. **Pertimbangan Politis:** Kebijakan tarif juga seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politis, seperti kepentingan politik dari berbagai kelompok masyarakat, serta kebijakan luar negeri dan diplomasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pemerintah dapat merancang kebijakan tarif yang seimbang dan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

6.3 Konsep Kebijakan Non Tarif

Kebijakan non-tarif adalah kebijakan perdagangan yang tidak berkaitan dengan tarif atau bea masuk, tetapi lebih terkait dengan regulasi, standar, atau tindakan administratif lainnya

yang memengaruhi perdagangan barang dan jasa antarnegara. Konsep kebijakan non-tarif mencakup beberapa aspek penting:

1. **Standar Kualitas dan Keamanan:** Salah satu jenis kebijakan non-tarif adalah standar kualitas dan keamanan, yang mencakup persyaratan teknis, sanitasi, dan fitosanitasi yang harus dipenuhi oleh barang impor sebelum dijual di pasar domestik. Standar ini dapat mencakup persyaratan terhadap komposisi produk, kemasan, atau proses produksi.
2. **Hambatan Teknis:** Hambatan teknis termasuk regulasi teknis dan prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh importir atau eksportir untuk memperoleh izin atau sertifikasi tertentu sebelum barang mereka dapat diperdagangkan.
3. **Kuota Impor:** Kuota impor adalah pembatasan kuantitas barang impor yang dapat masuk ke dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kuota ini dapat ditetapkan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing atau untuk mempertahankan stabilitas harga di pasar domestik.
4. **Subsidi Ekspor:** Subsidi ekspor adalah bantuan keuangan atau insentif lain yang diberikan kepada produsen domestik untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional.
5. **Hambatan Non-Tarif Lainnya:** Selain dari yang disebutkan di atas, kebijakan non-tarif juga dapat mencakup berbagai hambatan lain seperti prosedur bea cukai yang rumit, birokrasi yang berlebihan, kebijakan pengadaan publik, dan peraturan investasi asing.
6. **Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat:** Beberapa kebijakan non-tarif juga ditujukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti larangan impor produk yang mengandung bahan kimia berbahaya atau dilarangnya impor produk yang berasal dari praktik produksi yang merusak lingkungan.
7. **Kepentingan Politik dan Diplomatik:** Kebijakan non-tarif juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan diplomatik, seperti sanksi perdagangan terhadap negara-

negara tertentu sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau ketegangan politik antarnegara.

Kebijakan non-tarif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional dan dapat menjadi sumber ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan non-tarif dengan cermat, mempertimbangkan tujuan ekonomi, kebutuhan konsumen, serta implikasi politik dan sosial yang mungkin timbul.

6.4 Manfaat Kebijakan Tarif dan non Tarif

Kebijakan tarif dan non-tarif memiliki berbagai manfaat yang dapat memengaruhi ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa manfaat dari kedua jenis kebijakan:

Manfaat Kebijakan Tarif:

1. **Perlindungan Industri Dalam Negeri:** Tarif dapat memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang lebih murah. Hal ini dapat membantu industri dalam negeri untuk berkembang dan bersaing di pasar domestik.
2. **Pendapatan untuk Pemerintah:** Tarif dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Pendapatan dari tarif dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, infrastruktur, atau kegiatan pemerintah lainnya.
3. **Pengaturan Neraca Perdagangan:** Tarif dapat digunakan untuk mengatur neraca perdagangan suatu negara dengan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Hal ini dapat membantu mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. **Mendorong Investasi dalam Negeri:** Perlindungan yang diberikan oleh tarif dapat mendorong investasi dalam negeri karena membuat produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik.

Manfaat Kebijakan Non-Tarif:

1. Standar Kualitas dan Keamanan: Kebijakan non-tarif yang berfokus pada standar kualitas dan keamanan dapat melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau berkualitas rendah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan impor.
2. Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat: Beberapa kebijakan non-tarif bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan melarang impor produk yang mengandung bahan kimia berbahaya atau yang diproduksi dengan praktik yang merusak lingkungan.
3. Mendorong Inovasi dan Penelitian: Kebijakan non-tarif seperti insentif fiskal atau subsidi untuk industri tertentu dapat mendorong inovasi dan penelitian di sektor-sektor strategis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam perekonomian global.
4. Melindungi Industri Tertentu: Kebijakan non-tarif dapat digunakan untuk melindungi industri tertentu dari persaingan asing yang tidak adil, seperti dumping atau subsidi yang merugikan.

Kedua jenis kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan melindungi kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu negara. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan kebijakan tarif dan non-tarif harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

6.5 Implementasi Kebijakan Tarif dan non Tarif di Indonesia

Implementasi kebijakan tarif dan non-tarif di Indonesia berlangsung di bawah berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawasan

Obat dan Makanan (BPOM). Berikut adalah beberapa contoh implementasi kebijakan tarif dan non-tarif di Indonesia:

Implementasi Kebijakan Tarif:

1. **Pembatasan Tarif Impor:** Pemerintah Indonesia sering menggunakan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Tarif impor diterapkan untuk berbagai jenis barang, seperti elektronik, tekstil, dan kendaraan bermotor.
2. **Pengenaan Tarif Diferensial:** Indonesia menerapkan tarif impor yang berbeda-beda untuk barang-barang tertentu berdasarkan negara asal atau jenis barang. Hal ini dapat berdampak pada kompetitivitas produk dari berbagai negara.
3. **Tarif Preferensial:** Indonesia juga menerapkan tarif preferensial untuk negara-negara mitra dagang tertentu, seperti ASEAN, melalui perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Implementasi Kebijakan Non-Tarif:

1. **Standar Kualitas dan Keamanan:** BPOM bertanggung jawab untuk menetapkan standar kualitas dan keamanan bagi produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Standar ini meliputi persyaratan registrasi, label, dan pengujian produk.
2. **Kuota Impor:** Pemerintah Indonesia kadang-kadang menerapkan kuota impor untuk barang-barang tertentu guna mengatur jumlah impor dan melindungi produsen dalam negeri.
3. **Sertifikasi dan Lisensi:** Beberapa industri di Indonesia memerlukan sertifikasi atau lisensi khusus sebelum mereka dapat memproduksi atau mengimpor barang tertentu, seperti industri farmasi dan makanan.
4. **Pembatasan Ekspor:** Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan non-tarif untuk membatasi ekspor barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau untuk menjaga stabilitas harga.

Implementasi kebijakan tarif dan non-tarif di Indonesia sering menjadi fokus perdebatan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika perdagangan global, kebutuhan industri dalam negeri, serta aspirasi untuk meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

6.6 Dampak Kebijakan Tarif dan non Tarif

Teori perdagangan internasional bermula dari sudut pandang merkantilisme yang menyatakan bahwa inti perdagangan internasional terletak pada kemampuan mencapai surplus pendapatan pada transaksi berjalan. Produksi dalam negeri dan ekspor harus didorong melalui subsidi dan fasilitas pemerintah. Di sisi lain, impor harus dibatasi oleh hambatan pelindung. Tujuan utamanya adalah mencapai surplus perdagangan luar negeri. Teori ini mendapat kritik, sehingga akhirnya teori perdagangan internasional secara umum yang masih berkembang hingga saat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) teori klasik, (2) teori modern, dan (3) teori keunggulan kompetitif. Model bisnis klasik kemudian dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Heckscher dan Bertil Ohlin yang dikenal dengan teori Heckscher-Ohlin (Halwani dan Tjiptoherijanto 1993; Salvatore 1995; Sukkamananto 2007; Oktaviani dan Novianti 2009; Apridar 2012).

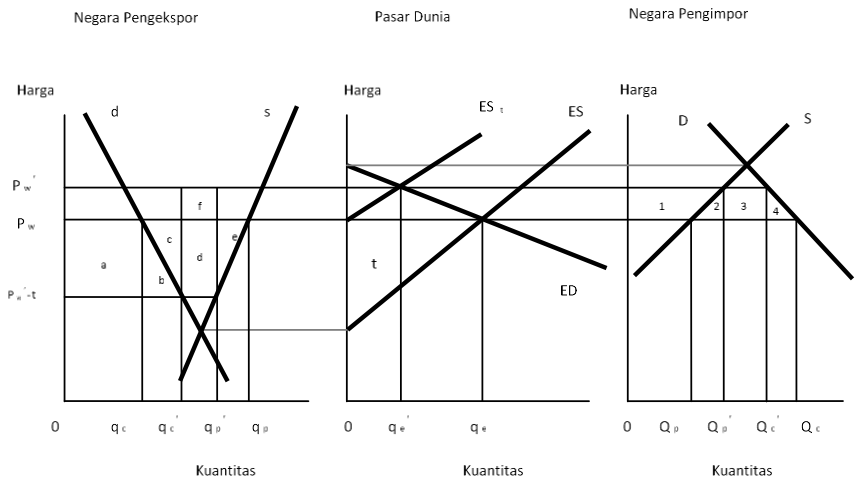
Ada dua alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional. Pertama, suatu negara melakukan perdagangan karena setiap negara berbeda. Negara, seperti halnya individu, dapat memperoleh manfaat dari perbedaan tersebut dengan sepakat untuk menciptakan produk yang bermanfaat. Kedua, suatu negara melakukan perdagangan untuk mendapatkan skala ekonomi dalam produksinya. Jika setiap negara hanya memproduksi jenis produk tertentu, setiap negara dapat memproduksi produk dalam skala yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan jika negara tersebut mencoba memproduksi semua produk yang dibutuhkan (Krugman dan Obstfeld 2003).

Kebijakan perdagangan dapat dilaksanakan baik pada sektor ekspor maupun impor. Tarif adalah bentuk kebijakan perdagangan tertua dan penghalang perdagangan paling transparan, dan sering kali digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah. Ada dua jenis pajak, yaitu pajak ekspor (bea keluar/pajak ekspor) dan pajak impor (pajak impor). Pajak ekspor adalah pajak tidak langsung yang dipungut atas barang ekspor. Besaran pajak ekspor berbeda-beda tergantung kebijakan yang diterapkan pemerintah (Sukmananto 2007). Penerapan pajak ekspor pada negara-negara besar akan menyebabkan penurunan harga produk, penurunan produksi dalam negeri, peningkatan konsumsi dalam negeri, dan penurunan volume ekspor. Sebaliknya, di negara-negara pengimpor, kenaikan harga menyebabkan peningkatan produksi dan penurunan konsumsi, serta penurunan volume impor.

Pengenaan pajak ekspor terhadap negara-negara kecil akan mengakibatkan harga yang diterima produsen dalam negeri lebih rendah dibandingkan harga dunia sesuai dengan besaran pajak yang diterapkan (Herjanto 2003). Dampak penerapan kebijakan pajak ekspor dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. Pengenaan pajak ekspor terhadap suatu produk di negara pengekspor, dengan asumsi negara tersebut merupakan negara besar, akan menyebabkan penurunan harga barang dalam negeri, peningkatan biaya ekspor, peningkatan konsumsi dalam negeri, dan peningkatan produksi dalam negeri, menurun akibat berkurangnya volume ekspor dan pengumpulan pajak pemerintah. Sedangkan di negara pengimpor, harga produk meningkat, produksi dalam negeri meningkat, konsumsi menurun sehingga menyebabkan penurunan impor. Dampak penerapan pajak ekspor terhadap kesejahteraan dapat dianalisis dengan mempertimbangkan perubahan surplus konsumen, surplus produsen, pendapatan pemerintah, kesejahteraan nasional, dan kesejahteraan agregat.

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa secara umum dampak penerapan pajak ekspor adalah menurunkan kesejahteraan global. Kesejahteraan negara pengekspor dan pengimpor ditentukan oleh elastisitas penawaran dan permintaan. Pengenaan pajak impor oleh negara pengimpor pada dasarnya

mempunyai dampak ekonomi yang sama dengan pengenaan pajak ekspor di negara pengekspor. Tujuan utama pengenaan tarif adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari rendahnya harga akibat persaingan impor. Pengenaan tarif terhadap produk impor akan meningkatkan harga yang diterima produsen dalam negeri dan harga produk impor di negara yang mengenakan tarif akan meningkat. Kenaikan harga ini akan meningkatkan produksi barang impor namun konsumsi akan menurun. Oleh karena itu, tarif menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diimpor ke negara yang mengenakan tarif (Kustiari 2013). Gambar 6.2 menunjukkan dampak penerapan pajak impor. Dampak dari pengenaan pajak impor terhadap suatu produk di negara pengekspor, katakanlah negara besar, adalah harga produk tersebut turun sehingga menyebabkan penurunan volume ekspor, sedangkan di negara pengimpor harga produk tersebut naik, turun dalam konsumsi, meningkatkan output nasional, mengurangi volume impor dan pendapatan pemerintah dari bea masuk. Dampak penerapan tarif impor terhadap kesejahteraan dapat dianalisis dengan mempertimbangkan perubahan surplus konsumen, surplus produsen, pendapatan pemerintah, kesejahteraan nasional, dan kesejahteraan global. Tabel 6.2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dampak penerapan tarif terhadap impor akan menurunkan kesejahteraan global. Kesejahteraan negara pengekspor dan pengimpor ditentukan oleh elastisitas penawaran dan permintaan.



Gambar 6.2. Dampak pemberlakuan pajak ekspor
Sumber: Tweeten (1992)

Tabel 6.2. Dampak kebijakan pemberlakuan pajak ekspor terhadap kesejahteraan masyarakat di negara pengeksport dan pengimpor

Jenis perubahan	Negara pengeksport	Negara pengimpor
Surplus konsumen	$a + b$	$-1 - 2 - 3 - 4$
Surplus produsen	$-a - b - c - d - e$	1
Penerimaan pemerintah	$d + f$	---
Kesejahteraan nasional	$-c - e + f$	$-2 - 3 - 4$
Kesejahteraan dunia (karena $f = 3$)	$-c - e - 2 - 4$	

Kebijakan tarif dan non-tarif memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak dari kedua jenis kebijakan tersebut:

Dampak Kebijakan Tarif:

1. **Proteksi Industri Dalam Negeri:** Tarif dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing dengan membuat barang impor lebih mahal. Hal ini bisa memberikan insentif bagi produsen dalam negeri untuk memproduksi lebih banyak dan meningkatkan lapangan kerja.
2. **Dampak Terhadap Konsumen:** Tarif dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi bagi konsumen domestik. Ini bisa mengurangi daya beli mereka dan membatasi akses terhadap barang-barang tertentu.
3. **Perang Dagang:** Kebijakan tarif bisa memicu perang dagang antara negara-negara karena respon dari negara lain yang menerapkan tarif serupa, membatasi akses pasar bagi ekspor negara lain.

Dampak Kebijakan Non-Tarif:

1. **Hambatan Perdagangan:** Kebijakan non-tarif seperti kuota impor, standar kualitas, dan persyaratan teknis bisa menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Hal ini dapat mengurangi volume perdagangan dan meningkatkan biaya impor.
2. **Proteksi Lingkungan dan Kesehatan:** Beberapa kebijakan non-tarif ditujukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan menetapkan standar tertentu terhadap produk impor. Ini bisa meningkatkan kualitas produk yang beredar di dalam negeri namun juga dapat meningkatkan biaya produksi.
3. **Kompleksitas Administrasi:** Kebijakan non-tarif seringkali lebih sulit untuk diterapkan dan memerlukan administrasi yang lebih kompleks daripada tarif. Ini dapat menyulitkan pelaku usaha, terutama para eksportir dan importir.

Secara keseluruhan, baik kebijakan tarif maupun non-tarif memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian dan perdagangan internasional. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika merancang kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa kebijakan

tersebut memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian secara keseluruhan.

6.7 Hambatan Kebijakan Tarif dan non Tarif

Hambatan perdagangan yang paling nyata secara historis adalah tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Ditinjau dari aspek asal komoditi ada 2 macam tarif yakni tarif ekspor (export tariff) dan tarif impor (import tariff). Tarif impor adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif impor berdampak pada penurunan konsumsi domestik dan kenaikan produksi domestik. Berkurangnya volume impor akibat tarif impor tercipta pendapatan tambahan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, serta terjadinya retribusi pendapatan dari konsumen domestik. Sebaliknya ekspor merupakan pajak untuk suatu komoditi yang di ekspor (Salvatore 1997). Tarif yang diberlakukan pada barang-barang impor bertujuan untuk dapat meningkatkan harga domestik produksi impor yang membuat produk domestik bisa berkompetisi. Tarif impor akan dibebankan pada harga jual barang atau jasa yang akan dibeli konsumen, sehingga menyebabkan harga barang atau jasa bertambah tinggi. Di pasar domestik harga yang berada di pasar adalah harga ekspor ditambah tarif. Jadi tarif atau bea masuk adalah salah satu cara untuk memberi proteksi terhadap industri dalam negeri.

Jenis-jenis tarif ditinjau dari mekanisme perhitungannya ialah :

1. *Bea ad valorem* (bea harga), pajak yang dikenakan berdasarkan angka presentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor, misalnya suatu negara memungut tarif 25% atas nilai atau harga dari setiap unit mobil diimpor.
2. *Bea specific*, pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor.
3. *Bea compound (bea specific ad valorem)*, pajak yang merupakan kombinasi antara sistem bea ad valorem dan bea specific

Sistem tarif yang umum dilakukan oleh tiap negara dan sudah disepakati dalam pengenaan tarif adalah (Amir 2003):

1. Tarif Tunggal (*Single column tariff*), yaitu suatu tarif untuk satu jenis komoditi yang besarnya (persentasenya) berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja, tanpa kecuali.
2. Tarif Umum/Konvensional (*General/Conventional Tariff*), yaitu satu tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain, lazim juga dikenal sebagai tarif berkolom-ganda (*two-column tariff*).
3. Tarif Preferensi (*Preferential Tariff*), yaitu salah satu tarif yang merupakan pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud dengan tarif preferensi adalah tarif GATT yang persentasinya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi nol persen (zero) yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor.

Menurut (Rastikarany 2008) Kebijakan tariff barrier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:

1. Tarif rendah antara 0%-5%. Tarif ini dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, dan alat-alat militer;
2. Tarif sedang antara 5%-20%. Tarif ini dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup produksi di dalam negeri; dan
3. Tarif tinggi di atas 20%. Tarif ini dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

Tarif dan bea masuk pada hakekatnya merupakan tindakan diskriminatif yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain melindungi produk dalam negeri dari persaingan dengan produk sejenis asal impor,

meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang tertentu, dan lain-lain. Penggunaan tarif bea masuk yang ditujukan untuk melindungi produk dalam negeri sangat besar pengaruhnya terhadap globalisasi

Meskipun kebijakan tarif dan non-tarif dapat memberikan berbagai manfaat, terdapat pula berbagai hambatan yang perlu diperhatikan:

Hambatan Kebijakan Tarif:

1. **Dampak Terhadap Konsumen:** Tarif impor dapat meningkatkan harga barang-barang konsumen, terutama jika barang tersebut tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri. Hal ini dapat menyebabkan biaya hidup meningkat bagi konsumen.
2. **Balas Dendam:** Penerapan tarif impor oleh satu negara dapat memicu retaliasi dari negara-negara lain, yang pada akhirnya dapat berujung pada perang tarif dan merugikan perdagangan internasional secara keseluruhan.
3. **Mendorong Proteksionisme:** Kebijakan tarif yang berlebihan atau tidak adil dapat mendorong proteksionisme ekonomi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan perdagangan global dan inovasi ekonomi.
4. **Korupsi dan Penyalahgunaan:** Penerapan tarif juga rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam proses penetapan tarif dan pungutan bea cukai.

Hambatan non-tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Salah satu intervensi pemerintah untuk mengendalikan perdagangan internasional adalah dengan menggunakan hambatan non-tarif. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pembatasan melalui subsidi terhadap produk dalam negeri atau kuota atau pembatasan berdasarkan jumlah barang termasuk pengurangan tarif terhadap produk dengan kuota tertentu, persyaratan khusus perizinan, embargo, serta standardisasi dan label produksi untuk produk dalam negeri.

Penerapan pajak dan pembatasan ini terutama berdampak signifikan terhadap produk dalam negeri (Valles 2013). Dalam hal ini, pemerintah berupaya melindungi produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor. Dengan diberlakukannya pajak khusus pada barang impor, hal ini tentunya akan berdampak pada harga barang tersebut yang jauh lebih mahal dibandingkan barang dalam negeri. Oleh karena itu, produk lokal tersebut selalu laris manis di pasaran. Namun terkadang masih terjadi negara importir berani mematok harga jual yang sangat rendah di luar negeri. Seperti halnya Tiongkok, negara tersebut juga melakukan kebijakan dumping, yaitu menjual barang di negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan di negaranya sendiri. Menurut penelitian (Jamilah 2016), Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dalam kerangka *China-ASEAN Free Trade Agreement* (CAFTA) yang ditunjukkan melalui penerapan kebijakan penghapusan bea masuk atas impor antara Indonesia dan Tiongkok dapat meningkatkan permintaan impor Indonesia yang berdampak pada penurunan harga.

Jika kebijakan penghapusan bea masuk impor diterapkan pada saat perekonomian Tiongkok sedang resesi dan depresiasi yuan berdampak pada menurunnya permintaan impor Tiongkok dari Indonesia, mengakibatkan penurunan ekspor Indonesia ke Tiongkok, kecuali untuk ekspor pertanian. Menurut Kariyasa (2017), kebijakan pajak impor berdampak pada distribusipendapatan di kalangan pelaku pasar. Surplus konsumen menurun, surplus produsen meningkat, begitu pula kerugian sosial (akibat inefisiensi produksi dan inefisiensi ekonomi) dan dikenakan bea masuk yang tinggi. Namun pendapatan masyarakat akan meningkat seiring dengan kenaikan tarif yang diterapkan, dan setelah mencapai keseimbangan akan menurun secara bertahap dan berlawanan arah dengan kenaikan tarif. Secara keseluruhan, terdapat pajak impor. kebijakan tersebut mengurangi kesejahteraan. Agar daya saing global tetap terjaga, efisiensi biaya produksi harus ditingkatkan sehingga tarif impor dapat diturunkan secara

bertahap hingga nol, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal dapat tercapai.

Hambatan Kebijakan Non-Tarif:

1. **Biaya Administratif yang Tinggi:** Implementasi kebijakan non-tarif seringkali memerlukan biaya administratif yang tinggi bagi perusahaan, seperti biaya sertifikasi, pengujian produk, dan prosedur bea cukai yang rumit.
2. **Ketidakpastian:** Perubahan regulasi atau standar kualitas dan keamanan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional.
3. **Diskriminasi:** Kebijakan non-tarif yang tidak adil atau tidak transparan dapat menciptakan diskriminasi terhadap produsen atau negara tertentu, yang dapat menghambat akses ke pasar internasional.
4. **Potensi Perlambatan Perdagangan:** Beberapa kebijakan non-tarif, seperti kuota impor atau persyaratan lisensi, dapat memperlambat proses perdagangan dan menghambat aliran barang dan jasa di pasar internasional.
5. **Kesulitan Implementasi:** Kadang-kadang, kebijakan non-tarif sulit diimplementasikan dengan konsisten dan efektif, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hambatan ini saat merancang dan menerapkan kebijakan tarif dan non-tarif. Pendekatan yang seimbang dan transparan dapat membantu mengurangi risiko dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S. (2003). Ekspor dan Impor (Teori dan Penerapannya). Seri Bisnis Internasionalno.13. Jakarta : Penerbit PPM.
- Herjanto E. 2003. Dampak kebijakan perdagangan luar negeri terhadap kinerja sektor agroindustri Indonesia [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Kariyasa, Ketut. (2017). Dampak Tarif Impor Dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Beras Indonesia Di Pasar Dunia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Krugman PR, Obstfeld M. 2003. International economics: theory and policy. 6th ed. Massachusetts (US): Addison-Wesley.
- Kustiari R, Dermoredjo SK. 2013. Proteksi tarif optimal untuk kedelai di Indonesia. J Agrovos. 15(1):148-159.
- Jamilah. (2012). Dampak Perlambatan Ekonomi China Dan Devaluasi Yuan Terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan: IPB ISSN 1411 – 0393. View publication stats.
- Rastikarany, Hikmah. (2008). Analisis Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Non Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Tuna Indonesia: Repository IPB
- Salvatore, D. (1997). Ekonomi Internasional. Jakarta : Erlangga.
- Sukmananto B. 2007. Dampak kebijakan perdagangan terhadap kinerja ekspor produk industri pengolahan kayu primer Indonesia [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tweeten L. 1992. Agricultural trade: principles and policies. San Fransisco (US): West view Press.
- Valles et al. (2013). Journal of Translational Medicine. <http://www.translational-medicine.com/content/11/1/72>.

BAB 7

KARTEL INTERNASIONAL DAN DISKRIMINASI HARGA

Oleh I Nyoman Wahyu Widiana

7.1 Konsep Kartel Internasional

Kartel adalah organisasi formal penjual yang bersama-sama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk untuk memaksimalkan keuntungan industri. Sedangkan UU Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan perjanjian kartel adalah sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur harga. Produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Industri kartel serupa dengan kasus oligopoli, misalnya ada satu perusahaan dalam industri yang berhasil dan menaikkan harga di atas biaya total rata-rata jangka panjang, untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kartel adalah persekongkolan atau aliansi antara beberapa produsen produk sejenis dengan tujuan untuk mengendalikan produksi, harga dan penjualannya, serta memperoleh posisi monopoli. Oleh karena itu, kartel merupakan suatu bentuk monopoli yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha atau produsen yang masing-masing mandiri secara hukum dan ekonomi, bersatu untuk menguasai produksi, menentukan harga dan/atau bidang pemasaran barang dan/atau jasa, sehingga terjadilah monopoli tidak ada persaingan lebih lanjut di antara mereka. Kartel seringkali diprakarsai oleh asosiasi perdagangan (asosiasi profesional) dan anggotanya. Kartel seringkali berkembang di pasar dengan struktur oligopolistik. Dengan struktur pasar yang hanya berjumlah penjual (pelaku usaha), maka pelaku usaha akan dengan mudah bersatu, bekerja sama dan mendominasi serta

menguasai sebagian besar pangsa pasar (Yuliya, 2009). Kartel akan berdampak pada berkurangnya atau melemahnya persaingan (reduksi kompetisi).

Kartel adalah suatu perjanjian atau perjanjian yang dilakukan oleh badan usaha dengan pesaingnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Menurut Keputusan Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani oleh badan ekonomi dengan badan ekonomi pesaing dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa/atau jasa, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama adalah adanya perjanjian kolusi antar badan usaha yang akan ditandatangani menjadi alat bukti atau alat bukti utama dalam kasus komersial. Para pelaku bekerja sama untuk mempengaruhi pemasaran barang dan/atau jasa. Kedua, adanya persekongkolan antar pelaku ekonomi untuk mempengaruhi pemasaran produksi barang dan/atau jasa. Dalam kondisi normal, jika diperoleh bukti langsung, pembuktian tidak akan sulit. Namun hal ini menjadi sulit jika tidak ditemukan kesepakatan atau dokumen yang membuktikan bahwa entitas komersial telah mencapai kesepakatan. Kartel dapat menimbulkan akibat berupa praktek monopoli dan merugikan persaingan perdagangan yang sehat. Dampak ini tentu akan merugikan konsumen, pemerintah, dan badan usaha itu sendiri.

Kartel menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain sulitnya membuktikan adanya perjanjian kartel. Memang dalam perkembangannya, pelaku ekonomi dan pesaingnya melakukan perjanjian satu sama lain (rumah kartel) secara tidak tertulis, sehingga KPPU kesulitan menemukan bukti telah ditandatanganinya perjanjian. Kartel, hal ini tidak sederhana yang dinyatakan dalam undang-undang yang mengaturnya. Dalam praktiknya, perkara-perkara yang bersifat hukum biasanya digolongkan sebagai kartel dan biasanya dalam realitas ekonomi riil belum termasuk kartel. Demikian pula sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya sah menurut hukum (*de jure*) ternyata (*defacto*) sudah merupakan perbuatan kartel. Fenomena di atas perlu dikaji lebih mendalam, khususnya

terkait dengan pembuktian adanya unsur kartel dalam konteks penerapan hukum kartel, menilai keberadaan kartel dalam kenyataan, serta menilai dampak kartel terhadap hukum kartel dengan kompetitor komersial.

Kartel atau praktik kartel juga disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Dagang, yang menyatakan: Pelaku perdagangan dilarang membuat perjanjian dengan pedagang saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penerapan kartel di Indonesia merupakan suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum karena merupakan perilaku monopoli atau bentuk perilaku persaingan usaha tidak sehat. Memahami kartel juga memerlukan pemahaman prinsip dasar atau makna dasar perilaku monopoli. Pengertian monopoli tidak lagi terfokus pada jumlah pelaku usaha atau produsen tetapi pada perilakunya dalam mengendalikan harga dan distribusi produksi atau kapasitas produksi. Oleh karena itu, perilaku monopoli dapat dijumpai pada struktur persaingan yang terdiri dari sejumlah perusahaan, biasanya 2 sampai 5 perusahaan besar, atau pada struktur pasar persaingan monopolistic. Pasar yang kompetitif dengan jumlah konsumen yang cukup besar namun produsen yang jumlahnya sedikit jelas menunjukkan adanya praktik monopoli. Munculnya kegiatan kartel atau fidusia tidak lain hanyalah perwujudan kekuasaan monopoli.

Kartel internasional adalah persekongkolan antara beberapa perusahaan dari negara-negara yang berbeda untuk mengontrol produksi, distribusi, dan harga suatu barang atau jasa secara global. Konsep ini sering kali melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara dan berusaha untuk mengatur pasar agar menguntungkan mereka secara kolektif. Berikut adalah beberapa ciri dan konsep terkait dengan kartel internasional:

1. **Kerjasama lintas negara:** Kartel internasional melibatkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dari negara-

negara yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan pasar global.

2. **Pembagian pasar:** Anggota kartel internasional mungkin melakukan pembagian wilayah atau pasar di antara mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan langsung dan memastikan bahwa setiap perusahaan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan.
3. **Penentuan harga:** Salah satu tujuan utama kartel internasional adalah menentukan harga jual barang atau jasa secara bersama-sama. Dengan demikian, mereka dapat menghindari persaingan harga yang menguntungkan konsumen namun merugikan keuntungan mereka.
4. **Kesepakatan rahasia:** Kegiatan kartel internasional sering dilakukan secara rahasia karena melanggar hukum persaingan di banyak negara. Kesepakatan antara anggota kartel sering tidak diumumkan secara terbuka agar tidak menarik perhatian pihak berwenang.
5. **Pelanggaran hukum antitrust:** Kartel internasional sering melanggar undang-undang antitrust di berbagai negara. Undang-undang antitrust bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan kartel yang merugikan persaingan dan konsumen.
6. **Penegakan hukum:** Pemerintah dan badan pengatur di berbagai negara berusaha untuk mencegah dan menindak kartel internasional. Penegakan hukum terhadap kartel ini sering kali melibatkan investigasi, denda, dan tindakan hukum lainnya.
7. **Kontrol Pasar:** Kartel internasional bertujuan untuk mengendalikan pasokan barang atau jasa di pasar global. Ini dapat dilakukan dengan mengatur produksi, distribusi, dan harga secara kolaboratif.
8. **Kesepakatan Rahasia:** Karena kegiatan kartel internasional sering kali melanggar hukum, kesepakatan antara anggotanya sering dilakukan secara rahasia. Hal ini membuat deteksi dan penegakan hukum terhadap kartel internasional menjadi sulit.

Kartel internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, persaingan pasar, dan kesejahteraan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan badan pengatur di berbagai negara sering kali berusaha untuk mencegah dan menindak kartel internasional demi memastikan adanya persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen.

7.2 Bentuk-bentuk Kartel

Jenis perjanjian horizontal yang paling dianggap paling merugikan atau bahkan dapat berakibat mematikan persaingan adalah kartel. Terdapat banyak bentuk kartel yang memungkinkan usaha yang bersaing membatasi persaingan melalui kontrak di antaranya yaitu:

1. Kartel Harga Pokok (prijskartel)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggota menciptakan peraturan di antara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan tingginya laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

2. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas tanggung jawab sendiri.

3. Kartel Kontingentering

Di dalam jenis kartel ini, masing-masing anggota kartel diberikan jatah dalam banyaknya produksi yang diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah yang sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah, namun jika melakukan yang sebaliknya maka akan di denda. Maksud dari

pengaturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan barang, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontingentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang dengan cara menahan dan mengatur ketersediaan barang tetap dalam kekuasaannya.

4. Kartel Kuota

Kartel kuota adalah pembagian volume pasar di antara para pesaing usaha. Di sini ditetapkan volume produksi dan atau penjualan tertentu atau ditentukan batas maksimal untuk volume produksi dan/atau penjualan yang diperbolehkan, dan kuota tersebut biasanya dijamin oleh pengaturan pasokan atau pembayaran pengimbangan dalam hal volume produksi atau pemasaran yang telah ditetapkan dilewati. Kartel kuota bertujuan untuk menaikkan tingkat harga.

5. Kartel Standar atau Kartel Tipe

Kartel standar dan kartel tipe adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha mengenai standar, tipe, jenis atau ukuran tertentu yang harus ditaati. Perjanjian tersebut mengakibatkan pembatasan produksi karena pelaku usaha dihalangi untuk menggunakan standar dan tipe lain. Perjanjian tersebut dengan cara yang khas tidak hanya menghambat persaingan kualitas, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi persaingan harga di antara para anggota kartel.

6. Kartel Kondisi

Kartel kondisi adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha mengenai standarisasi ketentuan perjanjian, yang tidak berkaitan langsung dengan harga, tetapi berkaitan dengan unsur lain dalam perjanjian bersangkutan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menghambat penjualan, oleh karena anggota kartel tidak dimungkinkan untuk membuat perjanjian lain dengan mitra kontrak individu. Setiap kondisi kurang lebih mempengaruhi harga hal mana dapat terjadi melalui mekanisme pasar, atau dengan memperhatikan pembagian risiko dari segi kalkulasi (tanggung jawab dan jaminan) serta melalui kondisi

tambahan yang harus dipenuhi (pengemasan, pengiriman, pelayanan).

7. Kartel Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan-penetapan di dalam syarat-syarat penjualan misalnya kartel yang menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, dan/atau menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan loco gudang, Fob, C&F, Cif, embalase atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Tujuan yang dimaksud oleh para anggota adalah keseragaman di antara anggota kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijakan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan di antara mereka.

8. Kartel Laba atau Pool

Di dalam kartel laba dan kartel pool ini, anggota kartel biasanya menemukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel akan dibagikan di antara mereka dengan perbandingan tertentu pula.

9. Kartel Rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang juga disebut kartel wilayah pemasaran untuk mereka. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Kartel rayon juga menentukan suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

10. Kartel Penjualan atau Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal ialah kantor penjualan pusat. Melalui pemusatan penjualan seperti ini, maka persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan.

7.3 Konsep Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga adalah strategi pemasaran di mana penjual menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada kelompok konsumen yang berbeda. Konsep ini dibangun atas asumsi bahwa kelompok konsumen memiliki tingkat kepekaan harga yang berbeda, dan penjual dapat memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan tingkat kepekaan harga masing-masing kelompok. Diskriminasi harga adalah praktik di mana penjual menetapkan harga yang berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Konsep ini didasarkan pada pengenalan bahwa berbagai pelanggan memiliki tingkat sensitivitas harga yang berbeda dan bahwa penjual dapat memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan karakteristik dan preferensi masing-masing pelanggan.

Secara umum diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga jual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda dengan tujuan diantaranya meningkatkan hasil penjualan (total revenue) sekaligus laba. Diskriminasi harga diterapkan karena perusahaan melihat adanya perbedaan karakteristik permintaan yang dihadapinya (Froeb, Shor, & Ward, 2014). Perbedaan harga dapat ditetapkan berdasarkan perbedaan segmen konsumen, pasar, kuantitas pembelian atau perbedaan waktu. Diskriminasi harga terjadi ketika produk atau jasa yang identik dijual ke segmen konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda (Awh, 1988). Diskriminasi selalu didasarkan pada prinsip bahwa hal-hal yang sama atau serupa diperlakukan secara tidak setara. Diskriminasi harga memiliki tiga tingkatan (Kotler dan Keller, 2006). Pada tingkat pertama, penjual menetapkan harga secara individual untuk setiap konsumen berdasarkan intensitas persaingan. Kedua, penjual menetapkan harga yang lebih rendah sebesar bagi pembeli yang membeli dalam jumlah lebih banyak sebesar. Ketiga, penjual menetapkan harga yang berbeda untuk kelompok pembeli yang berbeda, seperti: penetapan harga berdasarkan segmen pelanggan, penetapan harga berdasarkan bentuk produk,

penetapan harga berdasarkan gambar, penetapan harga berdasarkan saluran, penetapan harga lokasi, dan penetapan harga waktu. Untuk melakukan diskriminasi harga di pasar, harus mengikuti asumsi-asumsi berikut:

1. Pasar harus tersegmentasi dengan jelas dan masing-masing pasar harus menunjukkan intensitas permintaan yang berbeda.
2. Anggota segmen harga rendah tidak dapat menjual kembali barang ke segmen harga tinggi.
3. Pesaing tidak dapat menjual dengan harga lebih rendah di segmen perusahaan yang harganya mahal.
4. Biaya segmentasi pasar dan kebijakan pasar tidak boleh melebihi tambahan pendapatan dari diskriminasi harga.
5. Praktik diskriminatif tidak boleh merugikan konsumen dan harus sah menurut hukum.

Mendukung pandangan Kotler dan Keller, buatlah asumsi tentang bagaimana diskriminasi harga dapat berhasil, khususnya: Sifat barang atau jasa memungkinkan terjadinya diskriminasi harga. Mereka dapat menetapkan harga berdasarkan kemampuan membayar pelanggan, dengan orang kaya dikenai harga tinggi, sementara orang miskin mendapat manfaat dari penurunan harga. Jika permintaan dan elastisitas permintaan sama di kedua pasar, maka kebijakan tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan diskriminasi harga:

1. Diskriminasi Harga Berbasis Kepentingan: Harga yang berbeda dikenakan kepada konsumen berdasarkan tingkat kepentingan atau sensitivitas terhadap produk atau layanan. Misalnya, pelanggan yang lebih kaya atau lebih cenderung untuk membayar lebih bisa dikenai harga yang lebih tinggi.
2. Diskriminasi Harga Berbasis Segmentasi Pasar: Penjual membebankan harga yang berbeda kepada segmen pasar yang berbeda, seperti harga yang lebih tinggi untuk produk yang sama yang ditujukan kepada segmen pasar premium.
3. Diskriminasi Harga Berbasis Kuantitas: Diskriminasi harga bisa terjadi berdasarkan jumlah barang atau layanan yang

dibeli. Misalnya, harga per unit barang mungkin lebih murah jika konsumen membeli dalam jumlah besar.

4. Diskriminasi Harga Berbasis Identitas: Beberapa bisnis dapat menetapkan harga berdasarkan karakteristik spesifik dari pelanggan, seperti usia, jenis kelamin, atau status keanggotaan.
5. Diskriminasi Harga Berdasarkan Kelompok Konsumen: Penjual dapat mengenakan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Misalnya, penjual mungkin mengenakan harga yang lebih rendah kepada pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga, seperti pelajar atau warga lanjut usia, sementara mengenakan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga.
6. Diskriminasi Harga Berdasarkan Waktu: Penjual dapat membebankan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, harga mungkin lebih rendah pada waktu-waktu tertentu seperti selama jam sibuk atau musim liburan.
7. Diskriminasi Harga Berdasarkan Lokasi: Penjual dapat menetapkan harga yang berbeda berdasarkan lokasi geografis. Misalnya, harga di daerah perkotaan mungkin lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, mengingat perbedaan dalam daya beli dan kondisi pasar setempat.
8. Diskriminasi Harga Berdasarkan Kuantitas: Penjual dapat memberikan diskon harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Strategi ini dapat mendorong pembelian dalam jumlah besar dan membantu penjual dalam manajemen stok dan produksi.
9. Diskriminasi Harga Pribadi: Penjual dapat memberikan harga khusus kepada pelanggan tertentu berdasarkan karakteristik pribadi atau riwayat belanja mereka. Misalnya, penjual dapat memberikan diskon kepada pelanggan yang telah berlangganan atau yang memiliki program loyalitas.

Diskriminasi harga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan penjualan dan mengoptimalkan laba bagi penjual. Namun, implementasinya

harus memperhatikan berbagai faktor seperti keseimbangan antara harga yang adil dan kepercayaan konsumen. Juga, praktik diskriminasi harga harus sesuai dengan hukum persaingan dan regulasi konsumen yang berlaku di suatu negara.

7.3 Manfaat Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga

Kartel internasional dan diskriminasi harga adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks ekonomi dan bisnis. Meskipun keduanya dapat menghasilkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, mereka memiliki implikasi yang berbeda.

Manfaat Kartel Internasional:

1. **Kontrol Pasar:** Kartel internasional memungkinkan para anggotanya untuk mengontrol pasokan barang atau layanan tertentu di pasar global. Hal ini dapat membantu menghindari persaingan yang berlebihan dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan keuntungan yang tinggi.
2. **Stabilitas Harga:** Dengan mengatur produksi dan penawaran, kartel internasional dapat menciptakan stabilitas harga di pasar. Hal ini memberikan kepastian bagi produsen dan konsumen tentang harga barang atau layanan yang ditawarkan.
3. **Keuntungan Monopoli:** Anggota kartel dapat mencapai keuntungan monopoli dengan bekerja sama untuk mengontrol harga dan pasokan di pasar global. Ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi anggota kartel.
4. **Keuntungan Monopoli:** Kartel internasional dapat menghasilkan keuntungan monopoli bagi anggotanya dengan mengendalikan pasokan barang atau layanan tertentu di pasar global.
5. **Kontrol Harga:** Dengan mengendalikan produksi dan penawaran, anggota kartel dapat mengatur harga barang atau layanan untuk memaksimalkan keuntungan.
6. **Stabilitas Pasar:** Kartel internasional dapat menciptakan stabilitas pasar dengan mengatur produksi dan penawaran,

yang mengurangi fluktuasi harga dan ketidakpastian bagi produsen dan konsumen.

7. Pembagian Pasar: Kartel juga dapat membantu anggotanya dalam membagi pasar global menjadi wilayah yang dapat dikuasai, mengurangi persaingan antara mereka sendiri.

Manfaat Diskriminasi Harga:

1. Penyesuaian Kebutuhan Konsumen: Dengan menawarkan harga yang berbeda, produsen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok konsumen. Ini memungkinkan akses ke produk atau layanan bagi konsumen dengan tingkat pendapatan yang berbeda.
2. Pengelolaan Persediaan dan Produksi: Diskriminasi harga juga dapat membantu dalam mengelola persediaan dan produksi dengan menyesuaikan permintaan dari berbagai kelompok konsumen. Hal ini dapat membantu menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan.
3. Maksimalkan Pendapatan: Diskriminasi harga memungkinkan penjual untuk memaksimalkan pendapatan dengan menetapkan harga yang sesuai dengan tingkat keinginan dan kemampuan pembeli.
4. Pengoptimalan Kapasitas Produksi: Dengan menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda, produsen dapat mengoptimalkan kapasitas produksi mereka, memaksimalkan penggunaan sumber daya.
5. Pelanggan Terlayani Dengan Baik: Diskriminasi harga juga dapat memungkinkan pelanggan dengan tingkat keinginan dan kemampuan yang berbeda untuk memiliki akses ke produk atau layanan yang sama.

Namun, penting untuk diingat bahwa kedua konsep ini sering kali dilihat sebagai praktik yang tidak etis atau bahkan ilegal dalam banyak yurisdiksi. Kartel internasional dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan pasar dan dapat merugikan konsumen dengan menetapkan harga yang tidak wajar tinggi. Demikian pula, diskriminasi harga yang tidak adil bisa menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ketidakpuasan konsumen. Oleh karena itu, sementara kedua konsep ini dapat

memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, penting untuk mempertimbangkan implikasi etis, hukum, dan sosial dari praktik tersebut.

7.4 Implementasi Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga

Kartel merupakan perilaku anti-persaingan dan merupakan perjanjian kolusif formal. Anggota dapat membuat keputusan bersama, seolah-olah mereka adalah pemain individu di pasar. Ini adalah cara sederhana untuk mempertahankan keuntungan Anda. Persaingan nyata menyebabkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, membentuk kartel merupakan solusi terbaik untuk menghindari kerugian. Kartel mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jika muncul dalam rantai pasok, ia mempunyai hak monopoli atas kuantitas, kualitas, dan pasokan pasar. Anggota dapat menegosiasikan harga tinggi dengan menetapkan pasokan pasar. Mereka juga dapat mengatur kualitas produk di pasar. Perjanjian-perjanjian tersebut berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat dan perekonomian.

Pada akhirnya, hal ini mendistorsi berfungsinya pasar kompetitif secara normal. Karena mencari keuntungan, kartel akan berusaha mengubah surplus konsumen menjadi keuntungan produsen. Mereka juga dapat menyepakati cara menetapkan hambatan perdagangan yang tinggi. Kartel biasanya tidak bertahan lama, terutama di pasar dengan hambatan masuk yang rendah. Pendatang baru mengurangi keuntungan anggota. Pendatang baru bisa bergabung dengan kartel. Namun seiring bertambahnya jumlah anggota, komunikasi, negosiasi dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Motif egois juga menjadi alasan lain kegagalan kartel. Memang benar, para anggota terikat oleh kesepakatan bersama. Namun ketika keputusan kartel tidak konsisten, setiap anggota kartel mempunyai insentif ekonomi yang kuat untuk secara diam-diam melanggar perjanjian. Misalnya, kartel menetapkan batasan produksi. Beberapa anggota mungkin memilih untuk secara diam-diam meningkatkan output mereka. Mereka bisa

menjual dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dalam pertemuan tersebut, mereka kemungkinan besar akan mengatakan bahwa tingkat produksi mereka tetap sesuai dengan kesepakatan. Ada cara lain untuk melanggar perjanjian. Perusahaan anggota mungkin menawarkan persyaratan kredit yang lebih baik, pengiriman lebih cepat, atau layanan gratis terkait. Meskipun harga tetap pada tingkat kartel, perusahaan menawarkan penawaran yang lebih baik, sehingga konsumen dapat berpindah perusahaan.

Meskipun diskriminasi harga dan kartel internasional adalah praktik yang kontroversial dan sering kali dilarang oleh hukum persaingan di banyak negara, mereka kadang-kadang tetap diimplementasikan oleh perusahaan atau kelompok perusahaan.

Berikut adalah cara-cara implementasi keduanya:

Implementasi Kartel Internasional:

1. Kesepakatan dan Koordinasi: Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kartel internasional akan mencapai kesepakatan dan koordinasi untuk mengontrol produksi, pasokan, dan harga di pasar tertentu. Ini mungkin melibatkan pertemuan reguler, komunikasi yang teratur, dan pembagian wilayah atau pasar.
2. Penetapan Harga Bersama: Anggota kartel akan bekerja sama untuk menetapkan harga yang seragam atau minimal untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan harga dan menjaga keuntungan yang tinggi bagi anggota kartel.
3. Pembatasan Produksi: Kartel internasional sering kali akan membatasi jumlah produksi yang masing-masing anggota dapat hasilkan. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar, sehingga harga tetap tinggi.
4. Pembagian Pasar: Anggota kartel mungkin juga setuju untuk membagi pasar atau wilayah tertentu di antara mereka, sehingga masing-masing dapat mengendalikan bagian tertentu dari pasar tanpa adanya persaingan langsung.

5. **Koordinasi antara Produsen:** Produsen dari berbagai negara sepakat untuk membatasi produksi dan mengendalikan harga suatu produk.
6. **Pembagian Pasar:** Para anggota kartel dapat membagi pasar antara mereka, sehingga masing-masing dapat mengontrol wilayah tertentu tanpa saling bersaing.
7. **Penentuan Harga Minimum:** Kartel menetapkan harga minimum yang diterima oleh semua anggotanya untuk mencegah persaingan harga yang merugikan

Implementasi Diskriminasi Harga:

1. Segmentasi Pasar: Perusahaan akan mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti tingkat pendapatan, preferensi, atau kebutuhan. Mereka kemudian menyesuaikan harga produk atau layanan mereka sesuai dengan segmen pasar tersebut.
2. Penetapan Harga yang Berbeda: Perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama berdasarkan segmen pasar yang berbeda. Harga yang lebih tinggi mungkin diberlakukan kepada segmen pasar yang lebih mampu membayar atau lebih sensitif terhadap harga.
3. Program Diskon dan Promosi: Perusahaan dapat menawarkan diskon, kupon, atau promosi khusus kepada segmen pasar tertentu untuk meningkatkan penjualan di segmen tersebut tanpa mengurangi harga untuk segmen lainnya.

Ini terbagi menjadi beberapa bentuk:

1. Diskriminasi Harga Geografis: Penjual menetapkan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama di berbagai negara atau wilayah.
2. Diskriminasi Harga Waktu: Penjual menetapkan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama tergantung pada waktu pembelian.
3. Diskriminasi Harga Pelanggan: Harga berbeda-beda untuk pelanggan yang berbeda-beda, misalnya harga diskon untuk pelanggan setia atau harga premium untuk pelanggan baru.

Contoh Implementasi:

OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*):

1. Koordinasi Produksi: Negara-negara anggota OPEC sepakat untuk mengontrol produksi minyak bumi agar dapat mempengaruhi harga di pasar internasional.
2. Penentuan Harga: OPEC menetapkan harga minyak bumi dengan membatasi produksi agar permintaan tetap tinggi.
3. Dampak Harga: Harga minyak yang ditentukan oleh OPEC akan memengaruhi harga bahan bakar dan produk-produk terkait di seluruh dunia.

Penting untuk dicatat bahwa praktek-praktek ini sering kali ilegal dan diatur oleh hukum persaingan di berbagai negara. Perusahaan atau negara yang terlibat dalam kartel internasional dan diskriminasi harga dapat menghadapi sanksi hukum yang serius.

7.5 Dampak Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga

Dampak dari kartel internasional dan diskriminasi harga bisa sangat signifikan dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk konsumen, pesaing, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kedua praktik ini:

Dampak Kartel Internasional:

1. Harga yang Lebih Tinggi: Kartel cenderung menetapkan harga yang lebih tinggi daripada jika pasar beroperasi dalam kondisi persaingan yang sehat. Hal ini merugikan konsumen karena mereka harus membayar lebih untuk produk atau layanan yang sama.
2. Pengurangan Pilihan Konsumen: Kartel dapat membatasi inovasi dan variasi produk karena keputusan tentang harga dan produksi sering kali diambil untuk menjaga keuntungan kartel, bukan untuk memenuhi kebutuhan atau preferensi konsumen.
3. Kurangnya Inovasi: Persaingan sehat mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, dalam kartel, produsen mungkin tidak merasa perlu untuk melakukan inovasi atau meningkatkan

- kualitas produk karena mereka tidak menghadapi tekanan persaingan.
4. Penurunan Kesejahteraan Ekonomi: Kartel dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mereka menghalangi aliran modal dan investasi ke sektor-sektor yang lebih produktif.
 5. Ketidakstabilan Pasar: Kartel juga dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar karena keputusan kolektif mereka bisa menjadi reaktif terhadap faktor-faktor eksternal yang tidak dapat mereka prediksi.

Dampak Diskriminasi Harga:

1. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan: Diskriminasi harga dapat menciptakan ketidakadilan di antara konsumen, di mana orang-orang dengan akses yang lebih baik atau pengetahuan tentang diskon dapat memperoleh barang dengan harga lebih murah, sementara yang lain harus membayar lebih mahal.
2. Gangguan Persaingan: Diskriminasi harga dapat menyebabkan gangguan dalam persaingan yang sehat karena harga yang tidak merata dapat membuat pasar menjadi tidak stabil.
3. Penurunan Kepercayaan Konsumen: Jika konsumen merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil dalam hal harga, ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap merek atau perusahaan yang terlibat dalam praktik diskriminasi harga.
4. Mengurangi Efisiensi Pasar: Diskriminasi harga dapat menghambat efisiensi pasar dengan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian berdasarkan harga yang ditawarkan daripada berdasarkan nilai sebenarnya dari produk atau layanan tersebut.
5. Kesenjangan Ekonomi: Praktik diskriminasi harga juga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, dengan orang-orang dari kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah cenderung membayar lebih mahal daripada mereka yang lebih mampu.

Dalam banyak yurisdiksi, kartel internasional dan diskriminasi harga dianggap ilegal dan dikenakan sanksi hukum yang serius jika terbukti. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mempromosikan persaingan yang sehat di pasar.

7.6 Permasalahan Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga

Permasalahan yang terkait dengan kartel internasional dan diskriminasi harga mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang terkait dengan kedua praktik tersebut:

Permasalahan Kartel Internasional:

1. **Penekanan Persaingan:** Kartel internasional menghambat persaingan bebas di pasar global dengan membatasi produksi, mengontrol harga, dan membagi pasar. Hal ini menghambat efisiensi dan inovasi.
2. **Kenaikan Harga:** Konsumen sering menjadi pihak yang paling dirugikan karena kartel cenderung menaikkan harga produk mereka. Hal ini dapat mengakibatkan biaya hidup yang lebih tinggi dan mengurangi daya beli konsumen.
3. **Kurangnya Pilihan:** Kartel dapat membatasi variasi produk dan layanan yang tersedia untuk konsumen karena produsen lebih fokus pada mempertahankan keuntungan daripada memenuhi kebutuhan pasar.
4. **Gangguan terhadap Pasar yang Adil:** Kartel melanggar prinsip pasar yang adil dan persaingan yang sehat, yang merupakan asas penting dalam ekonomi pasar.
5. **Penyimpangan Hukum:** Kartel merupakan pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi karena melanggar undang-undang antitrust dan persaingan.
6. **Penekanan Persaingan:** Kartel mengurangi persaingan di pasar dengan mengontrol produksi, harga, dan alokasi pasar. Hal ini dapat menghambat inovasi dan efisiensi di pasar.
7. **Ketergantungan Pasar:** Kartel bisa membuat pasar menjadi terlalu bergantung pada beberapa produsen atau

penyedia layanan tertentu. Ini bisa menjadi risiko ekonomi jika produsen tersebut mengalami masalah atau mengubah kebijakan mereka secara drastis.

8. **Kurangnya Pilihan Konsumen:** Dengan mengontrol pasokan dan harga, kartel dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat menghambat kebebasan pasar dan membatasi akses konsumen terhadap produk dan layanan.

Permasalahan Diskriminasi Harga:

1. Ketidakadilan Konsumen: Diskriminasi harga dapat menciptakan ketidakadilan di antara konsumen, di mana beberapa konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih murah sementara yang lain harus membayar lebih mahal untuk produk yang sama.
2. Gangguan Persaingan: Diskriminasi harga dapat mengganggu persaingan yang sehat di pasar karena harga yang tidak merata dapat membuat pasar menjadi tidak stabil.
3. Kesenjangan Ekonomi: Praktik diskriminasi harga dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dengan membuat produk dan layanan lebih terjangkau bagi mereka yang mampu atau memiliki akses yang lebih baik, sementara orang lain dengan keterbatasan keuangan harus membayar lebih mahal.
4. Kurangnya Transparansi: Kadang-kadang sulit bagi konsumen untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan harga yang adil atau apakah mereka menjadi korban dari diskriminasi harga.
5. Mengurangi Efisiensi Pasar: Diskriminasi harga dapat menghambat efisiensi pasar dengan mendorong konsumen untuk membeli berdasarkan harga yang ditawarkan daripada berdasarkan nilai sebenarnya dari produk atau layanan tersebut.
6. **Mengurangi Transparansi:** Konsumen mungkin tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban diskriminasi harga karena kurangnya transparansi dalam penetapan harga di pasar.

7. **Pengurangan Kepercayaan Konsumen:** Praktik diskriminasi harga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek atau perusahaan, yang dapat berdampak negatif pada citra merek dan loyalitas konsumen

Kedua permasalahan ini merupakan isu serius dalam ekonomi global dan sering kali memerlukan intervensi pemerintah serta regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Awh, R.Y. 1998, Microeconomics: Theory and Applications, John Wiley & Sons Inc, New York, NY
- Froeb, L. M., Shor, M., & Ward, M. R. (2014). Managerial Economics: A Problem solving approach (3 ed.). South-Western: Cengage Learning.
- Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, 2006, Marketing Management 12e, Pearson International Edition.
- Yuliya Bolotova, dkk, (2009). Factors Influencing the Magnitude of Cartel Overcharges: An Emprical Analysis of the US Market, 5 J. Competition L. & Econ. 361.

BAB 8

SISTEM KURS VALUTA ASING

Oleh Misbahul Munir

8.1 Pengenalan Sistem Kurs Valuta Asing

Sistem kurs valuta asing merupakan suatu proses atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu untuk menentukan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara atau kelompok negara lainnya (Ajiaksa, 2019; Farida & Darmawan, 2017; Nirawati et al., 2023). Mekanisme atau proses ini adalah bagian integral dari sistem keuangan global yang mempengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas ekonomi di suatu negara tertentu (Rianda, 2019; Stefi et al., 2020; Susilo et al., 2022).

Sistem kurs valuta asing sangat penting terhadap keberlangsungan perdagangan dan perekonomian internasional. Dengan kondisi dunia seperti saat ini, di mana semua negara terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Hampir tidak ada pembatas antara satu negara dengan yang lainnya dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan sampai pada transaksi diberbagai sektor.

Kondisi yang tidak ada batas dalam berbagai sektor tersebut yang memungkinkan berbagai negara bisa bertransaksi dengan mudah, cepat, efektif dan efisien. Dalam prosesnya, transaksi antar negara tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Transaksi antar negara atau transaksi secara internasional ini membutuhkan satu sistem kusus, dan sistem inilah yang disebut sebagai sistem kurs valuta asing.

Adanya sistem kurs valuta asing menjadi sangat penting keberadaannya di era modern ini. Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa adanya sistem kurs valuta asing itu penting. Berikut beberapa hal yang menjadikan sistem kurs valuta asing menjadi penting.

1. **Perdagangan Internasional:** Sistem kurs valuta asing memfasilitasi perdagangan internasional dengan

menentukan harga relatif barang dan jasa di pasar global. Peredaran barang dan jasa diberbagai negara dipengaruhi secara langsung oleh sistem kurs di negara tersebut.

2. **Investasi Asing:** Nilai tukar mata uang mempengaruhi hasil investasi asing, serta arus modal ke dan dari suatu negara. Negara yang kuat nilai tukar mata uangnya pada umumnya iklim investasinya cenderung lebih stabil.
3. **Stabilitas Ekonomi:** Sistem kurs yang stabil membantu menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan pembayaran.
4. **Daya Saing Ekspor dan Impor:** Nilai tukar yang kompetitif dapat mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar internasional.
5. **Pertumbuhan Ekonomi Global:** Interkoneksi antara negara-negara melalui sistem kurs valuta asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global.

Sistem kurs valuta asing mempunyai beberapa peran dan fungsi dalam proses keberlangsungan perekonomian dan perdagangan internasional. Berikut adalah peran dan fungsi sistem kurs valuta asing:

1. **Menstabilkan Nilai Tukar:** Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang adalah salah satu tujuan utama sistem nilai tukar mata uang asing.
2. **Memfasilitasi Perdagangan Internasional:** Sistem kurs valuta asing membantu memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan mekanisme untuk menetapkan harga barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara. Tanpa adanya sistem kurs valuta asing, perdagangan internasional sulit untuk dilakukan.
3. **Mengelola Arus Modal:** Nilai tukar mata uang juga mempengaruhi arus modal dan investasi asing, yang dapat diatur melalui kebijakan kurs valuta asing.
4. **Melindungi Stabilitas Ekonomi:** Sistem kurs valuta asing dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui intervensi valuta

asing dan kebijakan moneter. Pada umumnya peran utama dari kebijakan ini dikendalikan oleh bank sentral.

5. **Meningkatkan Daya Saing Ekspor:** Nilai tukar mata uang asing yang kompetitif sanggup menunjang daya saing ekspor suatu negara di kancah internasional, mendorong ekspansi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

8.2 Jenis-Jenis Sistem Kurs Valuta Asing

Ada beberapa jenis dalam sistem kurs valuta asing dalam praktik perekonomian internasional. Beberapa jenis tersebut antara lain kurs tetap, kurs mengambang, kurs mengapung terkendali dan kurs terapresiasi (Azzam et al., 2018; Mokodongan et al., 2018). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenisnya.

A. Kurs Tetap

1. Karakteristik:

- a. Bank sentral yang secara formal sebagai induk dari setiap bank menjadi lembaga independen yang menetapkan nilai tukar.
- b. Nilai tukar relatif terhadap satu atau beberapa mata uang lainnya.
- c. Bank sentral bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai tukar tetap dengan intervensi di pasar valuta asing.

2. Kelebihan dan Kekurangan:

- a. *Kelebihan:* Memberikan stabilitas serta kepastian dalam perdagangan internasional. Mendorong kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.
- b. *Kekurangan:* Rentan terhadap tekanan pasar dan spekulasi. Sehingga memerlukan intervensi valuta asing yang signifikan untuk mempertahankan nilai tukar.

B. Kurs Mengambang

1. Karakteristik:

- a. Di pasar valuta asing, valuta permintaan dan penawaran sangat menentukan nilai tukar.

- b. Bank sentral biasanya tidak menerapkan intervensi aktif dalam menetapkan nilai tukar.
- c. Nilai tukar dapat berfluktuasi bebas berdasarkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan keuangan.

2. Kelebihan dan Kekurangan:

- a. *Kelebihan:* Fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Tidak memerlukan intervensi valuta asing yang konstan.
- b. *Kekurangan:* Rentan terhadap volatilitas pasar dan fluktuasi yang tidak terduga. Memerlukan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

C. Sistem Kurs Mengapung Terkendali

1. Karakteristik:

- a. Nilai tukar mengambang bebas di pasar valuta asing, tetapi terkadang bank sentral menjalankan intervensi untuk mengatur fluktuasi nilai tukar.
- b. Intervensi dijalankan untuk mencegah fluktuasi yang terlalu ekstrem atau untuk mencapai tujuan kebijakan moneter tertentu.

2. Kelebihan dan Kekurangan:

- a. *Kelebihan:* Fleksibilitas untuk mengikuti tren pasar tanpa meninggalkan kendali pemerintah. Memungkinkan stabilitas ekonomi dengan intervensi yang terukur.
- b. *Kekurangan:* Memerlukan keseimbangan yang baik antara intervensi dan pasar bebas. Berisiko tidak efektif jika intervensi tidak dilakukan dengan tepat.

D. Sistem Kurs Terapresiasi

1. Karakteristik:

- a. Nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral, tetapi diperbolehkan untuk mengalami apresiasi atau depresiasi secara perlahan-lahan seiring waktu.
- b. Nilai tukar secara berkala disesuaikan oleh otoritas moneternya untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang berubah.

2. **Kelebihan dan Kekurangan:**

- a. *Kelebihan:* Memungkinkan penyesuaian nilai tukar secara bertahap sesuai dengan perubahan ekonomi. Mengurangi risiko terjadinya fluktuasi yang tiba-tiba.
- b. *Kekurangan:* Mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan nilai tukar dengan kondisi pasar aktual. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengelola apresiasi atau depresiasi.

8.3 Implikasi Sistem Kurs Valuta Asing terhadap Ekonomi Negara

Penerapan sistem kurs valuta asing mempunyai implikasi terhadap perekonomian suatu negara. Beberapa implikasi tersebut meliputi beberapa sektor seperti perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, daya saing ekspor dan impor serta pengaruh pada sektor investasi.

A. **Perdagangan Internasional**

1. **Pengaruh Terhadap Neraca Perdagangan:** Sistem kurs valuta asing memengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan.
2. **Pembentukan Harga Barang dan Jasa:** Nilai tukar mata uang menjadi penentu harga barang dan jasa di pasar internasional, yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran produk domestik.

B. **Investasi Asing**

1. **Arus Modal dan Investasi Langsung:** Nilai tukar mata uang mempengaruhi hasil investasi asing dan arus modal ke dan dari suatu negara.
2. **Resiko dan Perlindungan *Hedging*:** Sistem kurs valuta asing memengaruhi resiko mata uang bagi investor dan perusahaan multinasional, serta strategi lindung nilai (*hedging*) yang mereka gunakan.

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Moneter

1. **Pengaruh Terhadap Inflasi:** Tingginya tingkat inflasi dipengaruhi oleh nilai tukar, dan hal ini juga memengaruhi perekonomian, terutama melalui aktivitas ekspor impor. Ketika nilai kurs melemah, bahan-bahan impor dari luar negeri juga mengalami peningkatan harga yang pada akhirnya akan menaikkan inflasi dalam negeri.
2. **Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar:** Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral tidak lain adalah untuk membentengi stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bank sentral selaku otoritas moneter berupa sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kondisi perekonomian domestik.

D. Daya Saing Ekspor dan Impor

1. **Dampak Terhadap Sektor Ekspor dan Impor:** Kurs valuta asing yang kompetitif dapat memaksimalkan potensi saing barang dalam negeri di pasar internasional, yang memengaruhi kinerja sektor ekspor dan impor.
2. **Efek Terhadap Lapangan Kerja:** Perubahan dalam perdagangan internasional dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja dalam sektor-sektor yang terkait dengan ekspor dan impor.

E. Pengaruh terhadap Arus Modal dan Investasi

1. **Fluktuasi Mata Uang dan Arus Modal:** Nilai tukar yang tidak stabil dapat mempengaruhi arus modal dan investasi asing, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar.
2. **Pengaruh Terhadap Sektor Keuangan:** Kondisi pasar valuta asing memengaruhi sektor keuangan dan perbankan, terutama dalam hal manajemen risiko mata uang dan likuiditas.

8.4 Peran Bank Sentral dalam Mengelola Sistem Kurs Valuta Asing

Dalam praktiknya, sistem kurs valuta asing di suatu negara harus dikelola dan diatur sebaik mungkin agar berpengaruh positif terhadap perekonomian di negara tersebut. Dalam konteks ini, salah satu pengelolaan dan pengaturan sistem valuta asing pada umumnya diambil oleh bank sentral (Isnawanti & Palupi, 2023).

Beberapa langkah yang bisa diambil oleh bank sentral dalam mengelola sistem kurs valuta asing antara lain, intervensi valuta asing, melalui kebijakan moneter dan nilai tukar, serta dengan strategi stabilitas ekonomi melalui kebijakan kurs (Faizin, 2020).

A. Intervensi Valuta Asing

1. **Tujuan Intervensi:** Bank sentral menggunakan intervensi valuta asing dengan tujuan mengendalikan nilai tukar mata uang dalam sistem kurs.
2. **Mekanisme Intervensi:** Bank sentral mempunyai kebijakan dalam mengendalikan nilai mata uang dan mempengaruhi permintaan dan penawaran, yakni melalui aktivitas jual beli mata uang asing di pasar valuta asing.

B. Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar

1. **Hubungan dengan Kebijakan Moneter:** Nilai tukar mata uang pada hakikatnya dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral, seperti pengendalian jumlah uang beredar dan besaran suku bunga.
2. **Penggunaan Kebijakan Nilai Tukar:** Bank sentral menggunakan kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur arus modal.

C. Strategi Stabilisasi Ekonomi melalui Kebijakan Kurs

1. **Penyesuaian Kurs:** Bank sentral dapat menyesuaikan nilai tukar mata uang sebagai bentuk respon disaat terjadi perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi atau deflasi.
2. **Stabilitas Mata Uang:** Tujuan bank sentral adalah mengharmonisasikan stabilitas nilai tukar mata uang

sehingga apabila terjadi fluktuasi tidak terlalu merugikan ekonomi.

8.5 Tantangan dalam Sistem Kurs Valuta Asing

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dengan adanya sistem kurs valuta asing. Bukan hanya itu, bahkan tantangan tersebut pada waktu tertentu malah menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan kestabilan ekonomi dan perdagangan internasional.

Beberapa tantangan tersebut antara lain meliputi volatilitas pasar dan risiko spekulasi, terkoneksi pasar keuangan global yang menyebabkan 'merembet'nya krisis ekonomi antar negara, persaingan global yang semakin tidak sehat serta sulitnya realisasi kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks terlebih kondisi ekonomi dunia yang semakin dinamis. Memahami tantangan dan juga kontroversinya dari adanya sistem kurs valuta asing merupakan hal yang penting, terutama bagi para pengambil kebijakan ekonomi suatu negara dalam mengelola risiko yang muncul dan merespon dinamika pasar valuta asing.

8.6 Penutup

Dalam konteks saat ini, munculnya sistem kurs valuta asing menjadi hal tidak bisa dihindari, oleh karena itu negara perlu memperhatikan hal ini. Negara yang mengikuti sistem perekonomian terbuka, pasti berhadapan dengan sistem kurs valuta asing.

Sistem kurs valuta asing, mempunyai peran serta fungsi yang sangat vital bagi pembangunan perekonomian dan perdagangan internasional yang dimiliki oleh suatu negara. Belum lagi di era globalisasi seperti saat ini, dunia sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya dan tidak ada batasan dalam berbagai bidang.

Terlebih dalam bidang ekonomi dan perdagangan, antar negara saling berhubungan satu sama lain. Di sinilah pentingnya

sistem kurs valuta asing dirasakan. Jika kita bisa mengelola dan mengatur sistem kurs valuta asing dengan baik, bisa mengatur risiko-risiko yang ada, maka perekonomian bisa dikendalikan dengan baik dan bisa menjaga kestabilan ekonomi negara.

Tantangan akan selalu muncul ke depannya. Mulai dari adanya ketidakpastian pasar global, konflik antar wilayah dan bahkan antar negara yang mengganggu rantai pasok arus barang dan jasa secara internasional, sampai pada tantangan dari para pelaku pasar itu sendiri, dan masih banyak tantangan lainnya yang menimbulkan berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik, salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah dengan mengelola sistem kurs valuta asing dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiaksa, P. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERORANGAN DALAM TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING. *Jurist-Diction*, 1(2).
<https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11018>
- Azzam, A., Suhendra, I., & Setyadi, S. (2018). DAMPAK FAKTOR FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI TERHADAP KURS PADA SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG BEBAS DI TIGA NEGARA ASEAN. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(1).
<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i1.4939>
- Faizin, M. (2020). Analisis hubungan kurs terhadap inflasi. *Akuntabel*, 17(2).
- Farida, M., & Darmawan, A. (2017). Pengaruh Risiko Inflasi, Risiko Suku Bunga, Risiko Valuta Asing, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol*, 50(1).
- Isnawanti, I., & Palupi, D. S. (2023). Kajian Teoritik Persamaan Diferensial Stokastik bagi Kurs Mata Uang (Forex), Kajian Khusus : Kurs IDR/USD. *INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS*, 13(1).
<https://doi.org/10.13057/ijap.v13i1.52916>
- Mokodongan, Z. Z. ., Rotinsulu, T. O., & Mandeij, D. M. (2018). Analisis Fluktuasi Tingkat Kurs Rupiah (Idr) Terhadap Dollar Amerika (Usd) Padasistem Kurs Mengambang Bebas Di Indonesia Dalam Periode 2007.1-2014.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2).
- Nirawati, L. N., Wibowo, M. R. R., Dwiana, N. A., Prastikasari, P., & Yani Maila Santi. (2023). Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perilaku Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Valuta Asing. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 9(1).
<https://doi.org/10.38204/atrabis.v9i1.1399>
- Rianda, C. N. (2019). Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, XI(1).

- Stefi, T., Putri, A., Sasana, H., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Inflasi, Bunga, Kurs Valuta Asing, Leverage Terhadap Returnsaham Perusahaan Manufaktur Periode 2008 – 2018. *Directory Journal of Economic*, 2(4).
- Susilo, I. B. F. D., Subchanifa, D. P. V., Hamzah, R. A., & Komarlina, D. H. L. (2022). Efisiensi Pasar Valuta Asing di Indonesia: Analisis Empiris. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1). <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4794>

BAB 9

NERACA PEMBAYARAN

INTERNASIONAL

Oleh Fathimah Kurniawati

9.1 Pendahuluan

Perekonomian dunia menjadi saling bergantung, sehingga peristiwa ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara lain (Case, et al., 2017). Neraca pembayaran dibutuhkan sebagai instrumen yang menggambarkan interaksi negara dengan negara lain dalam hal perdagangan barang, jasa dan modal. Konsep neraca pembayaran internasional dikenalkan pertama kali oleh James Stuart pada tahun 1767. Neraca pembayaran untuk mengakomodasi perdagangan barang dan pergerakan logam mulia pada masa merkantilis (Brue dan Randy, 2013). Pembayaran internasional dibutuhkan bagi negara-negara yang terlibat dalam transaksi-transaksi ekonomi internasional (Krugman, et al., 2018). Bab ini akan membahas konsep dasar, komponen utama neraca pembayaran, dan kebijakan yang tepat untuk mengurangi defisit neraca pembayaran.

9.2 Pengertian Neraca Pembayaran

Pendapatan nasional perekonomian tertutup mengindikasikan bahwa seluruh output yang diproduksi dikonsumsi atau diinvestasikan oleh warga negara atau dibeli oleh pemerintah (Krugman, et al., 2018). Hal ini berarti, jika barang konsumsi tidak dapat diserap oleh warga negara dan pemerintah, maka perusahaan cenderung enggan untuk meningkatkan output, sebab akan meningkatkan persediaan output mereka. Namun, ketika terjadi perdagangan internasional, maka perusahaan dapat menjual output mereka kepada negara lain.

Negara yang perekonomian negaranya terbuka, maka akuntansi pendapatan nasionalnya berbeda dengan negara perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka identik dengan adanya output dalam negeri yang diekspor ke negara lain dan sebagian pendapatan nasional dibelanjakan untuk produk dari negara lain (Krugman, xx). Oleh karena itu, akuntansi pendapatan nasional pada perekonomian terbuka harus dimofidikasi melalui neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional (NPI) didefinisikan sebagai catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu (IMF, 1996).

Neraca pembayaran dicatat berdasarkan sistem akuntansi standar antar negara. Hubungan antara transaksi ekonomi internasional dan pendapatan domestik sebuah negara dapat kita pahami melalui pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto/PDB). Pendapatan negara perekonomian tertutup dapat diformulasikan melalui penjumlahan antara konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah (Formula 1). Aliran modal dan keuntungan menjadi milik penduduk negara tersebut. Namun, apabila didalam suatu negara tersebut juga terdapat beberapa perusahaan multinasional yang dimiliki oleh asing, sehingga keuntungan dari perusahaan tersebut bukan menjadi milik penduduk (PNB). Selisih antara 1 dan 2 menghasilkan pendapatan nasional (PN) atau pembayaran yang harus diterima atau dibayar karena penggunaan faktor produksi yang tidak dimiliki oleh negara. Jika pendapatan nasional negatif, maka negara tersebut menerima pendapatan atau PDB lebih besar dari PNB (Terra, 2015; Case, et al., 2017).

$$\begin{aligned}
 \text{PDB} &= C+I+G \dots\dots\dots (1) \\
 \text{PNB -PDB} &= \text{PN} \dots\dots\dots (2) \\
 Y+M &= C+I+G+X \dots\dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

Adanya perdagangan internasional, maka barang dan jasa yang dapat dikonsumsi negara adalah hasil penjumlahan antara PDB dan impor yang masuk di negara tersebut. Sedangkan

kelebihan produksi negara tersebut dapat diekspor ke negara lain dan dapat menjadi penerimaan negara tersebut.

Neraca pembayaran memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Neraca pembayaran dapat menunjukkan status dan perekonomian suatu negara. Interaksi suatu negara juga dapat dipahami melalui neraca pembayaran, seperti aliran dana antar negara dan permasalahan utang luar negeri suatu negara. Neraca pembayaran internasional memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu di dalam pengambilan kebijakan moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional (Sugiyono, 2002).

9.3 Struktur Neraca Pembayaran Internasional

Kependudukan dan *double-entry book keeping* menjadi dasar pencatatan neraca pembayaran. Dasar pencatatan pertama, penduduk dalam neraca pembayaran adalah individu, pemerintah atau swasta yang pusat kegiatan ekonominya dilakukan di negara yang bersangkutan. Status penduduk ditentukan berdasarkan lamanya pusat kegiatan ekonominya dilakukan di suatu negara sekurang-kurangnya satu tahun (Sugiyono, 2002).

Selanjutnya, dasar pencatatan neraca pembayaran dilakukan berdasarkan prinsip pembukuan *double-entry*. Neraca pembayaran harus seimbang dalam arti akuntansi, hal ini merujuk pada pencatatan transaksi yang terjadi pada suatu negara. Setiap transaksi internasional dan besaran nominalnya akan dicatat pada sisi pemasukan dan pengeluaran atau seimbang sisi debit dan kreditnya. Sisi debit menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, sedangkan sisi kredit menunjukkan bertambahnya hak negara untuk menerima pembayaran dari negara lain. Pencatatan transaksi pencatatan neraca pembayaran dilakukan selama satu periode waktu (triwulanan, semesteran, tahunan) dan hanya menggambarkan transaksi pada periode yang bersangkutan (Sugiyono, 2002).

Transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran mencakup perpindahan barang, pemberian jasa, dan pemindahan barang modal baik dapat terjadi antara dua pihak dan satu pihak. Transaksi dua pihak mengacu pada pembayaran transaksi yang dapat berupa uang atau barang modal (termasuk juga pembayaran jatuh tempo/piutang) atau pembayaran dalam bentuk natura (barang dan jasa). Sehingga dalam pencatatannya, transaksi ini dicatat melalui *double-entry* atau kedua sisi transaksi menunjukkan nominal yang sama. Transaksi internasional satu pihak biasanya satu arah, misalnya transaksi hibah atau sumbangan yang diberikan oleh negara lain (Badger, 1951; Høst-Madsen, 1966).

Neraca pembayaran internasional terbagi menjadi dua akun yang berbeda sesuai dengan sifat transaksinya, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan keuangan (Salvatore, 2014; Krugman, et al., 2018). Tabel 1.1 menunjukkan stuktur neraca pembayaran sebuah negara.

Tabel 9.1. Struktur Neraca Pembayaran

Transaksi Berjalan	Kredit (+)	Debit (-)
A. Barang dan Jasa		
- Barang	Ekspor	Impor
- Jasa	Penjualan	Pembelian
B. Pendapatan Primer	Diterima	Terkirim
C. Pendapatan Sekunder		
Transaksi Modal		
Transaksi modal	Diterima	Terkirim
Akuisisi/pembuangan barang yang tidak diproduksi aset non-keuangan	Akuisisi	Pembuangan
Transaksi Keuangan	Kewajiban bersih	Akuisisi aset bersih
Investasi langsung	Orang asing di negara asal	Penduduk domestik di luar negeri
Investasi portofolio	Penjualan aset	Pembelian aset

Transaksi Berjalan	Kredit (+)	Debit (-)
	dalam negeri	luar negeri
Derivatif keuangan	Penjualan aset dalam negeri	Pembelian aset luar negeri
Investasi lainnya	Penjualan aset dalam negeri	Pembelian aset luar negeri
Cadangan aset	Pengurangan	Penambahan
Selisih perhitungan		
Total		

Sumber: Terra, 2015

1. Transaksi berjalan (*current account*)

Transaksi ini timbul dari kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk barang atau jasa kepada negara lain. Komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan, neraca jasa, penghasilan, dan *current transfer*. Neraca perdagangan berisi kegiatan ekspor dan impor barang yang perhitungannya diukur berdasarkan nilai *free on board* (f.o.b) atau harga produk ekspor (Sugiyono, 2002).

Sedangkan biaya pengiriman dan asuransi barang ekspor dan impor dikelompokkan sebagai transaksi jasa. Selain biaya pengiriman, bentuk kegiatan lain dari neraca jasa dapat berbentuk jasa transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Beberapa transaksi yang termasuk ke dalam kelompok penghasilan yaitu hasil penggunaan faktor produksi, modal dan tenaga kerja seperti dividen dan bunga. Sisanya, transaksi *current transfer* terdiri dari transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban pembayaran seperti hibah dari negara lain.

Tabel 9.2. Transaksi Berjalan Neraca Pembayaran

Akun	Posisi	Keterangan
A. Barang		
- Ekspor, fob	Pemasukan/kredit	
- Impor, fob	Pengeluaran/debit	
		Keseimbangan Neraca Perdagangan
B. Jasa – jasa		
- Ekspor	Pemasukan/kredit	
- Impor	Pengeluaran/debit	
		Keseimbangan Neraca Jasa
C. Pendapatan		
- Penerimaan	Pemasukan/kredit	
- Pembayaran	Pengeluaran/debit	
D. Transfer		
- Penerimaan	Pemasukan/kredit	
- Pembayaran	Pengeluaran/debit	
		Keseimbangan Transaksi Berjalan

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Besarnya transaksi berjalan (CA) dapat diukur melalui pendapatan nasional. Surplus/defisitnya transaksi berjalan dapat diukur melalui selisih antara ekspor dan impor (formula 4). Selain itu, kinerja transaksi berjalan juga dapat diukur melalui hasil pengurangan antara tabungan dan investasi. Surplus transaksi berjalan mengindikasikan maka investasi lebih kecil daripada tabungan (Terra, 2015).

Pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai:

$Y = C + I + G + X - M$, dimana $X - M = CA$, sehingga pendapatan nasional dapat diformulasikan kembali menjadi

$Y = C + I + G + CA$ (4)

Kemudian, dapat diformulasikan ulang menjadi
 $Y-(C+G)=I+CA$, dimana $Y-(C+G)=S$
 $S=I+CA$ (5)

2. Transaksi modal dan keuangan (*capital and financial account*)

Transaksi modal terdiri dari capital transfer yang berupa pemberian dan transfer uang atas pembelian/penjualan barang modal, dan *non-financial asset* yang berupa pembelian/penjualan paten. Transaksi keuangan terdiri dari transaksi ekonomi yang dapat meningkatkan atau mengurangi aset yang berupa investasi dan surat berharga, dan atau utang luar negeri yang melibatkan devisa atau di luar devisa.

Tabel 9.3. Transaksi Modal dan Keuangan

Akun	Posisi
II. Transaksi Modal	
- Penerimaan bunga/deviden	Pemasukan/kredit
- Pembayaran bunga/deviden	Pengeluaran/debit
III. Transaksi Finansial	
- Aset	Pemasukan/kredit
- Kewajiban	Pengeluaran/debit
1. Investasi Langsung	
a. Aset	Pemasukan/kredit
b. Kewajiban	Pengeluaran/debit
2. Investasi Portofolio	
a. Aset	Pemasukan/kredit
b. Kewajiban	Pengeluaran/debit
- Sektor publik	
- Sektor swasta	
3. Derivatif Finansial	
4. Investasi Lainnya	
a. Aset	Pemasukan/kredit
b. Kewajiban	Pengeluaran/debit
- Sektor publik	
- Sektor swasta	

Sumber: Bank Indonesia, 2024

3. Perubahan cadangan devisa

Akun ini menampung defisit atau surplusnya neraca pembayaran dan menunjukkan besarnya perubahan jumlah cadangan devisa yang dikuasai oleh bank sentral. Cadangan devisa dapat berupa emas moneter, rekening likuid negara yang menjadi anggota IMF (*Reserves Position in the Fund*), rekening giro yang dimiliki negara yang menjadi anggota IMF (*Special Drawing Rights*) dan valuta asing.

4. Selisih perhitungan

Akun ini digunakan untuk menampung selisih pemasukan dan pengeluaran sehingga neraca pembayaran dapat seimbang. Selisih perhitungan dapat terjadi karena kesalahan penginputan transaksi, perbedaan waktu pencatatan, dan selisih kurs.

9.4 Keseimbangan Neraca Pembayaran

Lalu lintas transaksi berjalan dan transaksi keuangan hingga hasil akhir akan menggambarkan surplus atau defisitnya neraca pembayaran internasional. Meskipun dalam pencatatan neraca pembayaran total penerimaan dan pembayaran harus seimbang, namun terkadang terjadi kelebihan pembayaran atau penerimaan di suatu negara (Terra, 2015). Keseimbangan neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CA+KA+FA=0..... (6)$$

Neraca pembayaran dikatakan seimbang jika hasil penjumlahan antara transaksi berjalan dan transaksi modal dan keuangan sama dengan 0. Sedangkan neraca pembayaran mengalami surplus apabila hasil penjumlahan ketiga komponen lebih besar dari 0. Neraca pembayaran internasional dikatakan menguntungkan atau yang lebih dikenal sebagai surplus neraca pembayaran terjadi kelebihan ekspor barang dan jasa, serta transfer modal dari luar negeri (Terra, 2015).

Sedangkan, neraca pembayaran internasional tidak menguntungkan (defisit neraca pembayaran) terjadi ketika

ketidakseimbangan neraca pembayaran dimana pembayaran kepada negara lain lebih besar dibanding pembayaran yang diterima oleh negara tersebut. Defisit neraca pembayaran diukur dari kelebihan debit terhadap kreditnya transaksi berjalan dan modal atau kelebihan debit terhadap kreditnya cadangan devisa (Salvatore, 2014).

Adanya defisit transaksi berjalan tidak selalu menjadi pertanda bahwa kebijakan atau kondisi perekonomian negara yang bersangkutan buruk. Kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit karena sedang mengimpor modal. Selain itu, defisit adalah respon terhadap kondisi dalam negeri, seperti inflasi yang berlebihan, atau produktivitas yang rendah.

Ketidakseimbangan dalam NPI dapat terjadi dalam jangka pendek dan jangka pendek. Disekilibrium jangka pendek bersifat sementara dan tidak menyebabkan ancaman yang serius. Disekilibrium jangka pendek biasanya disebabkan oleh peminjaman internasional (Terra, 2015).

Sedangkan, disequilibrium jangka panjang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor-faktor dinamis. Ketidakseimbangan NPI juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pengaruh fluktuasi *cyclical*, perubahan teknologi, gangguan politik, dan efek dari demonstrasi (Salvatore, 2015).

Pentingnya peran NPI dalam suatu negara, maka perlu beberapa upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran.

1. Kebijakan Moneter

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan moneter untuk memperbaiki ketidakseimbangan NPI yang berkaitan dengan jumlah uang beredar dan kredit masuk ekonomi. Pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral akan mempengaruhi harga barang ekspor dan impor.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengurangi disequilibrium NPI adalah melalui pengendalian pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunan dan non-pembangunan dapat disesuaikan dengan situasi disequilibrium dan situasi ekonomi negara.

3. Kebijakan Nilai Tukar

Kebijakan nilai tukar bisa dikatakan erat hubungannya dengan besarnya NPI sebuah negara. Kebijakan nilai tukar dapat berupa kontrol nilai tukar, depresiasi nilai tukar dan devaluasi nilai tukar. Depresiasi dan devaluasi nilai mata uang domestik suatu negara akan mengurangi nilai mata uang negara lain, akibatnya impor menjadi mahal dan ekspor menjadi lebih murah dan defisit neraca pembayaran dapat menurun. Kontrol nilai tukar dapat dilakukan melalui penyerahan pendapatan dari eksportir dan penjatahan total devisa untuk importir yang memiliki izin.

4. Kebijakan Neraca Perdagangan

Kebijakan yang berkaitan dengan ekspor impor juga dapat dilakukan untuk mengurangi defisit NPI. Promosi ekspor dapat dilakukan untuk merangsang ekspor seperti pengurangan bea ekspor, bantuan tunai dan subsidi untuk pelaku ekspor, sehingga harga ekspor akan menjadi lebih murah di pasar internasional. Kebijakan terkait dengan impor juga dapat dilakukan melalui substitusi impor untuk penghematan biaya produksi dan pengendaliannya seperti penerapan tarif dan kouta.

9.5 Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja neraca pembayaran Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan dan mencatat surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS. Kinerja ini meningkat sebesar 57,53% dibandingkan tahun 2022. Cadangan devisa tahun 2023 juga menunjukkan hal yang sama, meningkat sebesar 6,67% dibandingkan cadangan devisa tahun 2022.

Surplus neraca pembayaran ditopang oleh surplus pada transaksi finansial yang didominasi oleh investasi langsung. Sedangkan, rasio transaksi berjalan terhadap PDB sebesar -0,11%. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pos pada neraca pembayaran tahun 2023 mengalami defisit, dan hanya ekspor non migas dan pendapatan sekunder yang berkinerja positif.

KETERANGAN	2023
I. Transaksi Berjalan	-1.567
A. Barang	46.347
- Ekspor, fob	259.468
- Impor, fob	-213.121
1. Barang Dagangan Umum	47.975
- Ekspor	258.620
- Impor	-210.645
a. Nonmigas	67.633
- Ekspor	241.932
- Impor	-174.300
b. Migas	-19.658
- Ekspor	16.687
- Impor	-36.345
2. Barang Lainnva	-1.628
- Ekspor	848
- Impor	-2.477
B. Jasa - jasa	-17.919
- Ekspor	33.434
- Impor	-51.353
C. Pendapatan Primer	-35.360
- Penerimaan	7.853
- Pembayaran	-43.213
D. Pendapatan Sekunder	5.365
- Penerimaan	15.255
- Pembayaran	-9.890
II. Transaksi Modal	43
- Penerimaan	43
- Pembayaran	-
III. Transaksi Finansial ²	8.703
- Aset	-19.755
- Kewajiban	28.458
1. Investasi Langsung	14.558
a. Aset	-7.144
b. Kewajiban	21.701
2. Investasi Portofolio	2.307
a. Aset	-2.854
b. Kewajiban	5.162
- Sektor publik	8.916
- Sektor swasta	-3.755
3. Derivatif Finansial	167
4. Investasi Lainnva	-8.330
a. Aset	-10.781
b. Kewajiban	2.451
- Sektor publik	3.091
- Sektor swasta	-640
IV. Total (I + II + III)	7.179
V. Selisih Perhitungan Bersih	-878
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	6.301
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait ³	-6.301
A. Transaksi Cadangan Devisa	-6.301
B. Kredit dan Pinjaman IMF	-
C. Exceptional Financing	-
Memorandum:	
- Posisi Cadangan Devisa	146.384
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri	6,47
- Pemerintah	
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,11
- Rasio Pembayaran Utang (%)	
a.I. Rasio Pembayaran Utang Pemerintah & Otoritas	
Moneter (%)	

Catatan:

1] Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" and "-" mengikuti BPM5

2] Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait

3] Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Gambar 9.1. Neraca Pembayaran Indonesia 2023 (juta USD)
Sumber: Bank Indonesia, 2024

9.6 Neraca Pembayaran dan Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja neraca pembayaran yang berbeda pada beberapa negara mengakibatkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi (Thirlwall, 1979). Perbedaan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perbedaan elastisitas transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor. Sehingga, neraca pembayaran dapat berperan sebagai pembatas laju pertumbuhan output dan membatasi pertumbuhan tingkat permintaan (Thirlwall, 1979; Pattichis, 2004).

Negara-negara dapat mengalami defisit neraca berjalan (*current account deficits*) dalam jangka pendek, namun hal ini tidak berlangsung lama. Defisit neraca berjalan menjadi semakin buruk apabila aset domestik yang dimiliki oleh penduduk asing lebih besar. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat melebihi tingkat pertumbuhan keseimbangan neraca pembayarannya dalam jangka waktu lama. Namun, pembiayaan defisit yang terus-menerus akan mengakibatkan pertumbuhan negara tersebut lebih lambat. Neraca pembayaran berperan sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Falianty, 2017). Sehingga, pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keseimbangan dan kebijakan neraca pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi untuk mengurangi defisit neraca pembayaran harus dipilih secara tepat, karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

9.7 Kesimpulan

Neraca pembayaran menggambarkan transaksi ekonomi internasional suatu negara. Transaksi ini dapat berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter. Perannya yang penting dalam suatu negara maka beberapa kebijakan untuk mengurangi disequilibrium seperti kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar dan perdagangan. Oleh karena itu, neraca pembayaran mengontrol syarat perdagangan suatu negara. Kinerja neraca pembayaran yang menguntungkan akan membuat suatu negara memperoleh lebih banyak devisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badger, D. G. (1951). The Balance of Payments: A Tool of Economic Analysis. *IMF Staff Papers* 1951, Vol 002, A004. Available from: <https://doi.org/10.5089/9781451971460.024.A004>
- Bank Indonesia. (2024). *Statistika Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Dapat diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx#headingFour>
- Brue, Stanley L. and Randy R. Grant. (2013). The evolution economic thought 8th edition. South western Cengage Learning
- Case, Karl E., Oster, Sharon M.. (2017). *Principles of Economics*. Boston: Pearson.
- Falianty, Telisa. (2017). Balance of Payment Dynamic in Indonesia and the Structure of Economy. *Economics and Finance in Indonesia*: Vol 63 No 1 pp 53-80. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/efi/vol63/iss1/4>
- F.X. Sugiyono. (2002). *Neraca Pembayaran: konsep, metodologi dan penerapan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI
- Høst-Madsen, P. (1966). What does it really mean?—Balance of Payments. *Finance & Development* Vol 0003, 001, A005. Available from: <https://doi.org/10.5089/9781616352813.022.A005>
- International Monetary Fund. (1996). *Balance of Payments Textbook*. Washington DC, USA: International Monetary Fund.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, and Marc Melitz. (2018). *International economics theory and policy 11th ed*. Boston: Pearson.
- Pattichis, C. (2004) 'Economic Growth and The Balance of Payments Constraint: Implications for Cyprus's Prospective EMU Membership'. *The International Trade Journal*, 18(2), pp. 85–100. Available from:

<https://doi.org/10.1080/08853900490449160>.

Salvatore, Dominick. (2014). *International Economics : trade and finance* 11th Ed. Singapore: John Wiley & Sons.

Terra, C. (2015). How to Measure International Transactions. *Principles of International Finance and Open Economy Macroeconomics*, 9–30. Available from: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802297-9.00002-6>

Thirlwall, AP. (1979). The Balance of Payments Constrain as an Explanation of International Growth Differences. *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, vol. 32, no. 28.

BAB 10

MODEL EKONOMI TERBUKA

Oleh Yuyun Anggraini

Model Ekonomi Terbuka adalah salah satu konsep yang sangat penting untuk dipahami dalam pembahasan Ekonomi Internasional. Di era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui perdagangan internasional, arus modal dan juga pertukaran teknologi dan informasi. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dinamika ekonomi global, maka model ekonomi terbuka merupakan landasan yang sangatlah penting untuk dipahami. Dengan kata lain, dengan memahami model ekonomi terbuka, maka kita dapat memahami dan menganalisis interaksi antara perekonomian dalam negeri dengan perekonomian dunia yang dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu negara.

Dalam bab ini kita akan membahas secara mendalam mengenai konsep dasar dari model ekonomi terbuka, perbedaan antara model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka, dan model Mundell – Fleming. Melalui pemahaman mengenai model ekonomi terbuka diharapkan dapat membuka wawasan anda tentang dinamika ekonomi global dan formulasi kebijakan ekonomi.

10.1 Konsep Dasar Model Ekonomi Terbuka

Model Ekonomi Terbuka merupakan kerangka analisis yang membahas tentang interaksi antara suatu negara dengan negara yang lain melalui perdagangan barang dan jasa serta arus modal (Krugman and Obstfeld, 2012). Model ekonomi terbuka memiliki relevansi yang kuat terhadap studi tentang ekonomi internasional karena pembahasan ini dapat menjadi landasan kajian mengenai dampak interaksi antar negara terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selain itu, dapat menjadi landasan pengambilan keputusan para pemangku

kebijakan mengenai arah kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam model ekonomi terbuka ada beberapa konsep dasar yang dapat mempengaruhi perekonomian terbuka diantaranya:

1. Perdagangan internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lainnya, yang saat ini kita sebut dengan istilah ekspor dan impor (Froyen, Obstfeld and Rogoff, 1997). Adapun definisi dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa ke luar negeri atau menjual barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dikirim ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dan jasa ke dalam negeri atau membeli barang dan jasa yang diproduksi negeri lain dan dikirim ke dalam negeri (Krugman and Obstfeld, 2012).

Ada beberapa jenis pasar pada perdagangan internasional diantaranya: (Vasudevan *et al.*, 2022)

- a. Pasar Output (*Output Market*)

Pada pasar output, perdagangan yang dilakukan berupa perdagangan barang dan jasa. Pada pasar ini perekonomian suatu negara dapat melakukan perdagangan barang dan jasa ke negara lain, sehingga dapat memperluas pilihan konsumen dan produsen dalam memilih antara barang domestik atau barang impor atau sederhananya konsumen maupun produsen dapat memilih antara barang yang diproduksi dalam negeri atau barang yang diproduksi di negara lain.

- b. Pasar Keuangan/Modal (*Financial Market*)

Pada pasar keuangan, perdagangan yang dilakukan berupa perdagangan atas aset-aset keuangan. Aset-aset keuangan yang diperjual belikan berupa saham, obligasi dan instrumen keuangan lainnya. Pada pasar ini, investor dapat memilih menjual atau membeli aset keuangan domestik atau aset keuangan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga para investor dapat memperoleh keuntungan dari kinerja pasar global.

c. Pasar Tenaga Kerja (*Labour Market*)

Pada pasar tenaga kerja berfokus pada mobilitas pekerja antar negara dan lokasi produksi. Pada pasar ini, tenaga kerja dapat memilih bekerja di dalam negeri atau bekerja di luar negeri, begitupula perusahaan dapat memilih lokasi produksi apakah memilih untuk melakukan produksi dalam negeri atau di negara lain. Setiap negara telah memiliki peraturan khusus mengenai pergerakan pekerja antar negara begitupula peraturan mengenai pendirian perusahaan asing dalam negeri.

Dari bentuk interaksi perdagangan internasional pada ketiga pasar tersebut, maka terbentuklah satu kerangka global yang dapat mempengaruhi beberapa aspek kebijakan diantaranya kebijakan dalam perdagangan, kebijakan moneter serta kebijakan dari segi ketenagakerjaan.

Perdagangan internasional dilakukan guna meningkatkan efisiensi suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Suatu negara akan fokus meningkatkan produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain dan melakukan perdagangan barang dan jasa ke negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa tersebut dengan efisien.

Manfaat lain yang didapatkan ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu perusahaan atau pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasar atas produk barang dan jasa yang mereka produksi tidak hanya dapat dipasarkan di dalam negeri namun juga dapat dipasarkan di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan keuntungan mereka. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, konsumen juga dapat menikmati barang dan jasa yang lebih variatif yang berasal dari seluruh dunia meskipun barang dan jasa tersebut tidak dapat diproduksi di negaranya.

2. Aliran Modal Asing

Pada pasar keuangan dalam perdagangan internasional telah dijelaskan bahwa adanya perdagangan

aset-aset keuangan antar negara. Melalui transaksi itulah maka terjadi aliran dana atau modal berupa investasi keuangan dari satu negara ke negara lain. Sehingga aliran investasi keuangan yang masuk ataupun keluar antara negara yang berbeda disebut sebagai aliran modal asing.

Aliran modal asing terbagi menjadi dua yaitu aliran modal asing masuk dan aliran modal asing keluar (Rodseth, 2004). Aliran modal asing masuk terjadi ketika investor asing melihat peluang keuntungan pada suatu negara sehingga para investor mengalokasikan dana mereka pada aset keuangan yang terdapat di negara tersebut. Sedangkan aliran modal asing keluar terjadi ketika investor melihat potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakstabilan ekonomi pada negara tersebut, sehingga para investor asing menarik dana atau modal mereka dan memindahkannya pada aset keuangan negara lain yang lebih potensial.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran modal asing masuk ataupun keluar dari suatu negara diantaranya:

a. Faktor Perekonomian Negara

Kondisi perekonomian suatu negara sangatlah besar pengaruhnya terhadap arus modal asing yang akan masuk maupun keluar dari suatu negara. Kondisi perekonomian yang dimaksud berupa stabilitas ekonomi suatu negara dari segi pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, kondisi pasar keuangan bahkan stabilitas politik serta keamanan di negara tersebut juga memiliki pengaruh terhadap aliran modal asing.

b. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada suatu negara juga berdampak pada aliran modal asing yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Bentuk kebijakan yang dapat mempengaruhi mobilitas aliran modal asing diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ataupun peraturan yang berkaitan dengan investasi asing dan juga perdagangan internasional.

c. Faktor Kondisi Pasar Keuangan Global

Selain kondisi pasar suatu negara dari segi ekonomi maupun kebijakan yang terkait, kondisi pasar secara

global juga memiliki pengaruh signifikan terhadap mobilitas modal asing. Kondisi ekonomi global yang dimaksud diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga serta tingkat inflasi global terutama pada negara-negara yang memiliki pengaruh besar pada perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan beberapa negara lain. Pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga serta tingkat inflasi pada negara-negara kunci mempengaruhi kondisi perekonomian global sehingga dapat berpengaruh terhadap sentimen investor terhadap pasar keuangan. Selain itu stabilitas politik dan keamanan global juga sangat berpengaruh terhadap sentimen investor yang mengakibatkan penarikan atau penundaan aliran modal pada pasar keuangan.

3. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau kurs adalah harga relatif terhadap dua mata uang yang menunjukkan besaran nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang lainnya (Blanchard and Johnson, 2006). Sebagai contoh nilai satu dollar Amerika (\$1) terhadap nilai rupiah (Rp). Nilai tukar atau kurs mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat suku bunga, inflasi, stabilitas politik dan lainnya.

Ada dua jenis sistem nilai tukar yaitu nilai tukar tetap/kurs tetap dan nilai tukar mengambang/kurs mengambang. Kurs tetap adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh otoritas moneter suatu negara dan bernilai tetap terhadap mata uang lain dalam kurun waktu tertentu, sedangkan kurs mengambang adalah nilai tukar yang nilainya berfluktuasi tergantung pada kekuatan pasar dari segi permintaan dan penawaran valuta asing. Indonesia saat ini menganut sistem nilai tukar mengambang yang dikendalikan atau diatur oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia.

Nilai tukar sangatlah berpengaruh pada perdagangan internasional karena dapat mempengaruhi harga barang

dan jasa pada aktifitas ekspor dan impor. Nilai tukar juga berpengaruh penting terhadap investasi dan aliran modal asing karena ketika kurs suatu negara menguat terhadap kurs negara lain maka investasi asing akan meningkat dan aliran modal asing akan masuk ke negara tersebut (Salvatore, 2012). Mengapa demikian, karena menguatnya kurs dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai portofolio investasi asing.

10.2 Perbedaan Model Ekonomi Tertutup dan Model Ekonomi Terbuka

Perbedaan yang paling mendasar dari model ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup adalah bahwa diasumsikan pada model ekonomi tertutup tidak ada hubungan perdagangan internasional baik perdagangan barang maupun jasa dalam hal ini kegiatan ekspor- impor serta tidak adanya aliran modal asing yang masuk maupun keluar dari suatu negara sehingga faktor-faktor tersebut tidak diperhitungkan dalam analisis ekonomi. Sedangkan model ekonomi terbuka mengakui bahwa adanya hubungan perdagangan internasional, negara-negara melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta adanya aliran modal asing masuk dan keluar sehingga faktor-faktor tersebut diperhitungkan dalam analisis ekonomi.

Pada ekonomi tertutup seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian semua dijual dalam negeri dan pengeluaran agregat atau total output (Y) terdiri dari 3 komponen diantaranya: konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah.

$$Y = C + I + G$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

- Y = Pendapatan Nasional
- C = Total Konsumsi atas barang dan jasa domestik
- I = Total Investasi pada barang dan jasa domestik
- G = Total Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa domestik

Namun pada ekonomi terbuka sebagian dari output barang dan jasa yang dihasilkan dijual di dalam negeri dan sebagian dijual di luar negeri atau diekspor ke luar negeri. Sehingga total pengeluaran atau pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran atas barang dan jasa domestik dan pengeluaran atas barang dan jasa luar negeri. Sehingga total konsumsi atau konsumsi agregat terdiri dari konsumsi barang domestik ditambah konsumsi barang luar negeri. Total investasi atau investasi agregat terdiri dari investasi barang dan jasa domestik ditambah dengan investasi barang dan jasa luar negeri dan pengeluaran pemerintah. Total pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah agregat terdiri dari pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa domestik ditambah dengan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa luar negeri. Sehingga dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + X$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

- Y = Pendapatan Nasional
- C = Total Konsumsi atas barang dan jasa
- I = Total Investasi pada barang dan jasa
- G = Total Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa
- X = Total Ekspor barang dan jasa

Total pengeluaran domestik atas barang dan jasa luar negeri adalah pengeluaran atas impor. Sehingga dapat dituliskan persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + X - M$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

- Y = Pendapatan Nasional
- C = Total Konsumsi atas barang dan jasa
- I = Total Investasi pada barang dan jasa
- G = Total Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa
- X = Total Ekspor barang dan jasa

M = Total Impor barang dan jasa

Dikarenakan pengeluaran atas impor termasuk dalam pengeluaran domestik namun tidak termasuk dalam output suatu negara, sehingga yang dimasukkan dalam persamaan adalah Ekspor Neto ($NX = X - M$).

$$Y = C + I + G + NX$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Total Konsumsi atas barang dan jasa

I = Total Investasi pada barang dan jasa

G = Total Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa

NX = Total Ekspor neto

Dari persamaaan diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran atas ouput domestik terdiri dari total konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor. Beberapa komponen inilah yang akan digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara.

10.3 Model Mundell – Fleming

Model Mundell – Fleming adalah model yang menjelaskan mengenai interaksi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan perdagangan internasional dalam perekonomian terbuka. Model ini telah dikembangkan sejak tahun 1963 oleh Robert Mundell yang kemudian menghantarkannya pada penerima penghargaan nobel dalam bidang makroekonomi perekonomian terbuka.

Dalam perekonomian terbuka terdapat arus dan transaksi barang, jasa dan modal antar satu negara dengan negara lainnya. Sehingga kebijakan makroekonomi disuatu negara sangatlah berdampak pada kondisi perekonomian domestik maupun perekonomian global. Melalui model inilah kita dapat memahami bagaimana respon kebijakan fiskal dan

kebijakan moneter suatu negara terhadap kondisi ekonomi global.

Model Mundell – Fleming merupakan pengembangan dari model IS – LM (*Investment-Saving/Liquidity Preference-Money Supply*) yang keduanya membahas mengenai interaksi antara pasar barang dan pasar uang yang kemudian diintegrasikan pada perekonomian terbuka. Sehingga perbedaan antara model IS-LM dan model Mundel Fleming adalah pada asumsi yang digunakan. Model IS-LM mengasumsikan perekonomian tertutup sedangkan model Mundel – Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka (Thompson, 2006).

Pada Model IS dijelaskan hubungan antara pendapatan dan tingkat suku bunga dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar barang. Sedangkan model LM juga menjelaskan hubungan antara pendapatan dan tingkat suku bunga dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang di pasar uang. Namun, pada model mundell – fleming dimasukkan unsur perdagangan internasional untuk dipertimbangkan dampaknya pada tingkat pendapatan nasional dan suku bunga. Berikut adalah persamaan model IS dan LM dalam perekonomian terbuka:

10.3.1 Persamaan Model IS dalam perekonomian terbuka

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e)$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi yang tergantung pada pendapatan neto (pendapatan setelah pajak)

T = Pajak

I = Investasi yang bergantung pada suku bunga

r = tingkat suku bunga

G = Pengeluaran pemerintah

NX = Ekspor Neto yang berpengaruh terhadap nilai kurs

e = Nilai kurs

Keseimbangan akan terjadi pada model IS ketika pendapatan nasional sama dengan total pengeluaran dalam konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintahan dan ekspor neto

10.3.2 Persamaan Model LM pada perekonomian terbuka

$$\frac{M}{P} = L(r, Y)$$

Sumber: (Mankiw, 2010)

Keterangan:

- M/P = Penawaran uang rill (jumlah uang yang disesuaikan dengan tingkat harga)
- L = Permintaan uang rill
- r = Tingkat suku bunga
- Y = Pendapatan nasional
- P = Tingkat harga

Keseimbangan akan terjadi pada model LM ketika penawaran uang rill sama dengan permintaan uang rill.

10.3.3 Persamaan Model Mundell – Fleming

Persamaan model Mundell – Fleming merupakan gabungan antara model IS-LM dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian terbuka. Berikut adalah persamaan perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas sempuran menurut model Mundell – Fleming:

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e)$$
$$\frac{M}{P} = L(r, Y)$$

IS*

LM*

Sumber: (Mankiw, 2010)

Persamaan diatas menunjukkan interaksi dan menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang.

Melalui persamaan ini dapat ditunjukkan dua variabel yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel yang termasuk dalam variabel endogen adalah pendapatan (Y) dan kurs (e) sedangkan variabel eksogen yaitu kebijakan fiskal (G dan T), kebijakan moneter (M), tingkat harga (P) dan tingkat bunga (r). Dalam model ini sangat dimungkinkan juga untuk menganalisis dampak dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perubahan nilai tukar dalam keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O. and Johnson, D.R. (2006) *Macroeconomics 4th Edition*. Pearson Prentice Hall, New Jersey. 6th edn. United States of America: Pearson.
- Froyen, R.T., Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1997) 'Foundations of International Macroeconomics', *Southern Economic Journal*, p. 337. Available at: <https://doi.org/10.2307/1061063>.
- Krugman, P.R. and Obstfeld, M. (2012) *International Economics: Theory and Policy, The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences*. Available at: <https://doi.org/10.4135/9781412972024.n1349>.
- Mankiw, N.G. (2010) *Macroeconomics*. 7th edn. New York: Worth Publishers.
- Rodseth, A. (2004) *Open Economy Macroeconomics*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Salvatore, D. (2012) *International Economics*. 11th edn, *The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Second Edition*. 11th edn. United States of America: Wiley. Available at: <https://doi.org/10.4337/9781849803182.00065>.
- Thompson, H. (2006) *International economics: Global markets and competition, 4th edition*. 2nd edn, *International Economics: Global Markets and Competition, 4th Edition*. 2nd edn. Singapore: World Scientific. Available at: <https://doi.org/10.1142/9538>.
- Vasudevan, H. et al. (2022) *Introductory Macroeconomics*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

BAB 11

TANTANGAN DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Oleh Yulia Nurendah

11.1 Pendahuluan

Globalisasi merupakan tren yang mengarah pada saling ketergantungan antar institusi nasional yang ditandai dengan semakin tidak pentingnya batas antar negara. Fenomena globalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan bahan baku produksi dengan biaya yang lebih efisien, serta peluang besar bagi perluasan pasar ke berbagai negara berkembang. Dalam proses globalisasi, bermunculan lembaga dan organisasi internasional yang memberikan dorongan lebih lanjut bagi kegiatan bisnis internasional (Suyanto, 2022).

Terdapat banyak ragam usaha dari berbagai sektor yang dapat ditekuni, salah satunya melalui bisnis internasional. Bisnis internasional merujuk pada konsep bisnis yang melibatkan aktivitas bisnis dan mencakup beragam skenario yang mencerminkan keragaman hubungan bisnis lintas negara.

11.2 Pengertian Bisnis Internasional

Bisnis internasional mencakup segala aktivitas bisnis yang melibatkan perlintasan batas negara. Definisi ini tidak hanya mencakup perdagangan internasional dan produksi manufaktur di luar negeri, melainkan juga sektor jasa seperti pariwisata, transportasi, perbankan, periklanan, perdagangan grosir, perdagangan eceran, konstruksi, dan media massa (Ball, 1981).

Bisnis internasional merupakan tindakan perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang melewati batas-batas negara. Peningkatan aktivitas bisnis internasional terjadi seiring dengan fenomena pasar yang semakin meluas akibat globalisasi. (Cavusgil, 2008)

Bisnis internasional merujuk pada kajian tentang kegiatan ekonomi yang mencakup transaksi seperti perdagangan internasional (ekspor dan impor) serta investasi asing yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan manfaat tertentu. (Hadi, 2010).

Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi antara beberapa pihak dari lebih dari satu negara (Griffin, 2010).

Bisnis internasional melibatkan beragam transaksi komersial yang terjadi antara dua negara atau lebih. (Daniels, 2018).

Bisnis internasional didefinisikan sebagai aktivitas komersial yang melibatkan transaksi lintas negara. Perusahaan dari berbagai industri dan ukuran dapat terlibat dalam bisnis internasional, namun tingkat keterlibatan bervariasi. (Suyanto, 2022).

Bisnis internasional melibatkan kegiatan bisnis yang terjadi antara satu negara dan negara lainnya, mencakup aspek seperti pemasaran dan perdagangan internasional. Partisipan dapat berasal dari individu swasta, perusahaan, kelompok perusahaan, hingga badan atau instansi pemerintah (<https://www.ocbc.id>, 2023)

Bisnis internasional dijelaskan sebagai kegiatan bisnis yang seluruhnya dilakukan melintasi batas negara. Tidak hanya mencakup perdagangan, tetapi juga mencakup sektor manufaktur dan industri jasa yang berkembang dalam berbagai bidang, seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, serta sektor perbankan dan perdagangan grosir dan eceran. (<https://binus.ac.id>, 2023)

Bisnis internasional adalah cabang ekonomi dimana perusahaan dan organisasi terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk transaksi bisnis, investasi, dan operasi yang dilakukan dilebih dari satu negara. Melibatkan perusahaan dan negara dalam transaksi, investasi atau kegiatan di wilayah lebih dari satu Negara, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pertukaran barang, jasa atau sumber daya antar negara. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran berbagai

barang, jasa dan sumber daya antara negara dengan fokus pada pencapaian keuntungan. Melalui proses ini, perdagangan internasional memainkan peran penting menghubungkan perekonomian berbagai negara melalui jaringan perdagangan dan investasi yang semakin terintegrasi. (<https://www.lspr.ac.id>, 2023).

11.3 Perbedaan Bisnis Internasional dan Perdagangan Internasional

Banyak orang yang mengira bisnis internasional dan perdagangan internasional hal yang sama, namun nyatanya terdapat perbedaan penting diantara keduanya. Bisnis internasional mengacu pada kegiatan bisnis yang melibatkan pemasaran dan perdagangan internasional. Sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan komersial yang dilakukan oleh individu atau kelompok penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Penyelenggaraan perdagangan internasional sangat kompleks dan rumit karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. (<https://binus.ac.id>, 2023)

Fokus kegiatan menjadi perbedaan antara perdagangan dan bisnis internasional. Dalam dunia bisnis, bisnis internasional lebih menekankan pada perdagangan antar perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan, sedangkan perdagangan internasional menitikberatkan pada pertukaran barang dan jasa di pasar global. Bisnis internasional melibatkan kegiatan yang melintasi semua negara. Perdagangan internasional, mengacu pada pertukaran barang antara orang atau kelompok penduduk yang tinggal di satu negara dengan mereka yang tinggal di negara lain, yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama. (<https://www.ocbc.id>, 2023)

Ada perbedaan besar antara bisnis internasional dan perdagangan internasional. Bisnis internasional jauh lebih luas dibandingkan perdagangan internasional. Pada dasarnya perdagangan internasional merupakan bagian dari bisnis internasional yang menitikberatkan pada pertukaran barang

dan jasa antar negara tanpa dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh perusahaan di negara tujuan. Saat ini, bisnis internasional mencakup berbagai aspek seperti investasi langsung, pengelolaan tempat usaha asing, dan strategi manajemen yang melibatkan berbagai negara. Dengan kata lain bisnis internasional mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang menjalankan bisnis secara internasional, perdagangan internasional hanya merupakan bagian khusus yang mencakup pergerakan barang dan jasa melintasi batas negara (<https://www.lspr.ac.id>, 2023).

11.4 Jenis-Jenis Bisnis Internasional

Menurut Suyanto (2022), terdapat beragam jenis kegiatan bisnis internasional, yaitu :

1. Ekspor adalah tindakan menjual produk yang dihasilkan di dalam negeri ke negara-negara lain. Melalui kegiatan ekspor, perusahaan dapat mengakses pangsa pasar yang lebih luas, sehingga apabila terjadi penurunan penjualan di pasar domestik, dapat diimbangi dengan pendapatan dari ekspor. Sementara itu, impor merujuk pada pembelian barang atau jasa yang diproduksi di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Perusahaan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, terutama jika bahan baku tersebut tidak tersedia secara lokal atau jika harganya lebih tinggi di pasar lokal.
2. Lisensi merupakan perjanjian antara perusahaan-perusahaan di suatu negara tertentu untuk memberikan hak penggunaan hak kekayaan intelektual kepada perusahaan-perusahaan di negara lain. Jenis hak kekayaan intelektual yang dapat dialihkan antara lain hak cipta, paten, merek dagang, merek, atau rahasia dagang. Perusahaan pemberi lisensi menerima pembayaran berupa royalti dari perusahaan penerima hak lisensi. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba. Komersialisasi terjadi ketika sebuah perusahaan di suatu negara memberikan hak kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan sistem operasinya, termasuk merek, merek dagang, dan logonya. Pihak yang menawarkan

waralaba disebut penerima waralaba dan pihak yang menerima waralaba disebut penerima waralaba. Seperti halnya lisensi, penerima lisensi menerima pembayaran atas hak untuk menggunakan lisensi tersebut

3. Kontrak manajemen adalah kontrak bagi suatu perusahaan di suatu negara untuk mengelola fasilitas atau memberikan jasa manajemen kepada suatu perusahaan di negara lain. Dalam konteks ini, penyedia layanan dibayar sesuai jumlah yang disepakati. Kontrak manajemen merupakan hal yang umum di sektor utilitas publik di negara maju dan berkembang. Ada dua jenis pengetahuan yang dapat ditransfer melalui kontrak manajemen: pengetahuan teknis manajemen dan keterampilan bisnis dan manajemen.
4. Rekanan aliansi strategis, dapat dijelaskan sebagai hubungan kolaboratif antara dua entitas atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Hubungan antar entitas tersebut hanya sebatas kerjasama dan tidak melibatkan pendirian perusahaan baru. Hubungan bisnis antar afiliasi dapat diciptakan dan dipelihara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Integrasi kemitraan strategis dapat melibatkan perusahaan dan pemasoknya, pelanggan dan pesaing. Saat membuat afiliasi ini, terkadang setiap perusahaan memiliki sebagian dari afiliasi tersebut.
5. Penanaman modal asing dapat dijelaskan sebagai pembelian beberapa aset atau kepemilikan suatu perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk menguasai perusahaan tersebut. Investasi asing ini didorong oleh banyak faktor, termasuk globalisasi dan merger dan akuisisi. Secara umum penanaman modal asing berbeda dengan penanaman modal finansial yang tidak mempengaruhi pengelolaan suatu perusahaan.

Menurut Ball et al., (2005), ada tiga kegiatan bisnis internasional, yaitu :

1. Perdagangan internasional : ekspor dan impor.

2. Investasi langsung luar negeri merupakan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan internasional untuk mendirikan dan memperluas operasional di luar negeri.
3. Mencari sumber di luar negeri, mengacu pada proses pengadaan bahan baku, komponen, dan produk dari luar negeri.

Menurut Kartawirya (2014), banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional, diantaranya :

1. Kegiatan ekspor-impor memiliki peran utama dalam transaksi ekonomi suatu negara. Jika nilai ekspor suatu negara melebihi nilai impornya dalam neraca, maka negara tersebut dapat dianggap maju dengan pendapatan yang besar. Jika nilai impor lebih tinggi daripada ekspor, negara tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam pertumbuhan ekonominya karena kecenderungan ketergantungan pada negara lain..
2. Investasi merupakan tindakan di mana perusahaan menyuntikkan modalnya. Jenis investasi melibatkan investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan menanamkan modal secara fisik di negara tujuan. Alternatif lainnya adalah melalui investasi di pasar modal, dimana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi.

11.5 Tantangan Bisnis Internasional

Keberhasilan perusahaan yang beroperasi di pasar global bergantung pada kemampuan memahami dan mengatasi tantangan. Tantangan bisnis internasional diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan budaya di antara negara-negara dapat memiliki dampak pada gaya berbisnis, komunikasi, dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap norma-norma sosial, nilai-nilai, dan etika bisnis yang berlaku di setiap lokasi.

2. Setiap negara memiliki peraturan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berbeda dalam konteks bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi semua persyaratan perizinan, pajak, dan peraturan yang berlaku di setiap wilayahnya.
3. Fluktuasi nilai mata uang dapat memiliki dampak pada margin keuntungan perusahaan. Ketika nilai tukar mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya impor barang dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan margin keuntungan. Sebaliknya, ketika mata uang lokal menguat, margin keuntungan dapat meningkat.
4. Perubahan politik dan kebijakan pemerintah dapat berdampak besar pada operasional perusahaan. Ketidakstabilan ekonomi diberbagai negara juga dapat mengganggu operasional dan kinerja keuangan perusahaan (<https://www.lspr.ac.id> , 2023).

Mengoperasikan bisnis internasional bukanlah kegiatan yang bebas dari hambatan, bahkan dapat dikatakan bahwa bisnis semacam ini memiliki lebih banyak kendala jika dibandingkan dengan beroperasi di pasar domestik. Terkadang, negara-negara lain memiliki berbagai kepentingan yang dapat menjadi penghambat dalam transaksi bisnis internasional. Berikut beberapa kendala lain yang dapat menghambat kelancaran aktivitas bisnis:

1. Faktor perbedaan bahasa dan budaya sosial sering kali menjadi penghalang dalam kelancaran aktivitas bisnis internasional. Karena bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat penting, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Hubungan politik antara suatu negara dan negara lain dapat menjadi kendala dalam hubungan bisnis kedua negara, karena undang-undang atau peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara dapat membatasi keterlibatan dalam bisnis internasional.
3. Tarif bea cukai dan pembatasan perdagangan merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor.

4. Kendala operasional, seperti transportasi atau pengiriman barang dari satu negara ke negara lain, merupakan aspek lain yang dapat menghambat kelancaran bisnis internasional. (<https://binus.ac.id>, 2023).

Beberapa hal yang diketahui dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan bisnis internasional adalah:

1. Stabilitas politik suatu negara dan rendahnya tingkat keamanan membuat bisnis internasional sulit berjalan lancar. Perubahan kebijakan politik dan hukum suatu negara dapat mempengaruhi praktik bisnis internasional.
2. Hambatan utama terhadap bisnis internasional adalah pembatasan perdagangan dan tarif. Biaya pengiriman dibebankan selama ekspor dan impor. Hal ini mempengaruhi harga produk dan jasa serta keuntungan perusahaan. Selain itu, pembatasan perdagangan mempersulit pelaksanaan bisnis internasional.
3. Perbedaan bahasa dan budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam bisnis internasional. Setiap negara mempunyai bahasa dan adat istiadatnya masing-masing, sehingga untuk beroperasi secara efektif, perusahaan harus memahami dan memenuhi persyaratan ini sebelum memasuki pasar.
4. Tantangan manajemen seperti pengelolaan rantai pasokan yang kompleks dan logistik internasional menjadi kendala, terutama bagi perusahaan yang baru memulai bisnis internasional. (<https://www.ocbc.id>, 2023)

Bisnis internasional menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang memiliki niat untuk merambah pasar global. Beberapa tantangan tersebut mencakup:

1. Tiap negara memiliki ciri budaya yang unik, termasuk dalam aspek perilaku bisnis. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerimaan bisnis di pasar global.
2. Pasar internasional cenderung sangat bersaing karena perusahaan dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan pelanggan dalam pasar yang sama.

3. Perbedaan nilai mata uang bisa memiliki dampak yang besar pada profitabilitas bisnis internasional.
4. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi bisnis yang berbeda-beda. Perusahaan yang berencana memasuki pasar internasional perlu memperhatikan perbedaan hukum dan regulasi tersebut.
5. Ragam bahasa juga dapat menjadi kendala dalam dunia bisnis internasional. Perusahaan harus mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa yang digunakan di pasar global yang dituju.
6. Kemajuan teknologi dapat menjadi tantangan bagi perusahaan agar dapat mengadopsi teknologi yang sesuai untuk pasar internasional dan bersaing dengan perusahaan lain yang lebih unggul dalam aspek teknologi.
7. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional harus memperhatikan isu keamanan data, khususnya jika mereka menangani data pelanggan di pasar internasional. (<https://pasla.jambiprov.go.id> , 2023).

Biasanya, setiap negara terlibat dalam kesepakatan perdagangan dengan negara lain. Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan perdagangan atau ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara dalam konteks perdagangan internasional mencakup:

1. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar rendah dapat memiliki dampak pada aktivitas ekspor dan impor. Semakin rendahnya nilai tukar rupiah, maka harga barang impor dan ekspor menjadi lebih tidak stabil. Situasi ini dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap penyediaan barang di dalam negeri.
2. Sektor industri yang rentan. Sejumlah sektor industri di Indonesia masih memperlihatkan tingkat kerentanan dan kelemahan karena masih bergantung pada impor bahan baku dan produk setengah jadi. Kinerja produksi tidak dapat berjalan optimal apabila pasokan bahan baku mengalami kendala. Pada saat yang sama, perusahaan masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan bahan baku domestik. Kondisi

ini berpotensi menghambat jalannya proses produksi dan ketersediaan produk jadi.

3. Tantangan peningkatan hambatan perdagangan. Salah satu kendala yang semakin meningkat dalam perdagangan internasional adalah proteksionisme, yang juga menjadi hambatan nyata dalam aktivitas perdagangan. Proteksionisme dapat memunculkan berbagai bentuk, seperti upaya anti penipuan, tindakan perlindungan subsidi, penerapan tarif, dan persyaratan lisensi impor dari mitra dagang. Masalah lingkungan dan keberlanjutan alam juga seringkali dijadikan alasan dalam pelaksanaan kebijakan proteksionisme.
4. Perolehan kesepakatan kerja sama perdagangan. Beberapa kali, Indonesia nampak menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Padahal, perundingan kerja sama perdagangan memiliki potensi untuk membuka peluang investasi, pasar bagi produk baru, serta mengurangi kendala perdagangan seperti penghapusan tarif atau hambatan non-tarif.
5. Transformasi perilaku konsumen. Perdagangan internasional memiliki potensi untuk merubah perilaku konsumen. Konsumen menjadi lebih kritis dalam memilih produk, dengan keamanan pangan dan kebersihan sebagai aspek yang lebih diutamakan. Selain itu, dalam era teknologi dan ekosistem digital saat ini, pola perdagangan juga perlu mengalami perubahan.
6. Potensi terjadinya defisit dan resesi ekonomi. Terjadinya konflik di suatu negara dapat menghambat proses perdagangan global. Konflik ini melibatkan berbagai peristiwa seperti kudeta, konflik militer, demonstrasi, dan kerusuhan yang sering terjadi di berbagai negara. Tantangan perdagangan internasional semakin rumit dengan eskalasi perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Hal ini membuat keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas menjadi semakin sulit..
7. Organisasi regional. Beberapa wilayah di dunia memiliki organisasi yang terdiri dari negara-negara tertentu, seperti ASEAN. Organisasi semacam ini memiliki kebijakan yang

mengatur aspek perdagangan internasional. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan impor dan ekspor hanya untuk negara-negara anggota organisasi tersebut. Meskipun kebijakan ini memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota, terutama yang sedang berkembang, karena dapat mengamankan pangsa pasar domestik tanpa persaingan yang ketat, namun ada kekhawatiran bahwa produk bisa kehilangan kendali kualitas karena minimnya persaingan. Selain itu, kebijakan ini dinilai kurang efektif karena tidak memberi kesempatan bagi negara di luar organisasi untuk melakukan impor barang. Padahal, ada kemungkinan produk dari negara lain memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau.

8. Kualitas tenaga kerja. Keberhasilan proses produksi di berbagai sektor industri sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi pula. Produk yang unggul ini memiliki daya saing yang lebih baik dalam perdagangan internasional. Sayangnya, tidak semua negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Meskipun memiliki banyak sumber daya alam, jika tenaga kerja tidak berkualitas, hasil produksi menjadi kurang optimal (<https://blueraycargo.id> , 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, D. A., & Wendell, R. E. 1981. *International business: An operational theory*. Praeger Publishers.
- Ball, Donald A., McCulloch, Wendell H. Jr., Frantz, Paul L., Geringer, J. Michael, Minor, Michael S. (2005). *Bisnis Internasional Tantangan Persaingan Global*. Jilid 1 dan 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Cavusgil, S. Tamer., Knight, Gary., Riesenberger, John, Yaprak, Attila. 2008. *Conducting Market Research for International Business*. New York: Business Expert Press.
- Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P. 2018. *International business: Environments and operations*. Pearson.
- Griffin, Pustay. 2010. *International Business*. Pearson.
- Hadi. 2010. Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia's Dynamics in the Post-Global Crisis World. *International Journal of China Studies*. Vol. 3, No. 2, pp. 151-166
- Kartawinata, Budi Rustandi. 2014. *Bisnis Internasional*. PT Karya Manunggal Lithomas. Bandung.
- Suyanto. 2022. *Bisnis Internasional: Strategi dan Tantangan Kontemporer*. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya
- <https://binus.ac.id/malang/2023/09/bisnis-internasional-pengertian-tantangan-dan-tahapannya/>. 2023. *Bisnis Internasional : Pengertian, Tantangan, dan Tahapannya*.
- <https://blueraycargo.id/article/2023/05/30/tantangan-yang-dihadapi-dalam-perdagangan-internasional/>. 2023. *Pahami 8 Tantangan yang Dihadapi dalam Perdagangan Internasional*
- <https://www.lspr.ac.id/tantangan-peluang-bisnis-internasional/>. 2023. *Tantangan dan Peluang dalam Bisnis Internasional*.
- <https://www.ocbc.id/id/article/2023/11/30/bisnis-internasional-adalah>. 2023. *Bisnis Internasional: Pengertian, Hambatan & Tahapan Memulai*.

<https://pasla.jambiprov.go.id/bisnis-internasional-menjajaki-peluang-bisnis-di-era-globalisasi/>. 2023. Bisnis Internasional: Menjajaki Peluang Bisnis di Era Globalisasi

BIODATA PENULIS

Roy Budiharjo, SE, M.Ak

Dosen di Universitas Telkom Bandung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi S1 Akuntansi

Roy Budiharjo, SE, M.Ak, Menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi (SE) untuk S1 dan Magister Akuntansi (M.Ak) untuk S2, saat ini on going menempuh gelar Phd di Universitas Utara Malaysia. Mengawali Karir sebagai Dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta dan di tempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prodi Akuntansi dan saat ini sebagai dosen di Universitas Telkom Bandung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi S1 Akuntansi. Dosen tersertifikasi pada tahun 2019. Jabatan Fungsional adalah Lektor

BIODATA PENULIS



Ike Susanti, SE., MMA

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi

Penulis lahir di Purworejo tanggal 21 April 1986. Penulis adalah dosen tetap pada program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Agribisnis. Penulis menekuni bidang Menulis.

Hasil karya pertama menulis buku berjudul " Ekonomi Manajerial" Edisi Pertama pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Tidar Media. Hasil karya kedua merupakan kolaborasi bersama seluruh dosen di berbagai daerah dengan judul buku "Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi dan Keuangan (2022)" karya berikutnya berjudul " Manajemen Sumber Daya Manusia di Era 4.0 (2022)". Selain menulis buku penulis juga memiliki usaha kerajinan tangan berupa seni rajut "Craft Tsarwah Collection" Selain berkarya dalam usaha beliau mendedikasikan hidupnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan melakukan berbagai penelitian, menerbitkan buku, jurnal serta memberikan pelatihan berwirausaha di lingkungan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Paulus Laratmase, SE., M.Si

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lelemuku
Saumlaki

Penulis lahir di Ambon tanggal 31 Juli 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Pattimura Ambon, melanjutkan Program Magister pada Universitas Pattimura Ambon Program Studi Ekonomi minat Ekonomi Perencanaan Pembangunan.

BIODATA PENULIS

Tri Wahyu Rejekiningsih

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Diponegoro

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 pada Jurusan Ilmu Ekonomi. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Banatul Hayati SE.MSi

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnisa Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Cirebon tanggal 16 Maret 1968. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan dan melanjutkan studi S2 pada program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Penulis menekuni penelitian bidang ekonomi makro dan ekonomi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



I Nyoman Wahyu Widiana,S.E.,M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
wahyuwidiana@unud.ac.id

I Nyoman Wahyu Widiana, pria kelahiran Sanur, 25 April 1994. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini menamatkan S1 Ekonomi Pembangunan tahun 2015 dan S2 Ilmu Ekonomi tahun 2018 di Universitas Udayana, dengan predikat Cumlaude Lulusan Terbaik. Penulis kini tengah menyelesaikan S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Udayana Penulis menyukai kesenian dan kebudayaan sejak remaja ini mengantarkannya mengikuti pertukaran pelajar dan kebudayaan mewakili Indonesia pada ajang Asia Student Summit di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2018. Saat ini penulis menjabat menjadi Ketua BUMN CSR Provinsi Bali. Penulis aktif sebagai pembicara pada setiap kegiatan, termasuk Pembicara Nasional Literasi Digital Keminfo 2021. Penulis berkomitmen dapat berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Besar harapan penulis untuk dapat memajukan generasi emas penerus bangsa melalui tulisannya.

BIODATA PENULIS



Misbahul Munir

Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung

Lahir di Belitang, Sumatera Selatan pada 17 Juli 1995. Adalah pengajar di Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2017 dan melanjutkan pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia (UII) lulus tahun 2019. Pernah mengabdikan menjadi dosen tetap di STAI Ash-Shiddiqiyah OKI Sumatera Selatan tahun 2020-2022. Selain menjadi mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, juga aktif menulis artikel ringan di surat kabar, baik lokal maupun nasional.

BIODATA PENULIS



Yuyun Anggraini, S.E., M.Ec.Dev., CRMP
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Kendari pada tanggal 16 Juli 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Dr. Yulia Nurendah,. SE., MM., CDM

Staf Dosen Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital.
Fakultas Vokasi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Penulis lahir di Malang tanggal 2 Juli 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital Fakultas Vokasi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi. Melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Manajemen. Menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Penulis menekuni bidang Manajemen dan Bisnis